



KOLONIALISME BELANDA **dan** **MULTIKULTURALISME** **MASYARAKAT** Kota Medan

Rosmaida Sinaga • Lister Eva Simangunsong • Syarifah

**Kolonialisme Belanda dan
Multikulturalisme Masyarakat
Kota Medan**



THE
Character Building
UNIVERSITY

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan

Penulis:

Rosmaida Sinaga
Lister Eva Simangunsong
Syarifah

THE
Character Building
UNIVERSITY

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2020

Penulis:

Rosmaida Sinaga
Lister Eva Simangunsong
Syarifah

Editor: Alex Rikki

Desain Cover: Tim Kreatif Kita Menulis

Cover: <https://insanpelajar.com>

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

Kontak WA: +62 821-6453-7176

Rosmaida Sinaga, Lister Eva Simangunsong & Syarifah

Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan

Yayasan Kita Menulis, 2020

xii; 146 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6512-05-0 (print)

E-ISBN: 978-623-6512-06-7 (online)

Cetakan 1, Juni 2020

- I. Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
ijin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Sumatera Timur diikuti dengan penerapan berbagai kebijakan di wilayah itu. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penerapan Undang-Undang Agraria pada 1870. Penerapan undang-undang tersebut, membuka peluang kepada pemodal swasta Belanda khususnya dan Eropa umumnya untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Salah satu bentuk penanaman modal adalah pembukaan perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur.

Pembukaan perkebunan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan. Pada awal pembukaan perkebunan, penduduk pribumi Sumatera Timur (Melayu dan Batak) kurang berminat bekerja sebagai buruh di perkebunan. Oleh karena itu, para pemilik perkebunan mendatangkan buruh dari luar wilayah itu yaitu orang Cina, Keling, Jawa, Banjar dan Bawean. Kehadiran para buruh dari luar wilayah Sumatera Timur berdampak terhadap terciptanya masyarakat yang multikultur di Kota Medan.

Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kondisi masyarakat Kota Medan sangat multikultural baik dari aspek suku, ras, agama, budaya maupun status sosial. Dengan kata lain, pembukaan perkebunan di Sumatera Timur telah menciptakan masyarakat perkebunan yang multikultural. Kehadiran kaum buruh perkebunan dari luar Deli menyebabkan penduduk wilayah tersebut sangat heterogen.

Terciptanya masyarakat Kota Medan yang multikultural merupakan dampak dari penerapan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Timur. Oleh karena itu Bahan Ajar ini diberi judul 'Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara'. Buku ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para

mahasiswa Pendidikan Sejarah yang mengikuti perkuliahan Sejarah Indonesia Masa Kolonial.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat dalam pengembangan materi Sejarah Indonesia Masa Kolonial.



Medan, Medio Maret 2020

Penulis,

Rosmaida Sinaga

THE
Character Building
UNIVERSITY

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kolonialisme dan Imperialisme	3
1.3 Pengertian Masyarakat Multikultural.....	10

Bab 2 Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Di Indonesia (1602-1789)

2.1 Pembentukan Perusahaan Dagang Antar Benua di Belanda	15
2.2 Pembentukan VOC di Negeri Belanda.....	17
2.3 VOC di Asia	20
2.4 VOC di Batavia	24
2.5 Budaya Indisch	28
2.6 VOC di Nusantara	31
2.7 VOC Memonopoli Rempah-Rempah.....	37
2.8 Rempah-Rempah dari Nusantara Yang Dimonopoli VOC	42
2.8.1 Cengkeh di Maluku Tengah.....	42
2.8.2 Pala dan Fuli dari Banda	50
2.8.3 Lada dari Sayap Kanan	56
2.9 Intervensi Politik dan Perdagangan VOC di Pasisir	60
2.9.1 Intervensi Politik	64
2.9.2 Perdagangan VOC	67
2.10 Pembubaran VOC	73

Bab 3 Pemerintahan Kolonial Belanda Di Indonesia

3.1 Penegakan Kekuasaan Belanda di Indonesia	77
3.2 Masa Pemerintahan Liberal 1811-1816.....	86
3.3 Masa Komisi Jenderal (1816-1819).....	87
3.4 Masa van der Capellen (1819-1825).....	89
3.5 Sistem Tanam Paksa (1830-1870)	91

3.6 Politik Kolonial Liberal (1850-1870)	99
3.7 Politik Etis	102
Bab 4 Kolonialisme Belanda Di Sumatera Timur	
4.1 Motivasi Kolonialisme Belanda ke Luar Pulau Jawa	107
4.2 Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Pembukaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur	109
Bab 5 Dampak Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Masyarakat Kota Medan	
5.1 Terciptanya Masyarakat Yang Multikulturalis	119
5.2 Terciptanya Pemukiman Yang Tersegmentasi Berdasarkan Suku Bangsa	126
5.3 Terciptanya Stratifikasi Sosial Baru di Perkebunan.....	131
5.4 Timbulnya Masalah-Masalah Sosial.....	135
5.5 Kota Medan Sebagai Kota Multikultural.....	141
Bab 6 Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan	143
5.2 Saran	144
Daftar Pustaka	145

Daftar Gambar

Gambar 4.1: Perkebunan Tembakau Deli.....	112
Gambar 5.1: Barak-Barak Cina di Perkebunan Deli.....	128
Gambar 5.2: Barak-Barak Jawa.....	128
Gambar 5.3: Rumah Sakit Deli	130
Gambar 5.4: Rumah Asisten Kebun	131





THE
Character Building
UNIVERSITY

Daftar Tabel

Tabel 2.1: “Orang Asing” di Batavia Abad Ke-17	26
Tabel 5.1: Komposisi Suku Bangsa Tenaga Kerja Perkebunan di Sumatera Timur.....	120
Tabel 5.2: Pergeseran Komposisi Menurut Negara Asal Tenaga Kerja di Sumatera Timur Periode 1881-1902.....	121
Tabel 5.3: Populasi Afdeeling Deli-Serdang Tahun 1930.....	123
Tabel 5.4: Populasi Asal Nusantara di Afdeeling Deli Serdang Tahun 1930	124
Tabel 5.5: Populasi Suku Batak di Afdeeling Deli Serdang Tahun 1930	125
Tabel 5.6: Daftar Upah/Gaji di Perkebunan Sumatera Timur.....	127



THE
Character Building
UNIVERSITY



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah kota yang didiami masyarakat yang multikultural baik dari aspek suku, ras, agama, budaya maupun status sosial. Keberagaman di Kota Medan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena pengaruh akulturasi budaya dari berbagai etnik yang mendiami Kota Medan. Etnik yang mendiami Kota Medan sangat beragam yaitu Suku Melayu, Batak (Karo, Simalungun, Toba, Mandailing-Angkola, Pakpak), Jawa, Minang, India-Tamil, Tionghoa, Aceh, dan lain sebagainya. Masing-masing etnik tersebut membawa budaya masing-masing yang menjadikan Kota Medan sebagai Kota Multikultural. Selain suku, agama yang dianut penduduk Kota Medan juga beragam mulai dari agama resmi seperti: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Khonghucu hingga aliran kepercayaan seperti Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Pemena, Ahmadiyah, Saksi Jahowa, Sikh dan lain sebagainya. Keberagaman agama yang dianut masyarakat Kota Medan juga terlihat dari jumlah masjid, gereja dan Vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh Kota Medan. Bahasa yang digunakan penduduk Kota Medan juga sangat beragam seperti Indonesia, Batak, Jawa, Hokkien, dan Minangkabau.

Secara historis terciptanya masyarakat Kota Medan yang multikultural bertalian dengan penerapan kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada awal penegakan kekuasaannya di Indonesia, perhatian Belanda hanya terbatas di Jawa. Sejak tahun 1830 dengan penerapan Cultuurstelsel, Jawa telah menjadi sumber keuntungan besar bagi negeri Belanda. Meskipun demikian, sejak 1840

pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan perluasan kekuasaannya ke daerah-daerah luar Jawa. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan yaitu pertama, untuk menjaga keamanan daerah-daerah yang sudah dikuasai, maka Belanda menakhlukkan daerah-daerah lain yang mungkin akan mendukung dan membangkitkan gerakan perlawanan. Kedua, ketika perjuangan bangsa Eropa untuk memperoleh daerah jajahan mencapai puncaknya pada akhir abad XIX, Belanda merasa wajib menetapkan hak mereka terhadap daerah-daerah di luar Jawa untuk mencegah campur tangan bangsa lainnya di Tanah Jajahnya (Ricklefs, 1995: 200).

Menindaklanjuti keinginan Belanda untuk melakukan perluasan kekuasaannya ke daerah-daerah luar Jawa, di antaranya Sumatera Timur, pemerintah kolonial Belanda mengutus Residen Riau yang bernama Netscher untuk mengunjungi pemimpin lokal di Pesisir Timur pada Agustus 1862. Kunjungannya tersebut berhasil memperoleh pengakuan Langkat, Deli dan Serdang atas kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Setelah penguasa lokal Langkat, Deli dan Serdang mengakui kekuasaan pemerintah Belanda, pada tahun 1863 Jacob Nienhuys berangkat ke Deli setelah singgah di Riau dan bertemu dengan Residen Netscher. Nienhuys tiba di Labuhan Deli pada Juli 1863 dan membuka perkebunan tembakau. Hasil panen pertamanya yang dikirim ke Belanda pada awal tahun 1864 membuat para spesialis terkesan karena kualitasnya yang istimewa. Oleh karena itu, Nienhuys berhasil memperoleh pinjaman dana sehingga ia dapat segera pergi mencari pekerja Tionghoa ke Singapura dan menandatangani konsesi lahan pertama dengan Sultan Deli tahun 1865. Sejak tahun 1865 dua pekebun Swiss dan seorang pekebun Prussia datang ke Deli untuk membuka perkebunan tembakau, pala dan kelapa. Pada tahun 1867, Nienhuys memperoleh lahan konsesi baru yang berada di daerah antara Sungai Percut dan Deli. Pada tahun 1868 di Deli sudah ada enam perkebunan tembakau (Perret, 2010: 180).

Peningkatan luas dan jumlah perkebunan di Sumatera Timur seiring dengan peningkatan tenaga kerja (buruh atau kuli) yang dipekerjakan di perkebunan tersebut. Pada awal pembukaan perkebunan di Deli, penduduk setempat (Melayu dan Batak) kurang berminat untuk bekerja di perkebunan. Oleh karena itu, pekebun harus mendatangkan buruh atau kuli dari luar wilayah itu. Kehadiran buruh dari luar wilayah itu berperan dalam menciptakan keragaman etnis di Sumatera Timur umumnya dan khususnya Kota Medan. Dengan demikian, keberagaman etnis yang berdiam di Kota Medan berkaitan dengan pembukaan perusahaan perkebunan secara besar-besaran pada masa kolonial

Belanda. Kehadiran kaum buruh dari luar wilayah Sumatera Timur pada era kolonialisme Belanda menciptakan multikulturalisme masyarakat Sumatera Timur umumnya dan Kota Medan khususnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang berperan menciptakan multikulturalisme masyarakat di Kota Medan.

1.2 Kolonialisme dan Imperialisme

Kolonialisme berasal dari kata koloni. Kata koloni berasal dari bahasa latin *colonia* yang berarti tanah jajahan (pemukiman). Koloni berarti pemukiman suatu negara di luar wilayah negaranya, yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. Kolonialisme adalah usaha untuk memperluas dan menguasai suatu daerah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara induk. Kolonialisme bertujuan untuk mencari dominasi dari seluruh sumber daya yang dimiliki wilayah yang dijadikan sebagai koloninya. Keinginan suatu negara penjajah untuk memperluas wilayah koloni. Menurut Soekarno, imperialisme adalah suatu nafsu untuk menguasai atau memengaruhi ekonomi bangsa lain yang diwujudkan melalui pembentukan negara-negara mandat, daerah-daerah pengaruh, sedangkan di dalam sifatnya menaklukkan negeri orang lain, imperialisme itu berbuah negeri jajahan (Soekarno, 1951: 14-24).

Imperialisme modern adalah istilah yang digunakan dalam historiografi untuk mendeskripsikan periode dari sekitar 1870 atau 1880 hingga 1914, di mana negara-negara Barat merampas kekuasaan wilayah-wilayah non-Barat, terutama Afrika-Asia. Imperialisme sebagai istilah dengan sejarah panjang dan banyak makna. Denotasi utama Imperialisme tentang beragam tipe dominasi dan relasi kekuasaan tidak simetris. Istilah imperialisme digunakan sebagai istilah miring untuk eksploitasi. Ada beberapa kontras periodisasi imperialisme yaitu:

1. Perbedaan antara “ekonom” dan “generalis politis” antara mereka yang menekankan dominannya model penjelasan ekonomi dan menekankan penjelasan mereka pada persaingan diplomatik internasional serta urusan dalam negeri.
2. Perbedaan antara mereka yang mengidentifikasi tahun 1870 atau 1880 sebagai titik balik yang jelas berbagai perkembangan yang kontinyu

3. Perbedaan antara Eurosentris dan Periferis yakni antara mereka yang mencari penyebab di negara induk dan mereka yang mencari sebab di penggirannya yaitu di daerah Jajahan itu sendiri (Locher-Scholten, 2008: 17-18).

Adapun alasan penempatan periodisasi awal imperialisme tahun 1870 atau 1880 adalah pembagi-bagian dunia dalam skala besar dimulai pada 1880, dengan gerakan pendahuluan pada 1870-an. Hal ini menyiratkan bahwa kira-kira pada saat itulah Eropa mengubah orientasinya terhadap dunia non-Barat. Eropa yang sebelumnya banyak memusatkan perhatian kepada daerah-daerah pemukiman orang kulit putih seperti Kanada, Australia, Amerika Latin, menggeser perhatiannya ke Afrika dan Asia pada 1880-an (Locher-Scholten, 2008: 18-19).

Teori-teori imperialisme paling awal menekankan kepentingan ekonomi. Sejarawan Inggris, John Hobson menyatakan bahwa dorongan ekspansionis Inggris di Afrika Selatan digerakkan oleh kepentingan modal Inggris. Rudolf Hilfering menyatakan bahwa dorongan ekspansionis suatu bangsa adalah kepentingan kapital monopoli. Lenin mengkombinasikan antara kepentingan modal dan kepentingan kapital monopoli sebagai dorongan ekspansionis suatu bangsa. Dorongan ekspansionis lainnya didasarkan pada ekonomi komersial, dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan kompetisi internasional meningkatkan tuntutan domestik atas bahan mentah dan pasar. Penjelasan-penjelasan awal tentang imperialisme, baik Hobson maupun Lenin tidak memandang imperialisme sebagai perlombaan mencari jajahan tetapi sebagai sebuah fase dalam perkembangan kapital monopoli dalam tata ekonomi Barat (Locher-Scholten, 2008: 18-19).

Kubu generalis politis menolak penekanan pada motif-motif ekonomi sebagai dorongan ekspansionis suatu negara. D.K. Fieldhouse menyatakan imperialisme dipandang sebagai perluasan pertarungan politik di Eropa ke pinggiran. H.U. Wehler menyatakan bahwa keikutsertaan Jerman dalam mencari wilayah jajahan sebagai pengalihan ketegangan-ketegangan dalam negeri, yang diakibatkan ketimpangan pertumbuhan industri dan distribusi penghasilan yang tidak merata di Jerman. Berdasarkan hasil kajian para ahli teori-teori imperialisme tersebut disimpulkan bahwa penekanan teori imperialisme modern dapat dikategorikan dalam tiga jalur yaitu faktor ekonomi, politik internasional, dan perimbangan kekuatan sosial politik dalam negeri (Locher-Scholten, 2008: 18-21; Mommsen, 1987: 12-40).

Kajian dua ahli sejarah Inggris bernama John Gallagher dan Ronald Robinson membahas peralihan kekuasaan dari informal menjadi formal. Gallagher dan Robinson memformulasikan kesinambungan ekspansi luar negeri Inggris mengikuti prinsip perluasan kekuasaan informal namun jika diperlukan diterapkan kekuasaan secara formal. Pada awalnya kekuatan kolonial mencari pengaruh melalui metode politik tidak langsung di daerah koloni. Pemerintah kolonial menghindari intervensi secara langsung (I Ketut Ardhana, 2005: 5; Mommsen, 1987: 88-92).

Ahli lainnya yang mengkaji tentang ekspansi kolonial adalah Elsbeth Locher-Scholten. Menurut Locher-Scholten hubungan Belanda dengan Kesultanan Jambi menggambarkan seluruh motif yang dikutip oleh teori-teori imperialisme modern untuk menjelaskan dorongan ekspansionis: faktor-faktor ekonomi, ketakutan terhadap kompetisi dari negara-negara lain, aspirasi administratif, minat keserjanaan, dan argumen-argumen ideologis (Locher-Scholten, 2008: 14).

Teori Imperialisme yang dirumuskan berkenaan dengan argumen ekonomi antara lain:

1. Teori imperialisme menurut John Hobson (sejarawan Inggris dalam karyanya *Imperialism: A Study*, yang menelaah Perang Boer dinyatakan bahwa dorongan ekspansionis Inggris di Afrika Selatan digerakkan oleh kepentingan modal Inggris.
2. Imperialisme, entah itu ekspor modal Inggris, sebagaimana diyakini Hobson atau kepentingan kapital monopoli, menurut Rudolf Hilferding, atau kombinasi keduanya, seperti dalam model Lenin, kapital selalu mendahului identitas nasional.
3. Penjelasan Imperialisme didasarkan pada ekonomi komersial dengan asumsi bahwa pertumbuhan kompetisi internasional meningkatkan tuntutan domestik akan bahan mentah dan pasar. Hal ini membuktikan bahwa penjelasan awal imperialisme tidak muncul dari keprihatinan terhadap korban ekspansi. Hobson maupun Lenin sangat Eurosentris dalam pendekatan mereka.
4. Menurut Hobson investasi di daerah jajahan menyebabkan rendahnya konsumsi di Inggris dengan segala konsekuensi buruk yang ditimbulkannya bagi buruh Inggris.

5. Lenin menganggap imperialisme berikut investasinya di daerah jajahan ini (termasuk ekspansi Rusia di Asia Tengah) sebagai ciri khas kapitalisme.
6. Imperialisme tidak dipandang sebagai perlombaan mencari jajahan tetapi sebagai sebuah fase dalam perkembangan kapital monopoli dalam tata ekonomi Barat (Locher-Scholten, 2008: 18-19).

Berdasarkan teori imperialisme yang dirumuskan berkenaan dengan kebijakan luar negeri (kubu generalis politis) bahwa faktor yang menentukan dalam perlombaan mencari jajahan adalah persaingan politik antara dua negara industri utama, Inggris dan Prancis, Prancis dan Reich Jerman Baru. D.K. Fieldhouse menyatakan bahwa imperialisme merupakan perluasan pertarungan politik di Eropa ke pinggiran. Menurut Elsbeth Locher-Scholten bahwa dalam teori imperialisme modern terdahulu yang eropasentris ada 3 penyebab terjadinya imperialisme: kepentingan perdagangan kekuasaan kolonial, persaingan internasional, dan usaha mengelak dari masalah politik yang terjadi di dalam negeri negara imperialis itu sendiri. Selain itu, kesinambungan penataan westernisasi pada dunia nonbarat menjadi sebab terjadinya ekspansi imperialis yang disebabkan oleh dorongan dari kawasan pinggiran itu sendiri. Ada beberapa ahli yang mendukung Teori Imperialisme yang berorientasi Kawasan Pinggiran. Menurut H.W. Wesseling, imperialisme Belanda bukanlah aksi melainkan reaksi. Keputusan melakukan ekspansi selalu merupakan reaksi dari suatu kejadian. Maarten Kuitenbrouwer menjelaskan bahwa ketika Belanda disinggung dalam literatur mengenai imperialisme, selalu berhubungan dengan posisinya sebagai negara kolonial imperialis. Politik Belanda di satu pihak enggan menghadapi perubahan, di lain pihak menunjukkan kemampuan bereaksi yang kuat. Maarten Kuitenbrouwer menyatakan bahwa politik Belanda yang membuktikan kemampuan bereaksi yang kuat terlihat ketika Belanda melawan negara-negara Barat lainnya maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Indonesia. Lebih lanjut Maarten Kuitenbrouwer menyatakan bahwa perbedaan politik imperialisme Belanda dengan kekuatan Eropa lainnya dipertegas dengan adanya Politik Etis. Teori Imperialisme Yang Berorientasi Pada Prinsip Penerapan Tahapan Kekuasaan dari Informal ke Formal. Menurut John Gallagher dan Ronald Robinson bahwa politik kolonial Inggris yang diterapkan pada abad ke-19 di India dan Afrika mengalami peralihan dari kekuasaan informal ke formal. Sedapat mungkin kebijakan Inggris mengikuti prinsip perluasan kekuasaan informal, namun jika diperlukan mereka menerapkan kekuasaannya secara formal (Locher-Scholten, 2008: 20-21).

Lebih lanjut John Gallagher dan Ronald Robinson menyatakan bahwa pada umumnya perubahan kekuasaan informal menjadi formal disebabkan oleh persaingan internasional. Akan tetapi perubahan tersebut diakibatkan oleh perkembangan yang terjadi di daerah koloni itu sendiri. Hal yang terakhir ini sesuai dengan apa yang disebut sebagai Teori Imperialisme yang Berorientasi Kawasan Pinggiran. Contoh Penerapan Teori Imperialisme yang Berorientasi Kawasan Pinggiran, apabila terjadi pemberontakan kelompok pribumi atau penolakan penguasa pribumi untuk berkolaborasi dengan kekuasaan kolonial, maka dijalankan kekuasaan secara langsung untuk mengamankan daerah tersebut maupun perdagangannya. Teori ini sangat tepat untuk menjelaskan perkembangan di Indonesia. Sebagai contoh situasi pada peralihan abad ke-19 menuju abad ke-20, ketika terjadi ekspedisi militer di wilayah jajahan Belanda. Seperti Perang Aceh (1873-1901), Pendudukan Lombok (1894), Perang Puputan (1906). Aksi-aksi militer tersebut terjadi di daerah di mana kekuasaan kolonial Belanda sudah sejak lama diberlakukan secara informal (Ardhana, 2005: 5-6).

Ada 3 perbedaan antara ekspansi Belanda dengan Ekspansi Negara-Negara Eropa lainnya (Locher-Scholten, 2008: 24-25):

1. Ekspansi Belanda mencapai puncaknya sekitar tahun 1900, ketika hampir seluruh kegiatan ekspansi negara-negara Eropa lainnya sudah berakhir.
2. Belanda membentangkan kekuasaannya dalam batas yang sudah dikenal dan pasti.
3. Ekspansi Belanda dimotivasi oleh pemikiran etis.

Joep a Campo menyatakan bahwa teori-teori tradisional tentang imperialisme ekonomi tidak mampu menjelaskan ekspansi Belanda di Hindia Timur karena revolusi industri Belanda yang terlambat yaitu sesudah tahun 1890-an. Tak satupun syarat-syarat yang diajukan dalam teori imperialisme ekonomi (kebutuhan akan sebuah pasar baru bagi produk-produk industri, tuntutan akan bahan mentah baru, monopoli perdagangan, akumulasi modal untuk mencari investasi baru) hadir dalam tingkat yang memadai untuk menjelaskan sebuah kebijakan ekspansi kolonial Belanda. Bahkan, kepemilikan kolonial pada mulanya melambatkan perkembangan perekonomian, sedangkan selanjutnya, ekspansi ekonomi seberang lautan Belanda merangsang industri Belanda. Campo menempatkan Imperialisme Belanda dalam sebuah kerangka internasional dan lebih luas. Dalam pandangan Campo, bukan hubungan antara

negara induk dan jajahan yang menjelaskan ekspansi Belanda setelah tahun 1895, melainkan antara pasar dunia dan Hindia Timur Belanda, dengan Negeri Belanda bertindak sebagai saluran atau perantara. Dengan kata lain, imperialisme Belanda di Hindia Timur lebih merupakan fungsi perkembangan pasar dunia ketimbang perkembangan ekonomi Belanda. Campo memandang imperialisme Belanda dalam dua hal sebagai sebuah reaksi: Belanda bereaksi secara perekonomian terhadap perkembangan pasar dunia, dan secara politis terhadap perlombaan imperialis meluaskan jajahan. Proposisi ini mempertemukan ketimpangan-ketimpangan gamblang antara teori ekonomi imperialis dan perkembangan historis imperialisme Belanda. Kajian Campo yang Belanda sentris secara implisit mengesahkan ekspansi Belanda sebagai produk imperialisme modern (Locher-Scholten, 2008: 25-26).

Maarten Kuitenbrouwer dalam penelitiannya terhadap kebijakan-kebijakan kolonial dan dalam negeri Kerajaan Belanda antara tahun 1870-1901 menyimpulkan bahwa konsepsi Betts dalam imperialisme dapat diterapkan yaitu tentang antisipasi dan kontrak, dan dia menambahkan bahwa imperialisme Belanda sebagai negara kecil mempunyai karakteristik tersendiri yang dimotivasi politik etis. Namun demikian, dengan perkecualian era 1880-an, faktor-faktor yang sama relevan dengan yang terdapat di tempat-tempat lain: kompetisi diplomasi internasional, kepentingan ekonomi (terutama keuntungan yang diharapkan), dan berbagai aktivitas di periferi. Pendapat Kuitenbrouwer tersebut ditentang oleh Hank Wesseling, sejarawan Leiden. Menurut Wesseling, konsepsi antisipasi tidak dapat diterapkan di Hindia Timur. Dalam pandangan Wesseling, “pendudukan” berarti lebih dari sekedar menduduki wilayah untuk berada selangkah lebih maju daripada negara-negara lain. Menurutnya, imperialisme sebagai tindakan berjaga-jaga harus ditafsirkan sebagai “klaim acak atas suatu wilayah karena kekhawatiran kabur tertinggal sendiri, mendapati dunia sudah terbagi-bagi. Wesseling menganggap bahwa hal itu adalah perilaku tipikal pendatang belakangan atau pemain baru seperti Jerman, Italia, dan Jepang, tetapi tidak dapat diterapkan untuk Belanda, yang sudah mempunyai lebih yang dirasanya untuk mampu mengatur atau beroperasi dalam batas-batas yang benar-benar diakui secara internasional. Betts sendiri menyebut pendatang-pendatang baru itu tetapi juga memberi contoh-contoh ekspansi yang sangat mirip dengan aksi-aksi Belanda di Nusantara. Wesseling juga tidak menganggap konsepsi kontrak sebagai karakteristik sejati imperialisme.

Menurut Wesseling, ciri utama imperialisme adalah memperoleh kekuasaan atas daerah-daerah di mana negara-negara yang berkepentingan tidak punya

perbatasan bersama. Belanda, beserta “kontraknya”, ekspansinya dari sebuah pusat kolonial, tidak tipikal dalam hal ini. Dalam pandangannya, imperialisme lebih dari sekedar melebarkan perbatasan-perbatasan kekuasaan kolonial. Yang menjadi soal bukan apakah suatu negara benar-benar menjalankan kekuasaan atas wilayah Afrika-Asia, melainkan apakah klaim-klaimnya diakui oleh negara-negara besar. Dari sudut pandang internasional, tidak ada hal baru yang terjadi di Nusantara, batas Hindia Timur sudah diakui. Belanda tidak melakukan serangan ke daerah-daerah baru. Ia tidak menunjukkan sebuah mentalitas baru imperialis. Selain itu, ia juga tidak punya motif otonom apapun untuk mengubah kebijakannya. Ia lebih banyak bereaksi ketimbang beraksi. Ekspansi Belanda mengikuti, sebagian merupakan reaksi terhadap perilaku negara-negara lain dan sebagian karena alasan-alasannya sendiri melakukan ekspansi di kawasan-kawasan kosong peta Indonesia (Locher-Scholten, 2008: 26-28).

Thomas Libland mendefinisikan kebijakan Belanda di Hindia Timur sebagai contoh imperialisme modern. Ia mendefinisikan imperialisme sebagai intensifikasi kontrol aktual dalam sebuah kerangka dominasi politik formal. Libland menjembatani jurang antara Wesseling (kontinuitas) dan Kuitenbrouwer (pergeseran menuju ekspansi sistematis kontrol). Libland memandang tahun 1870-1890 sebagai periode peralihan surutnya secara berangsur-angsur kebijakan abstain tradisional dari campur tangan di luar Jawa tanpa perubahan radikal apa pun dalam kebijakan. Analisisnya atas perubahan mikroekonomi dan makroekonomi di Nusantara sekitar tahun 1900 membawanya pada kesimpulan bahwa imperialisme Belanda adalah nama yang tepat untuk apa yang terjadi. Ekspansi Belanda juga disebabkan faktor-faktor dalam Negeri Belanda seperti kepentingan-kepentingan administratif, nasionalisme, dan investasi swasta. Campo dalam bukunya tentang Perusahaan Pengiriman Paket Kapal Uap Kerajaan Belanda (KPM) dan hubungannya dengan negara kolonial antara tahun 1888-1914 menyatakan bahwa imperialisme dan pembentukan negara kolonial sama-sama menyoal “pembentukan dan penguatan kedaulatan atas, dan pemerintahan secara aktual, sebuah wilayah yang didefinisikan dengan jelas oleh sebuah kekuatan asing, di mana formasi negara kolonial berkembang lebih jauh dalam upaya mencapai kemerdekaan lebih banyak dari negara induk dan menjembatani jurang antara bagian-bagian penduduk yang berbeda.

Dalam konteks tersebut Campo mengidentifikasi dua proses yang bersamaan dan analog, yang cenderung saling menguatkan, pertumbuhan negara kolonial dan perkembangan komersial pengapalan paket yang keduanya disertai oleh

hasrat untuk mencapai suatu monopoli nasional di kawasan yang digarap. Karya campo juga menegaskan status transisional dua dasawarsa dari tahun 1870 hingga 1890, itulah periode terjadinya evolusi bertahap sebuah kesadaran nasional, dengan latar belakang sebuah krisis ekonomi internasional, pertumbuhan industrialisasi di mana-mana, dan Perang Aceh di Hindia Timur. Ini berpuncak pada peluncuran sebuah Perusahaan Perkapalan Nasional pada 1888, dikelola oleh negara induk, tetapi beroperasi di, dan menjalankan pengaruhnya dari periferi. Sejarah KPM menekankan hubungan timbal balik antara prakarsa-prakarsa yang berasal dari Eropa (pusat) dan kepentingan orang Eropa di daerah jajahan (periferi). Campo menegaskan bahwa tahun 1890-an merupakan suatu kesenjangan dalam proses perluasan kekuasaan Belanda di Nusantara. Di mana Belanda mengencangkan cengkeramannya, KPM sering melakukan pekerjaan administratif persiapan maupun menyediakan dukungan kelautan sebagai sebuah “otoritas administratif maritim internal”, kapal-kapal mendatangi pelabuhan-pelabuhan baru sebagai simbol otoritas Belanda. KPM merupakan faktor maupun aktor dalam proses ekspansi, memberikan kekuatan legal dan mendatangkan keuntungan pada saat yang bersamaan. Analisis Campo terhadap ekspansi Belanda memperlihatkan keragaman faktor yang berperan, sehingga dia lebih jauh memberi perbedaan penekanan yang ada pada karya awalnya tentang faktor-faktor ekonomi pada tataran internasional (Locher-Scholten, 2008: 29-30). Paparan tentang kontroversi-kontroversi dari para akademis tentang teori imperialisme memungkinkan dilakukannya penjelasan kualitas umum dan unik ekspansi Belanda di Indonesia.

1.3 Pengertian Masyarakat Multikultural

Indonesia merupakan negara yang didiami penduduk yang terdiri atas suku, ras, budaya, agama, adat istiadat yang beraneka ragam. Oleh karena itu Indonesia disebut juga negara multikultural. Demikian halnya dengan Kota Medan disebut juga Kota Multikultural karena masyarakat Kota Medan adalah masyarakat multikultural. Masyarakat Kota Medan terdiri atas beranekaragam suku, ras, agama, kepercayaan, budaya, bahasa dan adat-istiadat.

Etnik yang mendiami Kota Medan sangat beragam yaitu Suku Melayu, Batak (Karo, Simalungun, Toba, Mandailing-Angkola, Pakpak), Jawa, Minang, India-Tamil, Tionghoa, Aceh, dan lain sebagainya. Selain suku, agama yang dianut penduduk Kota Medan juga beragam mulai dari agama resmi seperti: Islam,

Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Khonghucu hingga aliran kepercayaan seperti Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Pemena, Ahmadiyah, Saksi Jahowa, Sikh dan lain sebagainya. Keberagaman agama yang dianut masyarakat Kota Medan juga terlihat dari jumlah masjid, gereja dan Vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh Kota Medan. Bahasa yang digunakan penduduk Kota Medan juga sangat beragam seperti Indonesia, Batak, Jawa, Hokkien, dan Minangkabau. Keberagaman suku, agama, kepercayaan, budaya, dan bahasa masyarakat Kota Medan tersebutlah yang menyebabkan masyarakat Kota Medan disebut sebagai masyarakat multikultural.

Multikultural adalah suatu keyakinan dalam bentuk ideologi untuk bisa menerima perbedaan agama, politik, etnis, dan perbedaan lainnya baik dilakukan secara individual maupun dilakukan dalam kelompok sosial tertentu. Multikulturalisme termasuk di dalamnya adalah apresiasi, pemahaman, serta penilaian terhadap budaya seseorang dan penghormatan serta rasa keingintahuan mengenai budaya etnis dari orang lain. Multikulturalisme adalah sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya (Lawrence A. Blum, 2007). Multikultural adalah suatu paradigma mengenai hidup bermasyarakat yang didasari atas persatuan dan mengesampingkan perbedaan, baik perbedaan dalam ranah agama, pilihan politik, budaya, etnis, dan perbedaan lainnya. Multikulturalisme merupakan sebuah anggapan atau pandangan dunia yang selanjutnya dapat diartikan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan pada kenyataan keagamaan, pluralitas, serta multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai pandangan atau anggapan dunia yang selanjutnya direalisasikan ke dalam bentuk kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007)

Multikultural adalah pandangan mengesampingkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang mementingkan tujuan hidup bersama dalam menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan membentuk persatuan dan kesatuan. Pandangan multikultural ini mendeskripsikan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus diterima oleh semua golongan demi menghindari dampak dinamika kelompok sosial dalam masyarakat.

Masyarakat multikultural adalah kesatuan masyarakat yang bersatunya didasari dengan bentuk perbedaan untuk hidup bersama. Kehidupan bersama yang direncanakan itu diharapkan dapat menangani dampak gejala sosial, terutama masalah konflik yang sering terjadi. Multikulturalisme meliputi cara pandang, gagasan, penyikapan dan tindakan, kebijakan, yang majemuk dari segi etnis, oleh suatu masyarakat suatu negara, budaya, agama dan lain sebagainya, tetapi mempunyai cita-cita dalam mengembangkan semangat kebangsaan yang sama serta memiliki kebanggaan guna mempertahankan kemajemukan tersebut (Rifai Harahap, 2007). Menurut Parekh masyarakat multikultural adalah kesepakatan dalam masyarakat yang dilakukan untuk mengantisipasi konflik sosial melalui kerja sama. Kesepakatan tersebut yang dilakukan adanya kesempatan mengenai beragam perbedaan seperti kebiasaan serta adat.

Menurut J.S. Furnival, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua maupun lebih kelompok atau komunitas yang secara kultural sekaligus ekonomi terfragmentasi serta mempunyai struktur kelembagaan yang berbededa dengan satu sama lain. Multikulturalisme merupakan suatu istilah yang dipakai dalam menerangkan pandangan atau anggapan seseorang mengenai ragam kehidupan di dunia, maupun kebijakan kebudayaan yang menekankan mengenai penerimaan kepada adanya keragaman, serta beranekaragam budaya atau multikultural yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, serta politik yang digunakan oleh mereka.

Pada masyarakat multikultural, individu maupun kelompok dari berbagai budaya dan suku bangsa hidup dalam suatu kesatuan sosial tanpa kehilangan jati diri budaya dari suku bangsanya meskipun tetap ada jarak. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang kelompok suku bangsa dan budayanya berada dalam kesetaraan derajat dan toleransi sejati. Masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau *Bhinneka Tunggal Ika* yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia.

Adapun karakteristik dari suatu masyarakat multikultural sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat multikultural, tiap-tiap budaya bersifat otonom.
2. Masyarakat multikultural dalam perkembangannya akan bersinggungan dengan konsep hidup bersama untuk mencari kehidupan bersama.

3. Adanya semangat untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dalam masyarakat.
4. Dikembangkannya toleransi, saling memahami, dan menghargai perbedaan yang ada.
5. Terkait dengan upaya pencapaian civility (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya keadaban yang demokratis.





THE
Character Building
UNIVERSITY



Bab 2

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Di Indonesia (1602-1789)

Sebelum Belanda menegakkan kekuasaannya di Indonesia, Para Pedagang Belanda telah melakukan perdagangan di Nusantara (baca Indonesia). Dalam melakukan perdagangan tersebut, persaingan antar pedagang Belanda tidak mungkin dapat dihindarkan. Oleh karena itu, mereka membentuk perusahaan dagang yang bertujuan untuk menghindari persainagn yang tidak sehat di kalangan para pedagang Belanda. Perusahaan dagang yang dibentuk itu yang dikenal dengan nama VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Pada bab ini akan dibahas masa VOC di Indonesia. Masa VOC di Indonesia tentunya dilatar belakangi oleh pembentukan kongsi dagang Belanda yang dinamakan VOC di Negeri Belanda.

2.1 Pembentukan Perusahaan Dagang Antar Benua di Belanda

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) merupakan suatu perusahaan dagang antarbenua (long distance trade). Mengapa perusahaan dagang antarbenua dapat muncul di Negeri Belanda pada abad ke-17, padahal wilayah

negara tersebut merupakan wilayah yang berawa-rawa, yang sampai abad ke-16 merupakan wilayah terpencil yang tidak menghasilkan apa-apa, kecuali keju. VOC muncul pada abad ke-17 sebagai suatu perusahaan dagang antarbenua dan menjadi tulang punggung dari pertumbuhan kapitalisme di negeri itu dalam abad ke-17 dan ke-18.

Perkembangan Sejarah Eropa merupakan kunci dari jawaban atas pertanyaan mengapa VOC dapat muncul pada abad ke-17 di Negeri Belanda. Ada dua perkembangan yang menyatu dalam Sejarah Eropa, sehingga memungkinkan munculnya VOC dalam abad ke-17. Pertama, di Belanda bagian selatan (sekarang menjadi Belgia) dengan pelabuhan Antwerpen sejak awal abad ke-16 muncul sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Eropa Utara dengan Lisabon yang ketika itu telah menjangkau perdagangan di Asia. Namun, peperangan yang melanda wilayah itu menyebabkan sebagian besar dari para pedagangnya mengungsi ke Belanda bagian utara. Sementara itu sejak abad ke-15 Belanda bagian utara telah muncul sebagai pusat pelayaran bagi Eropa Utara. Inovasi teknologi maritim memungkinkan para pelaut Belanda bagian utara menjadi penghubung antara daerah-daerah industri dan para konsumen di Eropa. Para pelaut Belanda secara berangsur-angsur menguasai pelayaran niaga melalui Sungai Rijn, Inggris sampai ke wilayah perdagangan Hanza di Jerman. Para pelaut Belanda yang bermarkas di berbagai kota pelabuhan seperti Hoorn, Enkhuizen dan lain-lain telah memonopoli pengangkutan gandum (De Jong, 1998: 30-33).

Peningkatan secara besar-besaran jumlah para pedagang dari Antwerpen yang mengungsi ke Belanda bagian utara sejak akhir abad ke-16 itu memungkinkan bertemunya kemampuan dagang dan modal yang dimiliki para pendatang itu, dengan teknologi pelayaran niaga yang dimiliki beberapa kota di Belanda bagian utara. Konvergensi dari modal dagang dan teknologi pelayaran tersebut memunculkan pusat-pusat perdagangan di Belanda bagian utara yang menjadi latar belakang munculnya VOC. Munculnya Amsterdam adalah suatu ilustrasi yang menarik. Amsterdam merupakan suatu desa yang terletak di suatu bendungan (dam) di Sungai Amstel itu, dalam abad ke-17 muncul sebagai salah satu kota niaga yang terbesar di Eropa.

Pelayaran niaga ke Asia merupakan konsekuensi dari faktor peperangan, yang mana sejak akhir abad ke-16 Belanda berperang dengan Spanyol dan Portugis (sejak 1590 Portugis telah disatukan dengan Spanyol). Spanyol menerapkan strategi yang merugikan Belanda. Suatu strategi yang digunakan Spanyol adalah menghalang-halangi para pedagang Belanda memasuki pelabuhan-

pelabuhannya untuk mengangkut produk-produk dari Asia, terutama rempah-rempah yang mendatangkan demikian banyak keuntungan itu. Kadaan itulah yang memaksa para pedagang Belanda untuk mencari jalan sendiri ke Asia. Pelayaran-pelayaran percobaan dimulai tahun 1595 dan ternyata membawa hasil yang tidak terduga. Oleh karena itu, para pedagang Belanda berlomba-lomba mengirim kapal-kapal dagangnya ke Asia, khususnya ke Indonesia untuk memperoleh komoditi yang demikian menguntungkan itu. Persaingan berakibat jatuhnya harga rempah-rempah, sehingga langkah berikut yang logis adalah mennghilangkan persaingan itu.

2.2 Pembentukan VOC di Negeri Belanda

Persaingan antarpara pedagang Belanda yang melakukan pelayaran niaga ke Indonesia menyebabkan jatuhnya harga rempah-rempah di Eropa. Untuk mengatasi persaingan yang ketat di antara berbagai perusahaan itu, pada 20 Maret 1602 beberapa badan-badan dagang itu memutuskan untuk menyatukan semua dana dan tenaga dalam satu organisasi dagang yang diberi nama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Gabungan Perusahaan-Perusahaan Dagang Hindia Timur. Kesepakatan itu dikuatkan oleh Staten Generaal atau dewan negara melalui suatu octrooy (hak-hak istimewa) yang berlaku selama 21 tahun. Hal ini membuktikan bahwa Republik Belanda memberi dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada VOC. Dalam kenyataannya “octrooy” tahun 1602 itu diperpanjang terus setiap 21 tahun hingga tahun 1795. Berdasarkan octrooy tersebut VOC memegang monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan (terletak di Afrika Selatan) dan Selat Magelhaens (sebuah selat di ujung selatan Benua Amerika). Hal ini berarti bahwa setiap pedagang atau organisasi dagang di Belanda yang ingin berdagang di wilayah itu hanya dapat melakukannya dengan cara berpartisipasi dalam VOC melalui pembelian sahamnya. VOC memusatkan perdagangannya pada rempah-rempah (cengkeh, pala, fuli, dan lada), tekstil dari India, sutra dan porselin dari Cina.

Berdasarkan octrooynya VOC tidak saja memiliki wewenang untuk berdagang tetapi juga untuk mengambil tindakan-tindakan politik. VOC mendapat wewenang untuk mengadakan hubungan dengan para penguasa di wilayah

antara Tanjung Harapan dan Selat Magelhaens, melancarkan perang, mendirikan benteng-benteng, memelihara tentaranya sendiri, dan mengangkat para penguasa di wilayah-wilayah itu, semuanya atas nama “Staten Generaal”. Kedua ciri utama tersebut (perdagangan monopoli dan kekuasaan politik) menyebabkan praktek-praktek dagang dari VOC dapat dikategorikan sebagai “armed trade”.

Dukungan pemerintah Belanda pada VOC dan kenyataan bahwa VOC adalah sebuah organisasi yang bersenjata dapat dipahami apabila peristiwa pembentukan VOC itu ditempatkan dalam konteks politik Negeri Belanda ketika itu. Sejak akhir abad ke-16 Belanda sedang berperang melawan penjajahan Spanyol dan Portugis (yang sejak 1580 telah menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol). Perjuangan yang dikenal dengan nama “Perang 80 Tahun” itu berakhir tahun 1648 dengan Perjanjian Munster. Pembentukan VOC yang berlangsung dalam suasana perang itu menyebabkan pihak Belanda melihat VOC sebagai suatu kesempatan untuk melawan Portugis di Asia. Inilah sebabnya dapat dimengerti pula mengapa strategi dagang pertama dari VOC adalah merebut benteng-benteng Portugis di Asia, bukan saja sebagai batu loncatan untuk menguasai jaringan perdagangannya tetapi juga untuk tindakan politik.

VOC dibentuk di Negeri Belanda sebagai sebuah federasi badan-badan dagang yang berpusat di enam kota yaitu Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen, Delft, dan Middelburg, yang masing-masing mempertahankan otonominya. Organisasi dagang dan administrasi yang lengkap dan permanen hanya terdapat pada masing-masing kota dagang itu yang lazimnya disebut “kamar”. Kantor pusat kamar-kamar dagang tersebut ketika itu sering disebut sebagai “Oost-Indie Huis” (Wisma Hindia Timur). Dalam menetapkan keputusan-keputusan bagi kepentingan bersama, ke-6 kamar dagang tersebut mengangkat para pejabatnya yang kemudian dikenal sebagai “Heeren XVII” atau “17 Petinggi”. Karena modalnya paling besar, maka “kamar” Amsterdam diwakili oleh 8 orang, sedangkan Middelburg yang memelopori perdagangan ke Asia mendapat kehormatan untuk diwakili oleh 4 orang. Keempat “kamar” lainnya masing-masing diwakili oleh 1 orang, dan 1 orang lagi dipilih secara bergilir dari keenam “kamar” tersebut. Berbeda dengan keenam “kamar” tersebut, VOC tidak memiliki kantor pusat. Tetapi di Den Haag terdapat sebuah kantor yang dinamakan “Haagsche Besonges” yang melaksanakan tugas-tugas koordinasi sesuai keputusan-keputusan yang diambil Heeren XVII.

Dalam bagian kedua dari abad ke-17 pemimpin kantor itu adalah seorang pengacara, Pieter van Dam yang hingga kini dikenal karena pernah diperintahkan untuk menyusun sebuah naskah mengenai manajemen VOC yang sangat dirahasiakan oleh Heeren XVII sehingga baru dapat diterbitkan untuk umum pada awal abad ke-20. Untuk membicarakan kepentingan bersama itu dua kali setiap tahun Heeren XVII bertemu selama beberapa minggu. Tempat pertemuan pun tidak tetap, yaitu selama 6 tahun berturut-turut di Amsterdam, kemudian 6 tahun berturut-turut lagi di Middelburg, dan seterusnya. Namun, di Amsterdam terdapat seorang pengacara yang mengawasi dan mencatat semua pembicaraan tersebut. Pieter van Dam mendapat kepercayaan untuk menjalankan fungsi tersebut di awal abad ke-17. Dalam pertemuan-pertemuan itu Heeren XVII memutuskan jumlah kapal dan awak kapal, perbekalannya, serta muatannya yang akan dikirim ke Asia. Kapal-kapal yang berangkat ke Asia biasanya bermuatan emas dan perak untuk dijadikan modal dagang di Asia. Muatan dari kapal-kapal yang tiba dari Asia (rempah-rempah, tekstil, porselen, teh dan lain-lain) segera dilelang di Bursa Amsterdam, sehingga dapat disalurkan ke berbagai penjuru di Eropa.

Keunggulan VOC terletak pada organisasinya, teknologi perhubungan (perkapalan) dan teknologi militernya. Khususnya mengenai perkapalan, sejak tahun 1595 galangan kapal di Hoorn berhasil memproduksi jenis kapal baru yang dikenal dengan nama “*fluitschip*”. Jenis kapal ini adalah hasil inovasi dari kapal Portugis (jenis karavel) yang bertiang tiga. Namun, *fluitschip* jauh lebih lebar dengan lambung yang bulat, sehingga geladaknya menyempit. Dengan demikian, ruang palkanya jauh lebih besar dari kapal-kapal layar lainnya. Sebab itu, *fluitschip* mempunyai volume yang lebih besar dari rata-rata kapal Portugis, sehingga muatannya lebih banyak. Layarnya adalah layar segi empat kecuali pada bagian buritan menggunakan layar segi tiga (lateen sail). Inovasi dalam teknik layar itu menyebabkan *fluitschip* dapat berlayar lebih cepat dengan awak yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kapal-kapal layar lainnya. Meriam-meriam kapalnya pun lebih sedikit jumlahnya, tetapi lebih efektif karena letaknya agak rendah sehingga dapat menembaki lambung kapal-kapal lain yang umumnya lebih tinggi. Jenis kapal *fluitschip* sesungguhnya dibangun untuk keperluan perdagangan di Eropa saja. Sebab itu, kemudian VOC membangun suatu jenis kapal lain yang jauh lebih besar yang dikenal sebagai “Oostindievaarders” atau *Spiegelschip*. Kapal-kapal jenis ini juga dinamakan “*Reoutschip*” karena dapat berlayar pulang pergi sekali jalan dari Amsterdam-Batavia. Jenis kapal ini umumnya memang hanya digunakan di laut bebas yang ganas seperti antara Eropa dan Asia, atau di perairan Cina Selatan dan Jepang.

Salah satu contoh dari jenis kapal layar ini adalah “de Batavia” yang dalam pelayaran perdananya tahun 1628 kandas di Australia Barat, tetapi kemudian dapat diangkat oleh para arkeolog Australia. Antara tahun-tahun 1985 dan 1995 di Negeri Belanda (Lelystad) telah dibangun sebuah “reconstuctie” dari kapal layar itu yang dalam ukuran, bobot, bahan dan teknik perkapalan, sama benar dengan kapal yang dibangun dalam abad ke-17 itu (bukan replica).

Armada VOC yang berlayar pulang-pergi Amsterdam-Batavia membentuk suatu formasi yang terdiri atas kurang lebih 7 buah kapal layar. Pemberangkatan armada-armada itu dari Amsterdam dilakukan tiga kali setahun, pertama pada bulan September (disebut sebagai armada “Kermis”), kedua pada bulan Desember (armada Natal), dan ketiga pada bulan April (armada Paskah). Rute dari Amsterdam ke Batavia adalah Tanjung Harapan – Selat Sunda – Batavia. Rute Batavia ke Amsterdam melewati Laut Arab – Tanjung Harapan – Amsterdam.

2.3 VOC di Asia

Jauh sebelum VOC, bahkan sebelum Portugis berdagang di Asia, dunia Asia telah membangun dua jalur perdagangan atau dua “world economy”. Pertama-tama adalah jalur sutra yang merupakan jaringan perdagangan darat yang berawal di Cina, melintasi daerah-daerah di Asia Tengah (dengan cabang-cabang ke wilayah pesisir seperti India) dan bermuara di Laut Tengah, dari mana hubungan ke Eropa dilanjutkan dengan kapal-kapal. World Economy kedua melintasi laut yang juga menghubungkan Cina, melalui Asia Tenggara, India dan akhirnya bermuara di Asia Timur. Motor dari “world economy” yang bertumpu pada jalur laut tersebut adalah hembusan angin yang bergantian arah dengan sangat teratur dan tepat waktu yang dikenal oleh para pelaut Asia sebagai “angin musim”. Antara bulan April hingga bulan Agustus arah angin musim adalah dari barat ke timur, dan dari bulan Desember hingga bulan Maret arahnya berubah dari timur ke barat (Reid, 1993, II: 64). Tentu saja ada variasi-variasinya, terutama karena perputaran bumi, sehingga di khattulistiwa kedua arah angin musim tersebut menjadi berlawanan arah.

Sejak persebaran agama Islam di Asia ditengarai telah ada hubungan niaga dari Timur Tengah ke Cina. Sebelum abad ke-10 pelayaran niaga dari Timur Tengah ke Cina, melalui India dan Asia Tenggara, merupakan suatu trayek yang tidak terputus-putus. Sejak abad ke-10 berturut-turut muncul kota-kota dagang

tertentu dalam jalur itu yang menjadi sangat penting sebagai “emporium”. Emporium adalah kota dagang yang dilengkapi dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk berdagang, seperti tempat berlabuh yang baik, keamanan yang terjamin, fasilitas pergudangan, dan fasilitas kredit yang murah. Emporium-emporium yang penting dalam jalur laut itu adalah Aden di Jajirah Arab, Bandar Abas di Teluk Parsi, Kalikut/Gujarat di India, Malaka di Semenanjung, dan Kamton di Cina (Chaudhuri 1898: 40-41).

Sejak abad ke-10 pelayaran niaga di jalur laut Asia itu dapat dilakukan dari satu emporium ke emporium lainnya, misalnya dari Aden atau Bandar Abas ke Calicut/Gujarat di mana komoditi dagang dapat disimpan di gudang-gudang dan kredit dapat diperoleh. Komoditi dari Timur Tengah itu kemudian disalurkan oleh para pedagang India, ditambah dengan komoditi dari India, ke Malaka yang juga menyediakan fasilitas gudang dan sebagainya, sedangkan para pedagang Cina hanya memerlukan datang ke Malaka untuk memperoleh berbagai komoditi dari Barat dan juga Nusantara. Masing-masing emporium tersebut juga merupakan suatu bandar transito bagi wilayah sekitarnya. Malaka yang muncul sejak awal abad ke-15, menjadi transito dari bandar-bandar lain di Asia Tenggara, terutama untuk Nusantara. Peranan para pedagang Jawa, Melayu dan Maluku dalam masa itu juga sangat penting sebagai “feeder” bagi Malaka. Keadaan seperti itu sudah tentu terdapat pula di wilayah-wilayah lain di Asia. Dengan demikian, di Asia muncul suatu jaringan perdagangan yang memusat pada emporium-emporium tersebut, dan melalui emporium itu menyatukan seluruh Asia dari timur ke barat. Kota-kota dagang yang besar dan kecil itu memiliki suatu ciri yang sama, yaitu sifat kosmopolitannya. Berbagai bangsa dan agama berbaaur dalam kegiatan perdagangan di kota-kota dagang itu. Kota-kota dagang itu juga memiliki ciri lainnya yaitu segregasi dalam hal tempat pemukiman yang terutama mengikuti kriteria agama. Para pedagang Cina dan keluarga-keluarganya serta pengikutnya berdiam di wilayah yang terpisah dari keluarga-keluarga pedagang yang beragama Islam (de Jong, 1998: 14-24; Reid, 1993, II: 62-131).

Para penguasa kota pelabuhan (yang diberi julukan sultan, dan istilah lain-lain istilah) berdiam dalam sebuah kota yang sering dikelilingi tembok. Selain menjamin keamanan kota pelabuhannya, para penguasa kota dan keluarganya juga ikut berdagang. Para penguasa itu menikmati pajak atau upeti yang dibayar oleh para pedagang asing sebagai syarat untuk berdagang di kota pelabuhan yang bersangkutan. Tugas mengumpulkan upeti dari pedagang asing itu diserahkan kepada satu atau lebih sahbandar yang kebanyakan orang asing pula,

yang diharuskan menyerahkan suatu bagian tertentu kepada penguasa kota pelabuhan itu. Selain itu, para penguasa kota pelabuhan itu juga menikmati “pajak ekspor” terutama dari komoditi yang diproduksi daerah sekitarnya (lada, cengkeh dan lain-lain). Para penguasa kota pelabuhan juga sering memiliki modal berupa uang dan kapal-kapal dagang yang dikirim ke kota-kota pelabuhan lain, misalnya Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dikenal sebagai seorang pemilik kapal-kapal dagang yang berlayar hingga Cina dan Parsi (Reid, 1993, II: 62-131).

Perubahan dinamika perdagangan dari satu trayek ke sistem perdagangan emporium tersebut sudah tentu menimbulkan fluktuasi dalam dunia perdagangan Asia tersebut. Menurut para ahli sejarah, sejak tahun 1400 terdapat peningkatan volume dan frekuensi perdagangan di Asia Tenggara, yang mencapai puncaknya pada tahun 1630, dan setelah itu menurun lagi. Periode tersebut dinamakan Anthony Reid sebagai “age of commerce” atau “kurun niaga”. Karena gejala peningkatan perdagangan itu juga nampak di Eropa dalam periode yang sama, maka gerak naik di Asia Tenggara merupakan suatu gejala global yang oleh Anthony Reid disebut sebagai “the long sixteenth century” (abad ke-16 yang panjang). Menurut Anthony Reid, di Asia Tenggara “age of Commerce” tersebut terkait dengan perdagangan Cina dalam masa pemerintahan Dinasti Ming, terutama Kaisar Yongle (1402-1424) berjasa dalam membangkitkan kegiatan perdagangan di Asia Tenggara, pertama-tama melalui sejumlah ekspedisi ke “Nanyang” yang dipimpin Admiral Zheng He. Kegiatan itu meningkatkan produksi rempah-rempah untuk diekspor ke Cina, dan mungkin juga merupakan sebab meluasnya penanaman lada ke Sumatera.

Kemudian kebebasan perdagangan di Cina itu memang terhambat, tetapi menurut Reid ada beberapa faktor yang menyebabkan dinamika perdagangan Cina itu berlangsung terus hingga abad ke-17. Pertama-tama perdagangan orang Cina itu berlangsung melalui “tributary trade” atau “perdagangan upeti”, di mana setiap tahun kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara mengirim kapal-kapal dagangnya dengan upeti kepada kaisar Cina, dan kaisar Cina juga memberi hadiah-hadiah yang diangkut oleh kapal-kapal dagang tersebut. Faktor kedua yang menyebabkan perdagangan Cina tidak berhenti sampai abad ke-17 adalah perdagangan swasta dari wilayah selatan Cina berlangsung terus sejak tahun 1421 ketika ibukota Cina dipindahkan ke Utara (Beijing) untuk menghambat ekspansi Mongol. Faktor ketiga adalah penggunaan Kepulauan Ryukyu oleh para pedagang Cina sebagai perantara dalam perdagangannya ke Asia Tenggara (Reid, 1993: 10-16). Kegiatan perdagangan Cina tersebut secara langsung

memunculkan beberapa kota pelabuhan di Asia Tenggara, seperti Ayuthia di Thailand, dan Malaka. Demikian juga munculnya Brunai dan Manila ditengarai juga terkait dengan jaringan perdagangan Cina tersebut (Reid, 1993, II: 204-208). Dalam masa itu Asia Tenggara telah mempunyai suatu jalur dagang tetap dengan India, terutama dengan kota-kota pelabuhan di pantai Koromandel. Wilayah itu memproduksi berbagai jenis tekstil yang sangat laris di pasaran Asia Tenggara. Ada dua kota dagang penting di wilayah itu yaitu Masulipatman dan Nagapatman yang mengekspor tekstil ke Pegu, Aceh dan Malaka (Reid, 1993: II : 26-31).

Perdagangan tekstil dengan pantai Koromandel sangat penting bagi VOC untuk kepentingan pasar di Negeri Belanda dan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tekstil dari Koromandel yang diperdagangkan oleh VOC di Maluku sangat beraneka ragam seperti chits, guiness, baftas, salempuri, karewas, dan mouris. Nama dari berbagai jenis tekstil tersebut sering mengacu pada tempat produksinya, seperti “patnasche chits” (Patna), “morispoursche van benggal (Benggala), “mousilipatnasche chits” (Musilipatnam). Demikian juga berbagai jenis baftas seperti “baftas benggal blau” (Benggala), “salempouri madras blau (Madras), “salempouri madras wit” (Madras). Bermacam-macam muri seperti “mouris madras wit (Madras), “mouris blau” jenis karwas seperti “ karewas benggal rood (Benggala), berbagai jenis guinees seperti “guinees fijn gebleekt” *guinees gemeen gebleekt* dan lainnya (Leirissa, 1996: 30).

Seperti halnya Portugis, VOC tidak membawa perubahan yang berarti dalam kegiatan perdagangan laut di Asia. Emporium Malaka lenyap setelah kota pelabuhan itu dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Sekalipun di pantai Malabar (India) Portugis masih memiliki pusat-pusat kendali perdagangan, namun hal itu tidak mengubah dinamika perdagangan Asia. Bahkan pola perdagangan berlangsung seperti biasa karena Portugis justru mengkontrakkan kegiatan perdagangan itu pada orang-orang Asia dan para pedagang swasta lainnya. VOC memang kemudian bercokol di Batavia dan sekitarnya, namun hanya berhasil menguasai daerah-daerah produksi rempah-rempah di Maluku dan pantai utara Pulau Jawa. Namun, perdagangan lada di Sumatera dan Banten dilakukan oleh kantor-kantor dagang yang dikawal tentara berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat antara VOC dan para penguasa setempat. Bahkan di India VOC harus puas dengan perdagangan bebas. Sebelum munculnya VOC dunia perdagangan di Asia begitu marak, namun sejak pertengahan abad ke 18 mengalami keruntuhan.

Menurut Chaudhuri dan Anthony Reid bahwa kapitalisme di Asia berbeda dengan kapitalisme di Eropa. Kapitalisme di Asia tidak di institusionalisasi. Kalau di barat kapitalisme muncul bersamaan dengan munculnya kepastian hukum mengenai hak milik perseorangan dalam masyarakat bourgeois, maka di Asia dalam kurun waktu abad ke-15 hingga abad ke-18 (bahkan setelah itu) hak milik perseorangan tidak dijamin oleh hukum atau negara. Perkembangan di Eropa itu terkait dengan perubahan sosial di sana, yang mana struktur feodalisme berangsur-angsur digantikan oleh struktur masyarakat yang dilandasi individualisme dan yang menghormati hak-hak individu. Dalam kurun waktu yang kira-kira sama di Asia tidak terjadi perubahan yang seperti itu. Sekalipun dalam masa itu masyarakat pedagang Asia sudah mengenal sistem kredit yang mendorong munculnya kapitalisme Asia, namun karena hak milik perorangan tidak dijamin oleh negara maupun oleh sistem hukum, maka akumulasi modal tidak dapat terjadi karena sewaktu-waktu dapat disita oleh raja atau negara. Keadaan itulah yang menyebabkan para pedagang Asia tidak sanggup menghadapi persaingan dengan ketat seperti VOC dan EIC. Kapitalisme Asia hancur sekitar abad ke-18 karena kelemahan-kelemahan intrinsiknya, namun harus diakui pula bahwa faktor yang memicu kehancuran itu adalah sistem perdagangan VOC dan EIC dengan dua cirinya yang dominan yaitu “armed trade” dan “bureaucratic trade”. VOC adalah suatu badan dagang yang menggunakan senjata (“armed trade”) dan yang membangun birokrasi (“bureaucratic trade”)

2.4 VOC di Batavia

Berbeda dengan di Negeri Belanda, di Asia organisasi VOC lebih terpusat. Sejak tahun 1608 kegiatan dagang di Asia telah dikoordinasikan oleh seorang Gubernur Jenderal yang berkantor di atas sebuah kapal yang umumnya berlabuh di Ambon. Kemudian sejak tahun 1619 pusat perdagangan ditempatkan di Jayakarta yang direbut oleh Jan Pieterszoon Coen (menjabat sebagai Gubernur Jenderal antara 1619-1623 dan 1627-1629). Di tempat itu, tepi timur Sungai Ciliwung, dibangunlah sebuah benteng yang dinamakan Kasteel Batavia. Di benteng itu berkantor pula sebuah dewan yang dinamakan Raad van Indie, yang antara lain terdiri atas seorang direktur jenderal untuk urusan perdagangan, seorang visitatur (urusan keuangan), seorang ketua Raad van Justitie, seorang pemimpin militer dan seorang pemimpin armada dagang. Gubernur Jenderal

dan Raad van Indie bersama-sama dikenal sebagai “Hooge Regering” (Pemerintah Agung).

Kasteel Batavia hanya menampung para pegawai VOC dan tentaranya. Pertumbuhan penduduk menyebabkan VOC terpaksa membangun pemukiman di sebelah selatan kasteel yang dikelilingi tembok dan benteng-benteng, terutama di sebelah barat (benteng Noordwijk dan benteng Rijkswijk), yang dimaksud untuk menghadapi serangan-serangan dari Banten. Penduduk dalam kota yang ditemboki itu sebagian besar terdiri dari apa yang dinamakan “vrijburgers” atau bekas pegawai VOC yang tidak kembali ke negerinya dan tidak lagi bekerja untuk VOC. Selain itu, terdapat pula suatu kategori penduduk yang dinamakan “mardijkers”, yaitu budak belian yang telah dimerdekakan. Dengan sendirinya budak belian juga berdiam di dalam kota yang bertembok itu bersama para pemiliknya. Orang-orang Cina pada mulanya juga berdiam dalam kota sampai pertengahan abad ke-18, namun berhubungan dengan pemberontakan orang Cina (1754), mereka terpaksa berdiam di luar benteng (daerah Glodok sekarang).

Sejak Jan Pieterszoon Coen menahklukkan Jayakarta, orang Belanda berpegang pada anggapan bahwa mereka telah menahklukkan sebuah kerajaan (“Koninkrijk Jacatra”) yang membentang ke selatan hingga ke laut (Hindia). Sebab itu, tidak mengherankan kalau pemekaran kota Batavia berlangsung ke arah selatan pula. Wilayah pemekaran itu dikenal sebagai “Ommelanden”, atau daerah di sekitar Kasteel (Benteng) Batavia. Berangsur-angsur sejak bagian ke-2 abad ke-17 (sejak tercapai perdamaian dengan Banten) di sini muncul pemukiman-pemukiman dari berbagai kelompok etnik, antara lain orang Banda, orang Bali, orang Bugis, orang Makassar, orang Ambon, orang Melayu, dan sudah tentu orang Cina. Dalam banyak hal kelompok-kelompok etnik yang berasal dari Nusantara itu berguna bagi VOC. Misalnya, orang-orang Banda yang dipindahkan ke Batavia oleh Coen pada tahun 1622 sebagian memang menjadi budak belian, tetapi sebagian lagi melakukan berbagai kegiatan dagang yang bermanfaat bagi penduduk kota. Salah seorang yang kemudian muncul sebagai orang penting di Batavia adalah Senen (orang-orang Banda sering menggunakan nama-nama hari sebagai nama orang) yang menjadi Kristen dan dibaptis dengan nama Corneles, sehingga nama lengkapnya menjadi Corneles van Senen. Ia berhasil membeli sebidang tanah yang pernah dikenal sebagai “Mr. Cornelis” (nama aslinya Jatinegara). Kelompok-kelompok lain menjadi pembantu tentara dalam pengamanan Batavia maupun dalam ekspedisi-ekspedisi militer yang dilakukan oleh VOC. Kapiten Yongkir yang menjadi

pemimpin kelompok Ambon dengan pasukannya yang terdiri atas orang Ambon dan Bugis itu, umpamanya terkenal dalam ekspedisi-ekspedisi VOC sampai Srilangka dan India, maupun di Jawa. Pasukan Bali lebih banyak dikenal sebagai pasukan pembantu pengawal kota. Kelompok-kelompok etnik Nusantara yang melakukan tugas-tugas untuk kepentingan VOC tidak diharuskan membayar pajak seperti halnya orang-orang Cina. Kelompok-kelompok etnik tersebut berdiam di kampung masing-masing yang hingga kini masih tersisa dalam bentuk nama kampung. Masing-masing kelompok memiliki pemimpinnya sendiri, yang diberi gelar “Kapiten”, diwakili oleh “Letnan” dan seterusnya. Komposisi golongan penduduk yang oleh VOC dikategorikan sebagai “orang asing” dalam abad ke-17 sebagai berikut:

Tabel 2.1: “Orang Asing” di Batavia Abad Ke-17

Tahun	Kelompok Etnik	Jumlah
1699	Cina	3.579
1699	Mardijker	2.407
1679	Ambon	719
1679	Bugis-Makasar	6.045
1679	Banda	2.000

Sumber: de Jong, 1998: 127-128.

Gangguan keamanan merupakan salah satu masalah yang sangat penting di Ommelanden yang makin lama makin luas karena pertambahan penduduk. VOC memiliki suatu organisasi semi militer yang dinamakan “Schuiterij” yang terdiri dari kontingen-kontingen “Vrijburgers”, “Mardijkers” dan berbagai kelompok etnik tersebut (kecuali orang Cina yang dibebaskan karena membayar pajak kepala), masing-masing dalam sebuah kompi. Selain itu, juga diangkat semacam “Sherif” yang dinamakan Schout yang mengkoordinasi keamanan diberbagai wilayah di Ommelanden. Persoalan keamanan tersebut makin meningkat dalam abad ke-18 seiring dengan perluasan perkebunan tebu dan penggilingan gula dan persawahan. Hal itu sejalan pula dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dalam abad ke-18, terutama di kalangan orang Cina. Kalau

dalam tahun 1699 jumlah mereka hanya 3.679 jiwa, dalam tahun 1739 jumlah itu sudah meningkat menjadi lebih dari 15.000 jiwa (de Jong, 1998: 128).

Perkembangan kependudukan tersebut diikuti pula oleh perubahan dalam soal pertanian. Sejak awal abad ke-18 “Hooge Regering” mulai menjual tanah-tanah di Ommelanden itu terutama kepada para pejabat tinggi VOC. Sebagian besar tanah-tanah yang telah dibeli itu diolah menjadi perkebunan tebu dan penggilingan gula. Sebagian lagi disewakan oleh pemiliknya kepada orang-orang Cina yang membuka perkebunan tebu dan penggilingannya dengan mempekerjakan orang Cina dan tenaga budak atau orang-orang Jawa yang bermigrasi ke wilayah itu sejak bagian kedua abad ke-17. Penggilingan tebu yang umumnya terletak di tepi Sungai Ciliwung itu, akhirnya membawa malapetaka karena aliran sungai terhambat oleh sampah penggilingan. Selain itu, letusan gunung Salak pada tahun 1699 juga menambah parahnya aliran sungai. VOC berupaya untuk mengalirkan air bersih ke wilayah perkotaan dengan membangun sebuah kanal dari Sungai Cisadane ke Sungai Ciliwung akhirnya juga gagal karena endapan lumpur yang menghambat aliran air kanal tersebut. Penyumbatan dan pencemaran sungai dan kanal tersebut mengakibatkan berjangkitnya penyakit malaria terutama sejak abad ke-18. “Queen of the East” yang menjadi julukan untuk Batavia, berubah menjadi “Graveyard of the East” karena banyaknya pegawai VOC yang meninggal karena penyakit malaria. Wabah penyakit yang merajalela di Batavia itu menyebabkan orang mencari tempat-tempat yang lebih nyaman untuk dihuni. Baron van Imhoff mencoba membuka jalan dengan membangun sebuah istana di Bogor pada tahun 1740 yang diberi nama “Buitenzorg”. Namun, ekspedisi besar-besaran baru terjadi dalam abad ke-19. Dalam masa VOC perluasan pemukiman tidak melampaui Tanah Abang dan Jatinegara (sekarang) yang dapat ditempuh dengan menggunakan kereta kuda (“caross”). Perjalanan dari Jatinegara ditempuh dengan menggunakan kuda yang dapat ditukar pada pos-pos tertentu.

Pemekaran kota yang disertai penambahan penduduk (Cina) itu tidak terlepas dari permasalahan keamanan. Makin luas jangkauan kota makin sulit diawasi oleh aparat pengamanan yang sangat minim itu. Masalah penambahan penduduk juga menimbulkan masalah pemerintahan. Meluasnya orang-orang Cina di segenap penjuru Ommelanden menyebabkan mereka makin lama makin sulit dikendalikan oleh para “Kapitan” dan “Letnan” Cina. Ketegangan yang makin lama makin meningkat di antara penduduk Cina dan para pemimpinnya. Ketegangan itu makin meningkat lagi karena tiba-tiba harga gula jatuh di

pasaran internasional, sehingga banyak pabrik gula harus ditutup dan pada gilirannya memperluas pengangguran. Kelompok-kelompok orang Cina mulai nampak di mana-mana dan menjadi ancaman bagi penduduk kota lainnya. VOC berupaya untuk mengatasi kelebihan penduduk dengan memulangkan mereka, menimbulkan berbagai desas-desus yang meluas menjadi pemberontakan pada tahun 1740 yang menelan ribuan korban. Untuk menjaga keamanan kota, sejak itu orang Cina tidak diperkenankan lagi berdiam dalam tembok-tembok kota dan diberi tempat tinggal yang hingga kini dinamakan Glodok (Blusse, 1988: 111-265).

2.5 Budaya Indisch

Suatu hal yang menarik selama masa VOC di kota-kota benteng seperti Batavia, Makassar, Ambon dan lain-lain adalah munculnya suatu kebudayaan yang khas, yang oleh beberapa pakar dinamakan “budaya Indisch” yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya Barat (baca Belanda) dan budaya Asia. Hal ini pertama-tama nampak dalam arsitektur dari rumah-rumah mewah milik “landed estate gentry” tersebut yang dinamakan “heerenhizen” dan terletak sepanjang kanal yang membentang dari tembok kota hingga pertigaan Harmoni (kini nama jalan di kanan kiri kanal tersebut adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayan Wuruk). Salah satu contoh rumah mewah yang masih berdiri hingga sekarang (bahkan telah dipugar) adalah Gajah Mada 111 yang kini digunakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Keistimewaan rumah-rumah mewah itu adalah luasnya bangunan utama yang biasanya bertingkat. Berbeda dengan rumah-rumah di Negeri Belanda, rumah mewah di daerah tropis memiliki atap yang pinggirannya menjorok melewati tembok untuk menghalangi hujan dan panas. Di belakang gedung utama biasanya terdapat ruangan-ruangan untuk kuda dan untuk budak belian yang sangat banyak jumlahnya. Selain itu, cara berbusana para pejabat VOC dan Vrijburgers juga merupakan salah satu ciri lainnya dari budaya Indisch. Untuk kepentingan formal mereka menggunakan busana Barat sesuai mode yang berlaku. Akan tetapi, dalam keadaan informal seperti di rumah kaum pria menggunakan busana yang juga digunakan kaum mardijkers, yaitu celana yang lebar dan kebaya panjang yang ditiru dari India. Kaum wanita juga menggunakan “kebaya”, tetapi para wanita Mestizo menggunakan apa yang ketika itu dinamakan “baju” sedangkan bagian bawahnya kedua golongan wanita itu menggunakan sarung (kleedje). Bahasa

yang digunakan juga menunjukkan unsur-unsur campuran. Pada mulanya di Batavia bahasa Portugis menjadi bahasa Lingua Franca, tetapi berangsur-angsur muncul bahasa Melayu. Musik keroncong dari masa itu adalah juga contoh khas dari budaya Mestizo itu (de Jong, 1998: 134-140)

Di kalangan ahli sejarah sedang berkembang suatu diskusi mengenai bentuk masyarakat Batavia dan kota-kota dagang VOC lainnya. Pada satu pihak terdapat para pakar yang berpendapat bahwa masyarakat Batavia adalah masyarakat yang majemuk. Konsep dasarnya adalah “plural society” yang pertama-tama dilontarkan oleh Furnivall. Pada pihak lain ada yang berpendapat bahwa masyarakat Batavia adalah kelanjutan dari masyarakat kota pelabuhan Asia. Ciri khas dari masyarakat kota pelabuhan di Asia sebelum abad ke-19, menurut pendapat terakhir itu, adalah suatu masyarakat campuran yang mana semua unsur etnik membaaur dan membentuk suatu masyarakat maritim yang khas. Eksponen dari pandangan pertama adalah Prof. Dr. Leonard Blusse, sedangkan pandangan kedua diwakili oleh Dr. J.J.P. de Jong. Kedua pandangan tersebut ada benarnya. Plural Society menurut definisi Furnivall sebagaimana dikutip oleh de Jong (1998: 129) adalah *a society compromising two or more elements or social order which live side by side, yet without mingling in one political unit.*

Masyarakat Batavia memang merupakan suatu campuran dari berbagai suku dan etnik, masing-masing dengan organisasi, pimpinan, aturan-aturan, tempat tinggal dan agamanya. Akan tetapi kalau penelitian ditujukan pada golongan elit di Batavia yang terdiri dari orang-orang Belanda, dan proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan alam dan budaya Asia, maka kenyataan menunjukkan bahwa perubahan sosial bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi di masa VOC. Khususnya interaksi antara golongan elit itu dengan lapisan wanita Meztizo yang menjadi sumber bagi mereka untuk mendapat isteri atau selir di Batavia, maka hasilnya tidak saja budaya Indisch, tetapi juga pembentukan klan-klan penting yang berintikan wanita-wanita campuran tersebut (de Jong, 1998: 131-132). De Jong berpendapat bahwa yang terjadi bukan perubahan sosial tetapi penyesuaian pada sistem sosial yang disebutnya feodalisme yang mengacu pada gaya hidup para bupati dan raja-raja di Jawa. Namun, pembahasan dari Blusse memperlihatkan bahwa betapun kelompok elit itu menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya, namun aturan-aturan hukum Barat tetap mengikat mereka dan membedakan berbagai institusi sosial dengan lingkungan tersebut. Perihal pembentukan keluarga-keluarga elit di Batavia yang berintikan wanita-wanita campuran itu, Blusse menunjukkan bahwa

ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan membuat wujud keluarga-keluarga tersebut tetap berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan dalam kota-kota pelabuhan di Asia. Kenyataan itu terungkap dalam biografi yang ditulis oleh Blusse mengenai Cornelia van Nijenroode (Blusse, 1998).

Ayah dari Cornelia adalah Pieter Nijenroode. Dia adalah kepala loji VOC dengan pangkat *opperkoopmen* di Hirado, di Pulau Kyushu, Jepang (baru pada tahun 1641 kantor dagang itu dipindahkan ke Desima. Di Hirado Pieter Nijenroode menikah dengan kakak beradik wanita Jepang, dan memperoleh dua orang putri yaitu Hester dan Cornelia. Bersama Pieter Nijenroode kedua anak gadis itu diharuskan meninggalkan ibu mereka dan kembali ke Batavia. Ibu mereka tidak ikut ke Batavia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pemerintah Tokugawa ibu mereka tidak diizinkan meninggalkan Jepang. Namun, Pieter Nijenroode meninggal sebelum kapal yang mereka tumpangi itu bertolak dari Hirado, dan kedua kakak beradik itu tiba di Batavia pada tahun 1637. Di Batavia keduanya ditempatkan di rumah piatu hingga menunggu dewasa. Pada tahun 1652 Cornelia menikah dengan Pieter Cnoll yang menjabat sebagai kepala keuangan VOC di Batavia dan dikenal sebagai orang terkaya di kota itu. Sepeninggal Cnoll, Cornelia mewarisi sebagian besar dari harta suaminya. Cornelia menikah lagi pada tahun 1678 dengan seorang pegawai VOC lain, Joan Bitter yang menikahnya hanya karena harta warisannya. Pertikaian antara suami isteri itu berlangsung hingga kematian Cornelia merupakan peristiwa bertahun-tahun yang menggemparkan Kota Batavia. Namun, sekalipun berkali-kali Cornelia meminta bantuan dewan peradilan dan *Hooge regering* di Batavia, bahkan *Heeren XVII* di Belanda, pengadilan tetap dimenangkan Bitter. Masalahnya adalah bahwa sekalipun wanita dapat mewarisi harta kekayaan suami atau ayahnya, sekali mereka menikah, perundang-undangan Belanda ketika itu menentukan bahwa harta warisannya menjadi hak suaminya. Sebab itu, perjuangan Cornelia sejak awal memang sudah ditakdirkan untuk kalah (Blusse, 2004: 375-417).

Kasus Cornelia menunjukkan kedudukan wanita campuran yang menikah dengan kalangan elit di Batavia. Sebagai jembatan antara dua dunia, para wanita campuran itu memang melahirkan suatu budaya yang khas di kalangan elit Batavia, yaitu budaya *Indisch*. Namun, sistem hukum yang berlaku di Batavia dan juga di Negeri Belanda ketika itu, yang ditunjang dengan mencolok oleh kekuasaan politik VOC itu, merupakan kenyataan pula.

2.6 VOC di Nusantara

Tujuan VOC di Asia pertama-tama adalah untuk membeli rempah-rempah. Ada dua sayap yang penting dari perdagangan rempah-rempah yang memusat di Batavia itu. Pertama-tama adalah sayap Timur yaitu Maluku yang menghasilkan cengkeh dan pala dan kedua adalah sayap Barat yaitu Sumatera dan Jawa Barat yang menghasilkan lada. Sejak abad ke-17 VOC telah menaruh perhatian pada pantai utara Pulau Jawa yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram (Pasisir), terutama karena kayu jatinya dan berasnya. Namun, sejak abad ke-18 daerah Pasisiran itu dikuasai juga oleh VOC. Selain kayu dan beras, VOC juga memperkenalkan komoditi-komoditi baru di sana seperti kopi dan indigo.

Secara kronologis perkembangan ekspansi VOC tersebut adalah peletakan dasar dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen yang juga berhasil merebut Kepulauan Banda. Kemudian dalam masa jabatan Gubernur Jenderal Antonio van Dieman (1636-1645) Maluku Utara dan Maluku Tengah dikuasai VOC, dalam masa Gubernur Jenderal Joan Maetsuyeker (1650-1678) Goa-Tallo (Makassar) dikuasai, perluasan ke pantai utara Pulau Jawa telah dimulai sejak Gubernur Jenderal Rijcklof van Goens (1678-1681) dan dirampungkan semasa Gubernur Jenderal Speelman (1681-1684) yang juga menduduki Banten.

Untuk mengurus kepentingan ekonominya di wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh VOC, dibangun kantor-kantor dagang, pos-pos tentara, bahkan berbagai jenis benteng. Para pejabat lokal VOC itu diberi tanggung jawab yang berbeda-beda sejalan dengan jangkauan wewenangnya. Ambon, Banda, dan Ternate masing-masing dipimpin seorang Gubernur karena selain memiliki hak berdagang, di sana VOC juga menguasai suatu wilayah tertentu di sekitar bentengnya. Demikian pula di Malaka dan Nagapatman (Koromandel) serta di Srilangka. Daerah-daerah lain seperti Benggala, Surat, dan di Parsi, VOC hanya diwakili oleh seorang direktur, lebih rendah lagi adalah pos-pos yang masing-masing dikepalai seorang komandan seperti di Malabar, Padang, dan Banten. Sedangkan kantor-kantor dagang kecil seperti di Desima (Jepang) dan Taiwan dipimpin seorang Opperhoofd (saudagar kepala). Sekalipun demikian, hanya di sekitar Ambon, Ternate dan Banda VOC berhasil menegakkan monopolinya secara penuh dalam arti kata kekuasaan atas itu mutlak, demikian pula di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-18. Di wilayah-wilayah lain VOC hanya berdagang berdasarkan kontrak bahkan di India berlaku perdagangan bebas. Selain berdagang di Nusantara, VOC juga berdagang di Asia. Perdagangan

antara Batavia dan berbagai kantor dagang di luar Nusantara itu lazimnya disebut “Inter-Asiatic Trade”. Kegiatan perdagangan VOC yang penting pertama-tama adalah Koromandel di India yang menghasilkan tekstil. Tekstil India tidak saja digunakan dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi juga diekspor ke Negeri Belanda. Selain itu, terdapat perdagangan teh yang diangkut oleh para pedagang Cina ke Batavia dan oleh VOC disalurkan ke Negeri Belanda dan kayu manis dari Srilangka. Dalam abad ke-18 muncul pula kopi yang pada mulanya dibeli dari Yemen, tetapi kemudian diusahakan sendiri oleh VOC di Priangan (Preangan Stelsel) dan pantai utara Pulau Jawa yang juga dikenal dengan nama Indigo. Selain itu, pada saat itu pula gula yang diusahakan orang Cina di sekitar Batavia juga menjadi penting (Leirissa, 1998, 61-81).

Pembentukan VOC bertujuan untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan memperkuat armada dagang Belanda menghadapi pesaingnya Spanyol dan Portugis. Spanyol dan Portugis dianggap merintang jalan Belanda menguasai jalur perdagangan khususnya ke kepulauan rempah-rempah di Nusantara. Sebelum dibentuknya kongsi dagang Belanda tersebut, di Belanda muncul beberapa perseroan (perserikatan dagang atau kongsi dagang), di antaranya: Perseroan Amsterdam, Perseroan Delft, Perseroan Enkhuizen, dan Perseroan Hoorn. Masing-masing perseroan tersebut melakukan pelayaran dan perdagangan ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang sangat laris di pasar Eropa. Pada tahun 1595 Perseroan Amsterdam untuk pertama kalinya mengirim angkatan kapal dagangnya yang terdiri atas 4 kapal ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan pada 14 Agustus 1597 tiba kembali di Tessel. Kemudian pada 1 Mei 1598 angkatan kedua di bawah pimpinan van Nede, van Heemskerck dan van Warwijck. Selain kapal-kapal tersebut, masih ada beberapa kapal yang dikirim ke Indonesia, di antaranya kapal yang bertolak dari Vissingen, Middelburg, dan Rotterdam.

Pada April 1599 angkatan ketiga yang bertolak dari Amsterdam dikirim ke Indonesia di bawah pimpinan van den Hagen dan angkatan yang keempat dibawah pimpinan van Neck berangkat pada Juni 1600. Pada bulan Juni itu juga perseroan-perseroan di Amsterdam bergabung, disusul oleh fusi perseroan-perseroan di Zeeland. Muncullah perseroan seperti jamur, antara lain di Delft, Enkhuizen, dan Hoorn. Pada 20 Maret 1602 perseroan-perseroan tersebut bersepakat mendirikan Gabungan Perseroan. Gabungan perseroan tersebut disahkan oleh Staten General Republik Kesatuan Tujuh Provinsi. Staten General Republik Kesatuan Tujuh Provinsi memberi hak eksklusif kepada perseroan untuk berdagang, berlayar dan memegang kekuasaan di kawasan antara

Tanjung Harapan dan Kepulauan Salomon. Pimpinan VOC terdiri atas tujuh belas anggota, maka disebut Heeren Zeventien (Kartodirdjo, 1999: 70-71).

Pelayaran pertama mengunjungi Banten dan berlayar kembali lewat Selat Bali, sedang angkatan kedua dapat mencapai Maluku dan untuk pertama kali melakukan pembelian rempah-rempah. Angkatan ketiga telah melakukan serangan terhadap Benteng Portugis di Ambon tetapi gagal, sehingga terpaksa mendirikan benteng sendiri, yaitu Benteng Afar. Angkatan ketiga itu juga telah membuat kontrak dengan pribumi tentang jual beli rempah-rempah. Angkatan kelima lebih berhasil dari angkatan keempat dengan pembukaan perdagangan dengan Banten, Banda, dan Ternate, akan tetapi gagal merebut benteng Portugis di Ternate. Konfrontasi dengan Portugis tidak dapat dielakkan karena persaingan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan merupakan kelanjutan permusuhan di Eropa. Portugal yang ada di bawah satu mahkota dengan Spanyol mau tak mau terseret dalam Perang Delapan Puluh Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda, yaitu suatu perang untuk merebut kemerdekaan bagi Bangsa Belanda.

VOC bertujuan untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Keinginan VOC tersebut telah membangkitkan perlawanan pedagang pribumi yang merasa terancam kepentingannya. Para pedagang pribumi menunjukkan sikap bermusuhan terhadap kehadiran Belanda (VOC). Sikap bermusuhan dari pedagang pribumi semakin menguat karena VOC memberlakukan sistem monopoli perdagangan. Hal ini mendorong umat Islam lebih memperkokoh persatuan untuk menghadapi VOC. Sistem monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC sangat bertentangan dengan sistem perdagangan tradisional yang berlaku saat itu. Ketika VOC memulai kegiatan perdagangannya di Indonesia, VOC menghadapi suatu perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Peraturan jual-beli, proses penawaran, penentuan harga telah mengikuti pola atau sistem yang telah berlaku lama. Perdagangan rempah-rempah merupakan komoditi perdagangan yang utama, akan tetapi tidak terpisah dari perdagangan beras, sagu, kain dan komoditi lainnya. Sebelum kehadiran bangsa-bangsa Barat di Nusantara, bahan kain didatangkan oleh pedagang dari Gujarat dan Benggali. Namun, kemudian perdagangan kain itu sebagian dikuasai oleh Portugis. Perdagangan beras dikuasai oleh pedagang dari Jawa (Kartodirdjo, 1999: 72-73).

Ada dua basis pemusatan perdagangan dan pelayaran yang mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam jaringan transaksi dan transportasi komoditi-komoditi tersebut (rempah-rempah, beras, sagu, kain dan komoditi lainnya)

yaitu Malaka dan Maluku. Garis Malaka-Maluku secara struktural merupakan sistem yang berfungsi secara optimal. Dalam sistem tersebut tumbuhlah subsistem-subsistem dengan pusat-pusat kecil sebagai pendukung dan komplemennya. Dalam menghadapi sistem itu, VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dengan menduduki kedua basis itu. Maluku dahulu dan Malaka kemudian. VOC telah menentukan Batavia sebagai alternatif pengganti Malaka. Sejak awal VOC mengalami kesulitan dalam menerobos sistem perdagangan yang berlaku. Dalam menerapkan sistem monopoli perdagangannya, VOC mengadakan kontrak-kontrak dengan penguasa setempat. Namun, sistem monopoli tersebut tidak dapat terlaksana selama tidak ada dukungan politik.

Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah ditentang oleh sebagian besar dari kalangan VOC. Jalan radikal menjadi pilihan VOC untuk merebut monopoli. VOC melarang kapal pribumi untuk mengangkut barang dagangan Portugis, menghentikan semua ekspor rempah-rempah, dan menebangi pohon-pohon pala dan cengkeh. VOC disarankan untuk mengikuti jejak Portugis, yaitu menukar rempah-rempah dengan bahan pakaian dan bahan makanan. Politik radikal lain yang dipertimbangkan adalah untuk mengendalikan dan membatasi perdagangan Asia seperti yang telah dijalankan bangsa-bangsa Asia dan Portugis sejak lama. Akan tetapi, strategi tersebut terkendala pada kelemahan angkutan VOC yang serba kekurangan awak-awak kapal, amunisi, dan kapal. Akibatnya, VOC tidak dapat mengawasi perdagangan Asia dan memberlakukan sanksinya. Pembelian rempah-rempah dengan mata uang logam ternyata merugikan VOC. Rakyat menabung hasil penjualannya dan membeli bahan pakaian dengan mata uang tabungannya dari Portugis atau pedagang bangsa lain. Oleh karena keuntungan VOC terutama dari penjualan bahan pakaian, maka politik itu akan memukul diri sendiri.

Memorong bahan pakaian lebih dahulu dari Inggris dan Portugis tak menguntungkan, oleh karena persediaan rempah-rempah yang menunggu pengangkutan masih banyak. VOC menempuh langkah lain, seperti memblokir Selat Malaka dan perdagangan Portugis, akan menguntungkan bangsa Barat lainnya, pedagang Jawa, Gujarat yang bebas dari persaingan Portugis, dapat bergerak secara leluasa. Kapasitas VOC yang terbatas sehingga perdagangan Asia akan menimbulkan kekosongan, banyak permintaan berbagai jenis komoditi tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian politik monopoli VOC ternyata tidak menjamin adanya keuntungan yang besar. Sebaliknya, kondisi perdagangan di Eropa pada periode awal VOC beroperasi terbukti menunjukkan

pasaran rempah-rempah yang membanjir sehingga harga penjualan rempah-rempah di Eropa semakin merosot. Pada pertengahan abad ke XVII politik VOC di Banda mengakibatkan produksi rempah-rempah semakin merosot, sehingga berdampak terhadap volume perdagangannya yang semakin menyusut. Untuk mengatasi faktor-faktor yang merugikan tersebut, VOC mengalihkan perdagangannya ke perdagangan komoditi di Asia, yang disebut haalhandel.

VOC juga mencoba untuk menarik perdagangan pribumi dan bangsa Asia ke pusat-pusat yang dikuasainya, seperti Batavia dan Ambon. Hal ini dimaksudkan untuk menarik pajak dan keuntungan lainnya. Kesempatan yang diberikan VOC kepada *vrijburgers* (warga bebas) untuk melakukan perdagangan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan penguasa VOC tetap berpegang teguh pada konsep monopoli. Sementara itu, kompetisi yang datang dari pedagang Barat mulai berkurang dengan kemenangan yang diperoleh Belanda. Portugis meninggalkan Maluku dan Nusa Tenggara pada tahun 1613. Portugis mulai terdesak di Sialan, menjelang penyerahan Malaka pada tahun 1614. Bangsa Inggris tidak berkesempatan berekspansi dalam operasinya di Indonesia dan akhirnya tinggal satu loji di Banten. Sementara itu, VOC masih harus menghadapi tiga pusat kekuasaan pribumi yaitu Makasar, Aceh dan Mataram. Selama VOC disibukkan dengan upaya memperkuat basis-basisnya dan mendesak saingan-saingannya, ketiga pusat kekuasaan itu leluasa menjalankan konsolidasinya ke dalam dan ekspansinya. Pada fase itupun adakalanya konfrontasi tidak dapat dihindari, seperti serangan Batavia tahun 1627-1628 (Kartodirdjo, 1999: 72-73).

Penetrasi VOC dalam jaringan perdagangan di Indonesia mengakibatkan konflik-konflik dengan pusat-pusat perdagangan yang berperan penting sebagai entreport, emporium, atau stasiun tengah jalan antara Maluku dan Malaka. Salah satu urat nadi dalam sistem itu ialah perdagangan beras dan bahan makanan yang dikuasai oleh pedagang Jawa, khususnya pada awal abad XVII dari Gresik-Jaratan dan Surabaya. Operasi VOC dianggap sebagai ancaman bagi pusat-pusat itu. Sebaliknya, pihak VOC berpendapat bahwa dominasi pedagang Jawa itu harus dipatahkan. Sebelum kehadiran VOC di Maluku, rempah-rempah datang ke kota-kota itu dari Maluku dan beras serta komoditi lain diangkut kembali. Perdagangan itu menimbulkan hubungan erat, terutama dalam proses islamisasi daerah, serta yang erat berhubungan dengan itu ialah perlawanan terhadap penetrasi bangsa barat yang dibarengi oleh proses Kristenisasi. Rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku ditambah beras

diangkut ke Malaka. Dari Malaka diangkutlah bahan kain dan komoditi lainnya yang berasal dari Asia lainnya.

Kehadiran VOC di Indonesia dengan praktik monopolinya secara langsung membahayakan kedudukan Gresik, Surabaya dan kota-kota perdagangan di pesisir Jawa Timur lainnya. Ketika Belanda mulai membangun basisnya di Ambon dan Banda sejak tahun 1602, Gresik segera merasakan dampaknya dengan menurunnya aliran rempah-rempah ke pasarannya. Juga usaha VOC menghalang-halangi dan sedapat mungkin menghentikan perdagangan dengan Malaka, merupakan pukulan hebat bagi Gresik. Meskipun demikian, hubungan dengan Portugis berjalan terus, karena dalam konfrontasi Gresik-Surabaya dengan Belanda, kedua pihak perlu memperhitungkan faktor-faktor politik, yaitu Portugis dengan Malaka-nya dan Mataram dengan politik ekspansinya. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Gresik dan Surabaya memperkuat dirinya dengan mengadakan aliansi dengan pihak-pihak lain. Sebaliknya, pihak Belanda masih memerlukan terbukanya saluran persediaan beras dan bahan makanan lainnya. Kedudukan kuat Gresik dan Surabaya bukan hanya didasarkan atas peranannya dalam perdagangannya tetapi juga karena pengaruhnya dalam keagamaan.

Panembahan Giri dipandang sebagai pemuka Islam yang tersohor di Nusantara. Pengaruhnya sangat besar di kepulauan rempah-rempah. Hubungan penguasa Giri dengan Ambon dan Banda sangat erat, khususnya rakyat Banda memperoleh perlindungannya dalam menghadapi penetrasi VOC tahun 1622. Seorang dari putra dari Kapitan Hitu mengikuti Panembahan Giri. Ketika kapal milik Panembahan Giri disita VOC, rakyat Banda yang merebutnya kembali dan membebaskan anak kapalnya. Banten sebagai tetangga terdekat dari basis VOC di Batavia juga mengalami kemunduran karena monopoli VOC. Hubungan perdagangan Banten dan Malaka sebelumnya sangat baik, rempah-rempah dan lada diambil di Banten dan bahan pakaian dijual di tempat itu oleh Portugis. Namun, ketika Ambon dan Banda diblokade oleh Belanda, perdagangan rempah-rempah sangat menyusut, sedang permintaan akan bahan pakaian sangat terbatas. Sementara itu blokade Malaka oleh Belanda telah mendorong perdagangan Indonesia bagian barat berpusat di Aceh, sedangkan monopoli rempah-rempah yang semakin ketat menindahkan pusat pemasaran rempah-rempah di Makassar. Perdagangan bahan pakaian dari Gujarat menyusut sekali karena rakyat mulai menenun sendiri. Penetrasi VOC dalam jaringan perdagangan Indonesia dalam bagian pertama abad XVII menghadapi juga persaingan dari pedagang Asia non Indonesia, seperti Gujarat, Keling,

Benggali dan Cina. Komoditi yang mereka kuasai ternyata mempunyai nilai tukar tinggi di Indonesia maka haalhandel ternyata sangat menguntungkan, sering melebihi perdagangan rempah-rempahnya. Kedua jenis perdagangan itu terjalin erat satu sama lain, sehingga politik monopoli VOC dalam rempah-rempah mau tak mau diperluas mencakup komoditi-komoditi dari perdagangan Asia (Kartodirdjo, 1999: 77-78).

Pada 1608 untuk pertama kalinya diangkat seorang Gubernur Jenderal (Gouverneur-Generaal) sebagai pimpinan umum pemerintahan dan perdagangan VOC di Indonesia. Pada 1619 oleh G.G. Jan Pieterzoon Coen dibangun Kantor Dagang (factory) di Jakarta dan dinamainya Batavia sebagai pusat kekuasaan pemerintahan, pelayaran dan perdagangan VOC di Kepulauan Indonesia. Selama abad XVII-XVIII dari Kota Batavia dikembangkan suatu imperium dagang, meskipun pernah berhasil menguasai seluruh kepulauan. Pada hakikatnya kekuasaannya terbatas pada Kota Batavia dan beberapa kota lainnya yang dikuasainya secara langsung. Di luar daerah-daerah yang langsung di bawah kekuasaan VOC itu, kerajaan-kerajaan Indonesia hidup terus sebagai kerajaan yang berdaulat dan berusaha tetap menguasai pangkalan-pangkalan, rute-rute perdagangan dan daerah-daerah pedalaman. Dalam persaingan dan perebutan kekuasaan dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia baik melalui diplomasi maupun peperangan, akhirnya VOC berhasil memaksakan perjanjian-perjanjian terhadap raja-raja di Indonesia, yang bukan saja menuntut hak-hak monopoli perdagangan dan kekuasaan pemerintahan, akan tetapi juga melakukan intervensi dalam masalah-masalah intern kerajaan seperti pergantian tahta kerajaan. Melalui kontrak-kontrak politik seperti itu, akhirnya raja-raja di Indonesia kehilangan kedaulatannya sama sekali.

2.7 VOC Memonopoli Rempah-Rempah

Menurut Anthony Reid cengkeh dari Maluku Utara mungkin sudah diperdagangkan di Roma dan di Cina (zaman dinasti Han) sejak awal milineum ini. Namun para pedagang Cina baru muncul di Maluku dalam masa dinasti Tang (abad ke-7). Tampaknya sejak itulah muncul kesadaran di Maluku, bahwa cengkeh dapat membawa keuntungan. Maka tidak mengherankan kalau istilah untuk komoditi itu juga diturunkan dari bahasa-bahasa Cina, seperti Bahasa Mandarin (Zhi jia) atau dialek Kantonnya (Zhen ga), yang berarti paku. Orang-orang Maluku menyebutnya cengke, yang menjadi cengkeh pada para pedagang

Melayu dan Jawa yang memperdagangkannya sejak abad ke-15 ketika orang Cina tidak lagi mengunjungi Maluku. Orang-orang Belanda juga menggunakan istilah yang mengacu pada paku yaitu kruitnagel (Belanda: kruid= rempah-rempah, nagel= paku). Orang Portugis, Prancis, dan Inggris menggunakan istilah yang mengacu pada cakar, seperti clou (Prancis), dan clove (Portugis), claw (Inggris) (Reid, 1993, II: 4, 12).

Para pedagang Arab atau India menyebut cengkeh dengan nama “mawar hitam”. Para pedagang Arab atau India nampaknya sudah mulai mengunjungi Maluku Utara pada abad ke-14. Ekspor cengkeh ke Cina dan Timur Tengah itu meningkat sejak peningkatan perdagangan Asia Tenggara yang sejalan dengan perdagangan dinasti Ming di abad ke-15. Malaka sebagai emporium di Asia Tenggara sejak itu menjadi pusat dari perdagangan cengkeh. Para pedagang Melayu maupun Jawa menjadi penyalur utama dari cengkeh Maluku Utara ke emporium itu, dan dari Malaka cengkeh diangkut oleh para pedagang Cina ke Cina dan oleh para pedagang India ke Gujarat yang merupakan salah satu emporium terpenting di India. Selanjutnya cengkeh diperdagangkan oleh para pedagang India dan Arab ke berbagai emporium di Laut Merah dan Teluk Parsi, dan dengan karavan-karavan onta cengkeh diangkut ke Iskandariah dan Beirut. Dari sana para pedagang Venesia mengangkutnya dengan kapal-kapal layar jenis galei ke berbagai pelabuhan di Italia, yang pada gilirannya menyalurkannya ke berbagai tempat lain di Eropa. Jalur perdagangan cengkeh tersebut dapat dinamakan “jalur Timur Tengah”. Sebelum abad ke-16 dunia Islam di Timur Tengah itu merupakan satu-satunya penghubung antara hasil produksi dari Asia, antara lain rempah-rempah dari Maluku, dengan konsumen di Eropa. Rempah-rempah Maluku ketika itu digunakan oleh kalangan yang mempunyai selain untuk keperluan sehari-hari, juga untuk keperluan pengobatan. Orang Arab, umpamanya menggunakan cengkeh sebagai bahan penyedap nasi (beras diimpor dari India). Dalam kurun waktu itu pula rempah-rempah berangsur-angsur menyebar ke Eropa yang ketika itu sangat mudah menerima unsur-unsur dari kebudayaan Timur Tengah. Kebiasaan menggunakan rempah-rempah dalam makanan pun menjadi kebiasaan di kalangan bangsawan di Eropa. Orang tertarik juga pada cengkeh karena harumnya (De Jong, 1998: 38).

Dalam rangka mempertahankan harga di Eropa, para pedagang Timur Tengah itu merahasiakan tempat asal rempah-rempah itu. Baru pada tahun 1521 orang Barat (Portugis) berhasil masuk ke wilayah produksi cengkeh di Maluku Utara. Mengingat sistem perhubungan ketika itu sangat bergantung pada arah angin, maka untuk kelancaran perdagangan dibutuhkan cara yang mudah mendapat

suplai dalam waktu singkat. Nampaknya kepentingan perdagangan itulah yang mendorong adanya upaya mengendalikan penyediaan cengkeh yang terpusat. Kemungkinan besar langkah yang pertama kearah pemusatan persediaan cengkeh itu dilakukan oleh seorang pedagang dari luar. Pemusatan persediaan cengkeh dari penduduk itulah kemudian menimbulkan kebutuhan adanya suatu tatanan kekuasaan yang mencakup daerah-daerah produksi. Dengan demikian berangsur-angsur muncul sejumlah pusat pengumpulan cengkeh di Maluku Utara yang menjamin kelancaran perdagangan. Dalam abad ke-15 jumlah pusat perdagangan itu terbatas pada empat wilayah yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo (Halmahera). Angka empat memang bukan kebetulan karena berkaitan dengan struktur sosial masyarakat tradisional pada umumnya di Indonesia Timur. Pemimpin, “kolano” dalam bahasa lokal, pusat-pusat perdagangan itu sejak awal bertindak pula sebagai pedagang cengkeh. Pulau-pulau lainnya yang menghasilkan cengkeh cepat atau lambat terkait dengan jaringan perdagangan melalui salah satu dari empat kota pelabuhan tersebut. Wakil-wakil para kolano yang ditempatkan di pulau-pulau itu pada dasarnya bertugas hanya untuk memonopoli kedaton atas cengkeh. Kenyataan bahwa para kolano di Maluku Utara itu beragama Islam menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian jaringan penguasa-pedagang yang muncul di berbagai kota pelabuhan di Nusantara ketika itu.

Agama Islam kemudian menyebar dengan pesat akhir abad ke-15 di pusat-pusat produksi cengkeh yang dikendalikan wakil-wakil kedaton tersebut, dan para kolano sejak itu mendapat julukan “sultan”. Sejak itu pula penyelenggaraan kekuasaan diserahkan oleh sultan kepada empat orang petinggi. Pertama-tama adalah Kapitan Laut yang mengatur armada kerajaan yang diwakili oleh kaula raja secara bergilir (kebiasaan itu kemudian oleh VOC dinamakan *heerendiensten*). Kemudian terdapat *Jougugu* yang merupakan penasihat utama dari sultan, dan seorang Hukum berkaitan dengan aturan-aturan hidup yang berasal dari Islam. Perdagangan pada dasarnya berarti persaingan yang sering menjurus ke peperangan. Hal itu melahirkan kesadaran pada keempat sultan di Maluku Utara itu bahwa hubungan antar mereka yang aman dan serasi merupakan prinsip politik yang utama. Dalam situasi tradisional saat itu maka satu-satunya prinsip kerukunan adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan antara empat sultan di Maluku Utara itupun ditingkatkan menjadi hubungan kekeluargaan yang dasar dari kosmologi kedaton yang sakral. Ungkapan kosmologi yang sakral itu adalah sebuah mitos tentang asal usul yang sama dari keempat kolano tersebut yang terdapat baik di Ternate, Tidore, Bacan, maupun Jailolo. Versi Islam dari mitos ini sampai kini diabadikan dalam naskah Hikayat

Ternate yang ditulis oleh Naidah di abad ke -19 (van Fraassen, 1997, I: 16-27). Menurut mitos itu, keempat kolano Maluku itu adalah turunan dari seorang ulama dari Timur Tengah yang bernama Jafar Sadek yang menikah dengan seorang bidadari lokal yang bernama Nur Sita. Versi non-Muslim tidak jauh berbeda, kecuali bahwa keempat raja itu lahir dari empat buah telur yang ditemukan orang dibawah rumpun bambu. Sistem empat penguasa di Maluku Utara itu dinamakan “ Maluku Kie Raha” (Maluku empat gunung) yang menunjukkan adanya hubungan federatif yang damai demi kepentingan perdagangan cengkeh.

Hubungan yang harmonis antara keempat kerajaan itu mulai berubah menjadi hubungan yang penuh pertentangan sejak abad ke-16. Kedatangan Portugis pada tahun 1521 memang berhasil dimanfaatkan Ternate untuk memperkuat dirinya terhadap ketiga kerajaan lainnya di Maluku. Sebuah benteng Portugis dibangun pada tahun 1522, benteng Gamalama, bersebelahan dengan kedaton di sebelah timur pulau itu berhadapan dengan Tidore. Sementara itu pihak Spanyol dari Filipina mencoba mendekati Tidore, walau tidak berhasil membangun sebuah benteng disana. Namun keunggulan senjata dan armada Portugis itu menyebabkan Ternate menjadi unggul atas ketiga kerajaan lainnya. Sejak itulah prinsip kerukunan “Maluku Kie Raha” mulai menghilang sebagai prinsip pergaulan politik, dan unsur rivalitas mulai muncul di kalangan sultan-sultan di Maluku, terutama antara Ternate dan Tidore. Namun kemitraan Ternate dengan Portugis tidak selalu berjalan mulus, terutama yang berkaitan dengan masalah dagang. Hubungan itu akhirnya diputuskan pada tahun 1570. Pada tahun itu Sultan Hairun dibunuh oleh seorang pelayannya yang diupah oleh Portugis. Putra dari Sultan Hairun, Baab Ullah menyerbu benteng Portugis di Gamalama dan mengepung benteng itu selama lima tahun. Akhirnya para pedagang dan tentara Portugis dalam benteng itu diijinkan meninggalkan Ternate pada tahun 1575. Tanpa dukungan Portugis Sultan Baab Ullah malah berhasil meluaskan kekuasaan Ternate, sehingga mencakup seluruh pulau-pulau dibagian barat Laut Seram. Perkebunan cengkeh juga diluaskan, antara lain ke Kepulauan Ambon, terutama di Hosmoal (Jazirah Barat Pulau Seram). Wakil Sultan Ternate (Kimelaha) yang berkedudukan di Luhu (Hoamoal) bertugas mengawasi monopoli perdagangan cengkeh di sana. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya volume cengkeh di pasaran dunia dengan meningkatnya perdagangan.

Zaman keemasan Ternate itu berakhir ketika pada tahun 1606 armada Spanyol dari Manila menyerbu kedaton dan menangkap Sultan Said serta keluarganya

dan petinggi kerajaan, dan mengasingkan mereka ke Manila. Hanya Kapitan Laut Kaicili Ali yang lolos dari penyerbuan itu, dan berhasil menghubungi VOC di Banten. VOC sepakat untuk membantu Ternate melawan Spanyol dengan syarat monopoli cengkeh diserahkan oleh sultan kepadanya. Dalam perjanjian yang ditandatangani tahun 1607 itu VOC juga diberi hak membangun benteng-benteng di wilayah Ternate. Salah satu benteng terpenting adalah benteng Oranye di bagian timur pulau itu. Kedaton pun dipindahkan dari pantai ke dekat benteng VOC itu. Benteng Oranye itu menjadi pusat pemerintahan VOC di Maluku Utara yang dinamakan “Gouvernement der Molukken yang juga mencakup Sulawesi Utara. Seorang Gubernur dan staf beserta tentaranya ditempatkan dalam benteng itu untuk menjamin pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak (Leirissa, 1974).

Perjanjian 1607 itu juga menetapkan bahwa sebagai imbalan dari peralihan hak monopoli dari sultan kepada VOC, sultan menerima setiap tahun apa yang dinamakan “recognitiepenningen”, yang jumlahnya dalam abad ke-17 berkisar antara 1600 hingga 2000 “spaansche matten” (dolar Spanyol), mata uang yang umum digunakan ketika itu). Perjanjian serupa kemudian juga dibuat dengan sultan-sultan lainnya di Maluku. Namun VOC menafsirkan hak-hak monopoli tersebut sebagai hak untuk melarang sama sekali penanaman dan perdagangan cengkeh di Maluku Utara. Suatu mekanisme untuk mengawasi pelanggaran atas larangan tersebut adalah apa yang dinamakan “Hongitochten” (hongitochten=armada, tochten=ekspedisi) yang diselenggarakan dengan restu sultan. Inti dari armada tersebut adalah juanga atau kora-kora (perahu-perahu perang) yang disediakan oleh setiap desa dan diawaki oleh penduduk desa yang bersangkutan, dengan pengawalan kapal-kapal layar VOC dan tentaranya. Armada tersebut mengelilingi pulau-pulau di kerajaan yang bersangkutan, dan memotong semua pohon cengkeh yang ditemuinya (extierpatie=pemusnahan). Sejak itu, VOC memusatkan produksi cengkeh di empat pulau kecil Maluku Tengah, yaitu Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut. Namun demikian, monopoli cengkeh yang dilakukan VOC baru berhasil sejak pertengahan abad ke-17. Menurut Anthony Reid, bahwa antara 1291 hingga 1499 ekspor cengkeh ke Eropa hanya melalui jalur Timur Tengah. Namun, sejak tahun 1500 Portugis membuka jalur melalui Tanjung Harapan dan mengungguli ekspor melalui Timur Tengah hingga pertengahan abad ke 16. Sejak 1560 ekspor melalui Timur Tengah meningkat tapi hanya menyamai ekspor Portugis. Sejak 1620-an ekspor cengkeh diungguli para pedagang Inggris dan Belanda dan sejak sekitar pertengahan abad ke-17 seluruh ekspor cengkeh dilakukan melalui Inggris dan Belanda, sedangkan jalur Timur Tengah lenyap sama sekali (Reid, 1998: 32).

2.8 Rempah-Rempah dari Nusantara Yang Dimonopoli VOC

VOC berupaya memonopoli rempah-rempah yang berasal dari Nusantara. Rempah-rempah yang berasal dari sayap timur Nusantara adalah cengkeh, pala dan fuli, sedangkan rempah-rempah yang berasal dari sayap barat Nusantara adalah lada. Adapun daerah asal rempah-rempah dari sayap timur Nusantara akan dijabarkan pada subbab berikut.

2.8.1 Cengkeh di Maluku Tengah

Pada awalnya strategi dagang yang diterapkan VOC adalah merebut semua pos-pos dan benteng-benteng Portugis di Asia agar keunggulan Portugis dapat dipatahkan. Namun, hanya benteng “Nossa Senhora de Anunciada” di Teluk Ambon (Jazirah Leitimor) yang berhasil direbut pada tahun 1605 dan diberi nama Kasteel Victoria. Pada tahun 1610 VOC meninggalkan strategi yang gagal itu, dan menerima strategi Cornelis Matelieff. Selain memusatkan kegiatan dagang dalam tangan seorang gubernur jenderal, strategi baru itu juga mengharuskan adanya kantor pusat di Asia dan terlaksana ketika benteng Batavia didirikan tahun 1619. Bagian ketiga dari strategi Matelieff itu adalah menguasai “Timur Besar” (“Groote Oost”).

Dalam abad ke-17 seluruh tindakan strategi VOC di Maluku didasarkan pada strategi Matelieff tersebut, termasuk di Maluku Utara. Namun, di Maluku Utara VOC tidak menggunakan kekerasan dalam menegakkan monopoli cengkeh di wilayah itu, karena justru VOC menerima hak monopoli dari Sultan Mudafar Syah (1607-1627) sebagai imbalan dari bantuan yang diberikannya untuk melindungi Ternate dari kekuasaan Spanyol di Manila, maka di Maluku Tengah VOC terpaksa harus berperang selama sekitar setengah abad untuk mencapai tujuannya itu. Benteng Victoria menjadi pijakan pertama VOC di Maluku Tengah. Di sekitar benteng itu secara berangsur-angsur muncul sebuah kota yang dikenal dengan nama Ambon.

Seperti halnya di Ternate, di Ambon pun ditempatkan seorang gubernur yang diberi wewenang atas “Gouvernement van Amboina”. Namun penegakan kekuasaan di wilayah itu berlangsung bersamaan dengan usaha Ternate untuk menguasai seluruh Kepulauan Maluku Tengah. Akibatnya terjadilah persaingan antara VOC dan Ternate untuk menegakkan kekuasaan di wilayah yang sama.

Selain itu, pada saat yang bersamaan pula Hitu di Pulau Ambon (Jazirah Leihitu) sedang berperang dengan Portugis. Bahkan pendudukan benteng Portugis pada tahun 1605 itu dilakukan bersama-sama dengan Hitu yang dibantu VOC untuk menghadapi Portugis di Hitu. Namun, setelah pengaruh politik dan ekonomi dari Portugis dapat diatasi di Maluku Tengah, muncul konflik antara Hitu dan VOC mengenai perdagangan cengkeh. VOC menuduh Hitu tidak mematuhi kontrak monopoli yang dibuat para “Perdana Hitu” pada tahun 1605 ketika bahaya Portugis masih mengancam, dan memilih berdagang dengan para pedagang dari Makassar. Untuk menghadapi VOC, para Perdana Hitu mengadakan aliansi dengan para wakil Sultan Ternate yang bergantian ditempatkan di Haomoal. Dengan demikian, peperangan meluas pula ke Haomoal yang menurut VOC telah menyerahkan monopoli cengkehnya dalam kontrak tahun 1605. Peperangan itu makin lama makin meningkat dan mencakup semua pemukiman di seluruh Maluku Tengah (Knaap, 1992).

VOC di Ambon berusaha menggagal kekuatan melalui penduduk Maluku Tengah yang telah beragama Kristen. Namun, cara tersebut tidak dapat mengatasi keadaan karena banyak desa-desa di Pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusalaut masih menentang VOC dan harus dipaksakan dengan senjata. Meskipun pemimpin perang Hitu, Kakiali, dapat ditangkap, tetapi segera muncul pimpinan perang yang baru yaitu Tulukibesi. Pusat-pusat pertahanan Hitu di Kapahaha dan Wawani yang terletak di pegunungan ternyata sulit ditemukan oleh pasukan VOC. Demikian pula wakil sultan Ternate, Kimelaha Leliato, yang membangun benteng-benteng di pegunungan Haomoal sulit ditakhlukkan. Perlawanan yang gigih di Maluku Tengah itu sebagian telah dikisahkan oleh Imam Rijali dari Hitu dalam “Hikayat Tanah Hitu” yang ditulisnya dalam pembuangannya di Makassar dalam tahun 1680-an.

Menghadapi perlawanan yang gigih di Maluku Tengah itu, pada awal tahun 1637 Batavia mengirim sebuah armada dengan pimpinan dari Gubernur Jenderal VOC di Batavia, yaitu Anthonie van Diemen (1635-1645). Armada VOC itu terdiri dari 17 kapal layar dan sekitar 2000 pelaut dan tentara. Peperangan berlangsung selama 4 bulan dari Januari hingga April 1637, Bahkan desa-desa Kristen pun banngkit melancarkan perlawanan terhadap VOC, baik di Ambon, di Haruku maupun Saparua. Peperangan yang demikian meningkat di Maluku Tengah pada 1637. Oleh karena itu ahli sejarah Belanda, G.J. Knaap berpendapat bahwa intensitasnya sama dengan Pemberontakan Pattimura yang berlangsung di seluruh Maluku Tengah pada tahun 1817 (Knaap, 1992).

Menghadapi teknologi militer yang lebih unggul dibandingkan dengan apa yang dimiliki penduduk Maluku Tengah, maka benteng-benteng Hitu yang demikian sulit direbut itu, terutama Wawani dan Kapahaha yang dipertahankan sendiri oleh Tulukibesi, jatuh ke tangan VOC pada tahun 1646. Para Perdana Hitu pun terpaksa menyerahkan diri dan institusi “Empat Perdana Hitu”, yang memerintah Hitu secara kolektif sejak pertengahan abad ke-15 itu dihapus. Di Hitu pun menjulang sebuah benteng VOC yang besar yang berkedudukan di Desa Hila dengan nama Fort Amsterdam. Beberapa benteng kecil lainnya muncul pula di beberapa desa di Hitu. Penyelesaian perang Hoamoal dilakukan dengan perantara Kaicili Sibori, seorang pangeran (Kaicili) Ternate yang dikirim oleh Sultan Hamzah sebagai utusannya dalam bulan April 1637. Sibori membawa surat dari Ternate yang memerintahkan Kimelaha Leliato untuk menghentikan peperangan. Namun Leliato menolak menyerah karena ketika itu ia berhasil mendapat bantuan ratusan pasukan dari sultan Goa di Makassar.

Perdamaian yang diprakarsai Sibori hanya berhasil dilangsungkan dengan sejumlah penguasa Ternate di Hoamoal. Penyelesaian yang tuntas baru dicapai setahun kemudian ketika van Diemen kembali ke Ambon untuk bertemu dengan sultan Hamzah yang juga bersedia ke Ambon. Namun, pada tahun 1651 peperangan kembali berkobar karena VOC menuduh Kimelaha Luhu mengadakan perdagangan gelap dengan para pedagang dari Makassar. Penggantinya, Kimelaha Majira, malah menyatakan perang pada Sultan Mandar Syah di Ternate. Perlawanan itupun dapat diatasi VOC pada tahun 1658 (Leirissa, 1974). Selanjutnya di Hoamoal pun dibangun sebuah benteng VOC untuk mencegah penyeludupan cengkeh ke Makassar. Kelanjutan dari perang antara tahun 1651 dan 1658 itu cukup penting dalam sejarah VOC. Pada tahun 1653 VOC berhasil menaklukkan Pulau Manipa yang mendukung para Kimelaha di Hoamoal.

Sebagian besar dari penduduk pulau itu diangkut ke Ambon dan ditempatkan di luar kota di suatu tempat yang dinamakan “Rodenberg” (sekarang dinamakan Batu Merah). Pada tahun 1655 beberapa dari pemuda Manipa yang kemampuan bertempurnya mengesankan VOC, diangkut ke Batavia dan kemudian digunakan oleh VOC dalam sejumlah pertempuran bersama pasukan-pasukan Bugis yang dikerahkan setelah Makassar diduduki tahun 1669. Mula-mula Raja Tahelele dijadikan “Kapitan Ambon”. Namun yang lebih penting adalah “Kapitan Jongker” legendaris itu bersama pasukan Bugis ia membantu pasukan VOC menyerang Padang, Srilangka, India, Surabaya, dan akhirnya Banten (Leirissa, 1998).

Dengan berakhirnya “perang-perang Ambon” tersebut, wewenang “Gouvernement van Amboina” mencakup pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, Buru, Jazirah Hoamoal, dan pesisir selatan Seram Barat, dengan luas areal sekitar 3668 Km (Knaap, 1987: 46).

Tujuan VOC di Maluku Tengah adalah membangun suatu daerah produksi cengkeh yang dapat diawasi sepenuhnya. Sistem ini dibatasi pada desa-desa (di Maluku Tengah disebut “negeri”) di empat pulau saja, yaitu pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut saja. Di Seram dan pulau-pulau lainnya berlaku larangan penanaman dan perdagangan cengkeh (*extierpatie*). Setiap setahun sekali terutama pada musim panen, VOC menyelenggarakan “Hongitochten” yaitu armada yang terdiri dari perahu-perahu negeri-negeri yang diperkuat kapal-kapal layar VOC untuk menebas setiap pohon cengkeh (*extierpatie*) yang dijumpai di daerah-daerah yang tidak berhak menanam cengkeh.

Penduduk di keempat pulau itu (Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut) diatur sedemikian rupa oleh VOC agar dapat melaksanakan penanaman cengkeh secara teratur. Pertama-tama setelah “perang-perang Ambon” usai, negeri-negeri yang terletak di pegunungan diperintah untuk dipindahkan ke pantai. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari pemberontakan. Kemudian berangsur-angsur sekitar 150 negeri baru itu ditata. Struktur negeri dilandasi kriteria genealogis. Keluarga (*extended family*) dalam suatu negeri dikelompokkan dalam bagian-bagian negeri yang dinamakan “soa”, sehingga setiap negeri terbagi dalam empat atau lima soa, masing-masing dengan “kepala soa”-nya. Sebagai wajib pajak, setiap keluarga (*extended family*) dinamakan *dati*. Istilah itu berasal dari bahasa-bahasa Ternate yang di Maluku Tengah diartikan sebagai pajak atau upeti, bukan dalam uang atau natura, tetapi dalam bentuk tenaga kerja. Setiap *dati* wajib menyerahkan setiap tahun satu anggotanya untuk “*heerendiensten*” selama “Hongitochten” (Knaap, 1987: 138-140).

Lahan-lahan subur dalam “pertuanan” di setiap negeri dibagikan pada kelompok-kelompok *dati* tersebut untuk ditanami dengan minimal 20 pohon cengkeh, dan dikenal sebagai “tanah *dati*”. Panen cengkeh berlangsung antara bulan November dan Desember. Sekalipun percengkehkan dianggap sebagai semacam pajak, namun panen setiap tahun dibayar oleh VOC dengan harga yang telah ditetapkan (ada yang menyamakan pembayaran itu dengan “*arbeidsloon*” di masa Tanam Paksa di Jawa). Dalam rangka menjaga kestabilan harga cengkeh di bursa Amsterdam, maka VOC menggunakan “*extierpatie*”

sebagai upaya mengendalikan jumlah produksi. Apabila harga cengkeh turun di Amsterdam karena persediaan terlalu besar, maka di wilayah produksi di Maluku Tengah, VOC memerintahkan untuk menebas pohon-pohon yang telah berbuah, sehingga panen berikutnya diharapkan akan menurun.

Dati atau pajak dalam bentuk tenaga kerja tidak saja dikenakan pada perkebunan, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan VOC. Salah satu kegiatan itu adalah “Hongitochten”, suatu institusi yang juga terdapat di Maluku Utara. Seperti halnya di Maluku Utara, setiap negeri di keempat pulau tersebut (Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut) diharuskan setiap saat menyiapkan sebuah “arumbay” (rembaya) untuk berpartisipasi dalam “Hongitochten” yang diselenggarakan oleh Gubernur sekali setiap tahun, terutama pada musim panen cengkeh. Setiap dati atau keluarga wajib pajak bergiliran untuk menjadi pengayuh atau pasukan di arumbay negeri tersebut. Bentuk dati lainnya adalah apa yang dikenal sebagai “kwarto dienen” yaitu kewajiban penduduk untuk memelihara bangunan-bangunan yang terdapat dalam negeri yang bersangkutan, seperti benteng, sekolah, gereja, baileu (balai musyawarah), dan lain-lain. Termasuk juga kewajiban mengantar pos atau barang-barang VOC dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian masih ada apa yang dinamakan “negeridiensten” yaitu kewajiban menyerahkan tenaga kerja pada waktu-waktu yang telah dijadwalkan untuk kepentingan kepala desa (membersihkan kebunnya, dan lain-lain).

Sistem perkebunan cengkeh di Maluku Tengah yang dibangun VOC rampung dalam bagian kedua abad ke-17. Dengan demikian rampunglah peralihan produksi cengkeh dari Maluku Utara ke Maluku Tengah. Sejak itu produksi cengkeh untuk pasar dunia hanya berasal dari Maluku Tengah. VOC pun berhasil menjadi satu-satunya eksportir cengkeh untuk pasar dunia. Baru pada akhir tahun 1770 pihak Prancis (khususnya oleh Provost, pembantu dari Pierre Poivre) dapat menyeludupkan anak-anak pohon cengkeh dari Pulau Gebe di Laut Halmahera dan negeri Patani di Pulau Halmahera dan menanamnya di Pulau St. Maurits dan Pulau Renunion, dan kemudian menyebar ke Pulau Zanzibar. Inggris pun mengusahakannya di Pulau Penang dan Bengkulu.

Gouvernement van Amboina yang berpusat di Ambon tidak saja meliputi keempat pulau (Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut) penghasil cengkeh itu, tetapi juga Pulau Buru dan pesisir Seran Barat (termasuk Jazirah Hoamoal). Seluruh wilayah itu dibagi dalam 7 distrik, yang dinamakan sesuai nama benteng di mana kepala distriknya bemarkas. Pulau Ambon dibagi 3 distrik yaitu Distrik Victoria, Distrik Amsterdam (yang juga mencakup Hoamoal) dan

Distrik Rotterdam. Di sebelah timurnya terdapat dua distrik yaitu Distrik Zeelandia di Hakuku yang juga mencakup pesisir Seram Barat, dan Distrik Hollandia di Saparua yang juga mencakup pesisir Seram Timur. Di sebelah barat Ambon terdapat dua distrik, yaitu Distrik Wantrouw di Pulau Manipa (yang juga mencakup pulau-pulau Kelang dan Boano) dan Distrik Oostburg di Namlea yang mencakup pesisir barat Pulau Buru (Knaap, 1987: 30). Secara berangsur-angsur muncul suatu birokrasi VOC yang mencakup seluruh wilayah tersebut. Namun inti dari birokrasi itu terdapat di lima distrik produsen tersebut (Victoria, Amsterdam, Rotterdam, Zeelandia dan Hollandia). Selain itu, terutama di distrik-distrik penghasil cengkeh masih terdapat benteng-benteng kecil (redout) yang juga dilengkapi tentaranya. Jumlah benteng di Maluku Tengah pada masa VOC tidak kurang dari 18 benteng yang dikawal sekitar 700 anggota tentara VOC.

Tugas birokrasi VOC di wilayah produksi cengkeh adalah mengawasi pemerintahan negeri dan aparatnya, dan secara tidak langsung mengawasi pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, dan panen cengkeh yang dikepalai pemerintahan setiap kepala negeri. Pemerintah negeri diangkat oleh penduduk dengan pengesahan oleh residen dan didampingi oleh saniri negeri (dewan musyawarah negeri). Sudah sejak dini terdapat proses feodalisasi golongan pimpinan negeri tersebut. Gelar terendah dari seorang kepala negeri adalah “Orang Kaya”, kalau ia dapat menjamin kelancaran, atau peningkatan dari produksi cengkeh di wilayahnya, maka gelarnya bisa ditingkatkan menjadi “Pati” dan dapat ditingkatkan lagi menjadi “Raja”. Hanya penguasa beberapa negeri induk yang berhak langsung menggunakan gelar “Raja”. Para penguasa negeri itu dilengkapi dengan berbagai atribut, antara lain tongkat yang berkepala emas dengan lambang VOC untuk Raja, berkepala perak dengan lambang VOC untuk Pati, dan tanpa kepala untuk Orang Kaya. Selain itupun mereka berhak menggunakan payung dengan warna-warna tertentu yang menunjukkan gelarnya, dan umbul-umbul dengan warna yang sama untuk dipasang di Arumbai negeri. Banyaknya budak belian yang menjadi pengiring seorang kepala negeri juga menjadi petunjuk dari statusnya.

Sejak awal abad ke-17 VOC telah menyebarkan agama Protestan, sehingga sebagian dari penduduk yang sebelumnya beragama Katolik harus mengganti agamanya. Setiap negeri dilengkapi dengan sebuah gereja, sebuah sekolah dan gurunya. Kalau kepala negeri berasal dari negeri yang bersangkutan, maka para guru yang sengaja dilatih dalam sebuah seminari di Ambon tidak berasal dari negeri sendiri.

Selain negeri-negeri yang beragama Protestan, terdapat pula negeri-negeri yang penduduknya sejak pra-VOC telah beragama Islam, terutama di Pulau Ambon (Jazirah Hitu) dan di Pulau Haruku bagian barat. Di negeri-negeri yang penduduknya menganut agama Islam dilengkapi masjid, surau dan sistem pendidikannya.

Bahasa Melayu, yang sudah dikenal sebelumnya sebagai lingua franca dalam perdagangan, juga sangat berkembang dengan pesat di era VOC. Bahasa itu terutama digunakan dalam pendidikan dan penyebaran agama Protestan di Maluku Tengah. Sebab itu, bahasa-bahasa lokal sampai kini hanya digunakan dengan aktif di negeri-negeri yang penduduknya beragam Islam. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi pula dalam komunikasi antara VOC dengan negeri-negeri Islam, walau aksara yang digunakan adalah aksara Arab.

Masyarakat Maluku Tengah relatif aman dan tenteram sepanjang abad ke-18. Pemberontakan Pattimura pada tahun 1817 lebih banyak terkait dengan pergantian kekuasaan dari pihak Inggris kembali pada pihak Belanda (Hindia Belanda). Sebab itu, suatu pertanyaan apakah dalam masa VOC sistem perkebunan cengkeh tersebut menguntungkan atau memiskinkan penduduk Kepulauan Ambon-Lease. Apakah sistem ekonomi wilayah itu yang bersifat monokultur dan khusus ditujukan untuk pasar yang demikian jauh letaknya di Eropa, tidak menyebabkan wilayah itu menjadi tergantung pada ekonomi pasar dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu faktor-faktor produksi yang terkait dengan percengkeh di masa VOC.

Menurut Gerrit J. Knaap bahwa faktor-faktor produksi yang terkait dengan percengkeh di masa VOC yaitu:

- a Keseluruhan luas areal lahan pertanian
- b Luas areal yang digunakan untuk cengkeh (tanah datar)
- c Jumlah tenaga kerja yang memproduksi cengkeh

Sebagai pembandingnya perlu ditentukan bentuk dan jumlah produksi bahan makanan oleh penduduk, sehingga dapat ditentukan apakah percengkeh menimbulkan masalah pangan atau tidak. Pendapatan yang diperoleh penduduk dari penjualan panen cengkeh juga perlu diketahui. Seluruh unsur-unsur tersebut dikwantifikasi dengan teliti oleh Knaap berdasarkan arsip VOC yang dipelajarinya di ARA Den Haag. Luas wilayah Gouvernement van Amboina sekitar 3668 Km. Luas distrik-distrik yang memproduksi cengkeh adalah 1107 Km yang terdiri dari: Pulau Ambon seluas 753 Km; Pulau Haruku seluas 172

Km; Pulau Saparua seluas 157 Km; dan Pulau Nusalaut seluas 25 Km. Menurut perhitungan Knaap, ternyata hanya sebagian kecil saja dari total areal lahan di keempat pulau penghasil cengkeh itu yang benar-benar ditanami cengkeh. Dengan mengambil contoh dari data tahun 1692 Knaap menunjukkan bahwa hanya 37,8 Km atau 3,4% digunakan untuk percengkeh di keempat pulau itu. Khusus untuk Pulau Ambon saja jumlah lahan yang digunakan untuk cengkeh hanya 2,5%, dan untuk Pulau-Pulau Haruku dan Saparua 5,4%. Hanya di Pulau Nusalaut jumlah lahan yang digunakan sangat besar yaitu 44,8% (Knaap, 1987: 257). Sedangkan tenaga kerja yang digunakan dalam mengerjakan tanah-tanah dati itu tidak saja berasal dari keluarga masing-masing pemilik dati, tetapi tenaga budak belian juga digunakan dan mencakup sekitar 5000 hingga 7000 orang yaitu hingga 13% dari seluruh tenaga kerja. Imbalan uang yang diterima penduduk dikalkulasikan sebagai berikut: untuk setiap kilogram cengkeh penduduk menerima f 0.60, belum dipotong pajak untuk kepala desa dan ongkos angkut. Diperkirakan bahwa pada masa panen setiap orang bisa menerima sekitar f 4.

VOC sendiri mendapat keuntungan yang sangat besar dari perdagangan cengkeh di Eropa. Di pasar dunia untuk setiap kilogram cengkeh VOC menerima antara f 7.50 sampai f 10.42 (nilai 1970-an). Selain itu, sistem percengkeh tidak menghalangi penduduk mengusahakan bahan makanannya karena lahan pertanian masih terbuka lebar dalam setiap pertuanan negeri. Makanan pokok yaitu sagu tidak banyak memerlukan tenaga kerja, dan setiap pohon sagu bisa memberi makan bagi satu orang selama satu tahun. Negeri-negeri yang kekurangan lahan sagu dapat memperolehnya (beli atau mendapatkannya melalui institusi (pela) dari Seram Barat. Selain itu ikan dari laut juga melimpah, dan perburuan juga masih sangat umum ketika itu. Untuk kepentingannya sendiri VOC mengimpor berbagai bahan kebutuhan dari Jawa, seperti beras, garam dan arak. Demikian pula berbagai bahan tekstil yang diimpor dari Koromandel, India. Penduduk yang memerlukannya juga bisa membelinya di benteng-benteng VOC dengan uang yang mereka terima dari hasil panen cengkeh. Dalam masa VOC tidak terdapat kondisi sosial ekonomi yang dikenal sebagai “ekonomi dualis”. Kenyataannya adalah bahwa produksi cengkeh untuk pasar dunia terintegrasi dengan sempurna dengan “subsistence economy”, sehingga apa yang kemudian dikonsepsikan sebagai “ketergantungan” (dependencia) juga tidak terdapat di Maluku Tengah masa VOC. Meskipun sejak pertengahan abad ke-17 VOC telah berhasil menguasai daerah produksi cengkeh, namun masih ada celah-celah yang mengganggu monopoli perdagangan.

Celah utama adalah kota pelabuhan Makassar yang termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan kembar Goa-Tallo yang muncul awal abad ke-16. Makassar mencuat sebagai kota pelabuhan yang penting bersama dengan Banten, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Perdagangan makin meningkat di Makassar karena sekelompok pedagang Melayu menjadikannya sebagai basis perdagangannya dengan Maluku. Islam pun diperkenalkan oleh para pedagang Melayu yang berhasil mendapat hak-hak istimewa dalam soal dagang dari sultan. Karena itu tidak mengherankan kalau VOC melihat Makassar sebagai pusat “perdagangan gelap”. Perahu-perahu dagang dari Makassar berhasil menembus blokade dan pengawasan VOC dan memasuki teluk dan muaramuara sungai di Hitu dan Hoamoal untuk membeli cengkeh yang kemudian dijual kembali kepada para pedagang Inggris, Prancis, dan Denmark yang berkedudukan di kota pelabuhan itu. Usaha VOC untuk menghalangi kegiatan itu senantiasa gagal, karena penduduk lokal pun menggunakan kesempatan itu untuk menjual cengkeh dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibayar VOC.

Situasi itu meningkat dengan drastis semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1654-1669). Pada masa itu Goa-tallo mengalami zaman keemasannya. Kemajuan tidak hanya tampak pada perdagangan, tetapi juga kebudayaan. Petinggi kerajaan yang sangat terpelajar ketika itu adalah Pattingaloo yang memahami beberapa bahasa asing dan tertarik pada ilmu pengetahuan Barat. Maka akhirnya VOC memutuskan untuk menghancurkan kota pelabuhan itu dan kekuasaan politik Goa-Tallo. Alasan yang dikemukakan untuk menyerang Makassar adalah soal tawan karang. Pada tahun 1666 Admiral Cornelis Speelman memimpin suatu armada yang diperkuat dengan pasukan Aru Palakka dari Bugis dan Pasukan Kapitan Yongker. Perang berkobar hingga tahun 1669. Dalam perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada 1667 Goa-Tallo setuju untuk melarang semua pedagang asing berdiam di Makassar. Selain itu, Goa-Tallo juga diharuskan untuk melepaskan kekuasaannya atas pulau-pulau di Nusatenggara. Selanjutnya VOC mendirikan sebuah benteng di Makassar, yaitu Kasteel Rotterdam, untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bungaya itu. Sejak itu pula “perdagangan gelap yang berpusat di kota pelabuhan itu juga menurun drastis. VOC menempatkan seorang gubernur di Makassar dengan wewenang atas “Gouvernement van Makassar”.

2.8.2 Pala dan Fuli dari Banda

Berbeda dengan cengkeh, pala (*myristica fragrans*) dan fuli (kulit dari biji pala) agak lambat memasuki perdagangan dunia. Baru sejak abad ke-14 pala dan fuli

menjadi bagian yang penting dari perdagangan antar benua. Sejak terbentuknya emporium Malaka perdagangan pala dan fuli didominasi oleh para pedagang dari Jawa, Melayi, dan dari Banda sendiri. Orang Portugispun menyusul tidak lama kemudian dan sejak akhir abad ke-16 para pedagang Belanda juga menemukan jalan laut menuju Banda. Setelah para pedagang Belanda menemukan jalan laut ke Banda, dalam strategi Matelief, Kepulauan Banda pun harus dikuasai VOC. Dalam rangka menegakkan monopoli pala dan fuli di Banda, VOC harus berperang cukup lama. Kalau di Kepulauan Maluku Tengah, VOC hanya menghadapi saingan-saingan lokal (Ternate, Hoamoal, Hitu), di Kepulauan Banda pertarungan senjata itu bersifat internasional, karena Inggris (EIC) juga berusaha menegakkan monopoli di wilayah Kepulauan Banda.

Kepulauan Banda adalah istilah untuk sejumlah pulau, di antaranya yang terbesar adalah Banda Besar yang oleh orang-orang Eropa dinamakan Lonthor yang menjadi pusat perdagangan pala dan fuli sejak abad ke-14. Pulau itu menghasilkan pala dalam jumlah yang paling banyak. Kemudian menyusul Pulau Banda Neira yang lebih kecil, tetapi di masa VOC menjadi yang paling penting. Dua buah pulau lainnya yang jauh lebih kecil adalah Pulau Ai dan Pulau Run yang terletak di sebelah barat Banda Neira dan diselang oleh Pulau Gunung Api. Rangkaian Kepulauan Banda itu sesungguhnya merupakan jajaran gunung-gunung yang menjulang dari lautan yang ribuan meter dalamnya. Namun, ekosistemnya menyebabkan hanya pulau-pulau itu yang dapat menghasilkan pala (setelah masa VOC pala ditanam pula di Kepulauan Karibia, tetapi mutunya jauh lebih rendah).

Berbeda dengan di Maluku Utara, penduduk Pulau Banda yang dalam abad ke-17 berjumlah sekitar 15.000 jiwa, tidak membentuk organisasi politik yang mencakup wilayah-wilayah yang lebih luas daripada sebuah desa. Bahkan federasi antar desa di suatu pulau pun tidak pernah terbentuk. Masing-masing desa berdiri sendiri dan diperintah oleh seorang pejabat yang dinamakan "Orangkaya", dan kepentingan utama Orangkaya adalah perdagangan pala dan fuli. Keadaan politik itulah yang menyebabkan VOC sulit mencapai suatu kesepakatan dengan seluruh penduduk Kepulauan Banda mengenai perdagangan pala, karena bila satu pihak menandatangani sebuah kontrak dengan VOC, tidak ada alasan bagi pihak-pihak lain untuk mematuhi. Perdagangan pala dan fuli mungkin sekali berawal dengan para pedagang Cina. Kemudian, seperti juga di Maluku Utara, menyusul para pedagang dari Timur Tengah yang juga membawa Islam. Dalam abad ke-14 para pedagang dari Jawa dan Melayu menjadi dominan karena koneksi mereka dengan Malaka. Bahkan,

orang-orang Makassar-Bugis pun kemudian tertarik pada perdagangan pala. Sebab itu tidak mengherankan kalau desa-desa yang menjadi pusat perdagangan di Pulau Lonthor atau di Pulau Banda Neira bersifat kosmopolitan. Perdagangan internasional itu berlangsung dengan bebas, tanpa ada usaha pihak manapun untuk menegakkan monopoli. Pihak Portugis yang telah bercokol di Ternate sejak tahun 1522 juga tidak berusaha menegakkan sistem monopoli seperti di Ternate. Pada tahun 1529 mereka memang mencoba membangun sebuah benteng di Neira, tetapi karena satu dan lain sebab pembangunan benteng itu dihentikan. Pihak misionaris memang giat juga di Kepulauan itu, terutama di Neira.

Sebelum VOC dibentuk, orang Belanda dari perusahaan dagang *Compagnie van Verre* telah berdagang di Kepulauan Banda. Pada tahun 1599 sejumlah kapal dagang Belanda dari perusahaan yang dipimpin Laksamana Muda Jackop van Heemskerck berlabuh di Desa Ortatan di Banda Besar untuk membeli pala. Dua tahun kemudian 1601, kapal dagang Inggris pimpinan James Lancaster berlabuh di Pulau Run. Sejak itu Kerajaan Inggris mengklaim kekuasaannya atas pulau itu, dan tidak bersedia melepaskannya hingga tahun 1667. Selama itu berlangsung persaingan dalam bentuk perang antara VOC dan EIC untuk menguasai kepulauan pala itu. VOC memilih untuk membangun kedudukannya di Pulau Neira. Sebuah benteng Portugis yang belum selesai dibangun pada tahun 1527 di kaki sebuah bukit itu dirampungkan dan diberi nama Fort Nassau. Beberapa tahun kemudian, 1611 VOC membangun sebuah benteng yang jauh lebih besar di puncak bukit tersebut yang memberi pandangan luas ke segenap penjuru. Benteng yang diberi nama Belgica dengan tebal tembok sekitar 23 meter itu dapat menampung meriam-meriam besar untuk melindungi kota Banda Neira dari ancaman serbuan Inggris. Selain itu pada tahun 1612 VOC berhasil merebut benteng Inggris di Pulau Ai yang diberi nama Fort Wraak (balas dendam). Hanya benteng Inggris di Pulau Run tidak berhasil direbutnya. Kehadiran EIC di Pulau Run yang menyaingi VOC di Neira dan Lonthor nampaknya menguntungkan orang-orang Banda. Perdagangan dapat dilakukan dengan kedua belah pihak, walau selalu terancam.

Selain itu, para pedagang dari Nusantara seperti orang-orang Jawa, Melayu dan Makassar, juga tetap berdagang sekalipun harus sangat berhati-hati agar tidak tertangkap oleh VOC. Dengan demikian sulit bagi VOC untuk menegakkan hak monopoli yang telah diperolehnya dari beberapa Orangkaya Lonthor pada bulan Mei 1602. Ternyata kemudian para Orangkaya Lonthorlah yang paling membangkang terhadap upaya penegakan monopoli oleh VOC. Maka pada

tahun 1609 Batavia mengirim sebuah armada dan pasukan untuk menakhlukkan Lonthor. Usaha tersebut gagal, bahkan pimpinan armada itu, Admiral Verhoven, gugur bersama 25 tentara VOC lainnya dalam suatu jebakan yang diatur orang Lonthor.

Gubernur Jan Pieterszoon Coen (1619-1623; 1627-1629) yang menganut aliran keras dalam menegakkan monopoli, kemudian memutuskan bahwa Kepulauan Banda harus direbut dan dikosongkan dari penduduk setempat. Pada awal tahun 1621 ia memimpin sendiri sebuah armada VOC yang terdiri dari 13 kapal layar besar dan sekitar 40 buah perahu jung, yang diperkuat oleh sekitar 1600 tentara VOC ditambah 300 orang Jawa yang tertawan ketika Coen merebut Jayakarta pada tahun 1619, serta sekitar 500 pasukan sewaan Jepang (samurai). Mereka kemudian diperkuat oleh sekitar 250 tentara VOC yang terdapat di Fort Belgica, sehingga jumlah seluruh pasukan yang digunakan Coen adalah 2650 orang. Armada dan pasukan yang demikian besar memang belum pernah sebelumnya muncul di Banda. Serangan Coen terutama tertuju pada Pulau Lonthor. Dalam satu bulan perlawanan Lonthor dapat dipatahkan dan penduduk melarikan diri ke pegunungan. Coen lalu memerintahkan pembangunan sebuah benteng di Lonthor yang diberi nama Fort Hollandia. Sementara menunggu selesainya pembangunan Fort Hollandia, pimpinan pasukan di Lonthor, Kapten t'Sonck menempati rumah milik Orangkaya Lonthor dan menempatkan markasnya di masjid Lonthor. Tugasnya adalah mengumpulkan kembali penduduk Lonthor yang telah melarikan diri ke pegunungan untuk ditugaskan mengumpulkan pala bagi VOC.

Pelanggaran-pelanggaran dan para pembangkang dihukumnya dengan sangat kejam, antara lain pemenggalan kepala oleh para samurai Jepang. Pada tanggal 21 April 1621 terjadi suatu kecelakaan yang membawa malapetaka bagi penduduk Lonthor. Malam itu t'Sonck memutuskan untuk tidur di masjid yang telah dijadikan markasnya itu. Entah bagaimana, tiba-tiba lampu gantung jatuh berantakan di tanah. Dan keadaan segera berubah menjadi panik. Seorang bocah yang disiksa terpaksa harus mengiyakan, bahwa lampu itu sengaja dijatuhkan sebagai tanda mulainya pemberontakan. t'Sonck pun mengerahkan pasukannya untuk menawan penduduk dan membakar rumah-rumah mereka. Penduduk di desa-desa lain pun melarikan diri ke pegunungan, tetapi terus dikejar oleh pasukan VOC. Sekitar 2500 orang meninggal karena kelaparan dalam hutan, dan hanya sekitar 300 orang yang berhasil melarikan diri dengan perahu (Corn, 1998: 191-194).

Sebagian dari penduduk Lonthor dapat ditangkap. Coen lalu memutuskan untuk mengangkut mereka ke Batavia. Rombongan pertama yang berangkat berjumlah 883 orang yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak. Dari sekitar 15.000 orang yang mendiami Kepulauan Banda itu, hanya 1000 orang yang lolos dari maut karena berhasil melarikan diri ke Pulau Ai untuk mencari perlindungan pada EIC. Sekitar 45 Orangkaya Lonthor yang dituduh terlibat dalam persekongkolan untuk berontak diangkut ke Neira dan dipenjarakan di Fort Nassau (seorang terjun ke laut tetapi meninggal). Mereka disiksa dengan sangat keji sehingga terpaksa mengaku apa yang dituduhkan kepada mereka. Berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh Coen, pada bulan Mei 1621 ke-44 Orangkaya tersebut dihukum pancung di benteng itu oleh 6 orang samurai Jepang (Rorn, 1998: 194)

Permasalahan yang agak menyulitkan VOC adalah Inggris di Pulau Run. Kalangan-kalangan tertentu dalam EIC masih tetap berharap bahwa koloni pertama milik Inggris itu dapat dijadikan sumber penghasilan juga. Namun upaya itu nampaknya sia-sia, sekalipun kapal layar EIC berkali-kali mengunjungi pulau itu pada tahun-tahun 1636, 1638, dan 1662. VOC mulai berhasil menduduki pulau itu sampai tahun 1665 ketika berhubungan dengan dikeluarkannya "Navigation Act", VOC menyerahkan kembali pulau itu kepada Inggris. Persoalan terakhir berkaitan dengan perdamaian yang tercapai antara Belanda dan Inggris pada 1667. Dalam Perjanjian Perdamaian Breda yang ditanda tangani tahun itu, Pulau Run berpindah tangan lagi, Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, dan sebagai imbalannya Belanda menyerahkan sebuah koloni mereka di sebuah pulau di muara sungai Hudson yang dibangun oleh Pieter Stuyvesant pada tahun 1627. Pulau itu kini dikenal sebagai Manhattan, salah satu pusat dari Kota New York. Run sebaliknya hingga kini tetap menjadi pulau yang dihuni sejumlah nelayan yang sangat sederhana hidupnya.

Permasalahan yang dihadapi VOC selanjutnya di Kepulauan Banda adalah bagaimana melanjutkan perdagangan pala dan fuli. Sekembali di Batavia, Coen mengumumkan, bahwa setiap pegawai VOC diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan untuk meminjam sebidang tanah di Kepulauan Banda untuk meneruskan perkebunan pala. Sebagian besar dari pegawai VOC yang menyambut ajakan itu berasal dari Batavia dan Ambon. VOC memutuskan untuk membagi-bagi kebun-kebun pala di Kepulauan Banda dalam 68 petak yang dinamakan perken yang akan dikelola oleh minimal 34 dan maksimal 68 perkenir, karena tidak tertutup kemungkinan ada yang bersedia mengelola lebih

dari satu perk. Luas setiap perk adalah 635 roeden atau 3250 m² (3,25 Km²). VOC akan mengusahakan tenaga kerja budak untuk setiap perk sebanyak 25 orang. Pulau Banda Neira mendapat jatah yang paling sedikit, yaitu 3 petak, karena di pulau itu dibangun ibukota dari “Gouvernement van Banda”. Pulau Lonthor dibagi dalam 34 petak dan di Pulau Ai 31 petak. Pulau Run dibiarkan kosong. Dari setiap perk VOC memungut pajak sebanyak 625 dollar Spanyol (spaansche matten), karena diperkirakan hasil dari setiap roeden adalah 25 dollar Spanyol. Selain itu, masih ada lagi beberapa pungutan seperti “sepersepuluh”. Masalah jumlah pajak tersebut kemudian menjadi salah satu pangkal persengketaan antara para Perkenier dan VOC (Hanna, 1983: 64-65).

Di Pulau Banda Neira muncul suatu kota yang sangat khas bagaikan sebuah kota Belanda di tengah-tengah iklim tropis. Rumah-rumah Perkenier berjejer dengan teratur dan diselang-seling oleh jalan-jalan lebar dan rindang karena pepohonan di kanan dan kiri jalan itu. Arsitektur rumah-rumah dan tempat ibadah mengikuti arsitektur Belanda abad ke-17. Namun, seperti halnya di Batavia, rumah-rumah perkenier itu ada unsur “Indischnya”, yaitu atap yang menjulang keluar untuk menghalang terik matahari. Masyarakat Perkenier pun merupakan suatu masyarakat Indisch tetapi dengan ciri-ciri yang agak lain daripada yang terdapat di Batavia, Ambon, Makassar dan lain-lain kota sejaman. Mendatangkan wanita dari Negeri Belanda, walau sudah dicoba oleh Coen, tidak banyak berhasil. Sebab itu, banyak Perkenier menikah dengan para budaknya, setelah mereka menjadi Kristen. Ketika itu budak-budak tidak saja didatangkan dari Nusantara, tetapi juga dari Malaya, Cina, Mozambik, Jepang, Koromandel, Benggala, Pegu, dan lain-lain (Hanna, 1983: 68). Dengan demikian muncul suatu masyarakat meztizo yang khas.

Salah satu ciri yang sangat menarik perhatian orang luar adalah temperamen para Perkenier. Pertikaian sering muncul antara para Perkenier dan antara Perkenier dengan pejabat VOC. Hidup bersama-sama gadis budak yang dijadikan anak angkat merupakan hal yang umum dan perselingkuhan merajalela. Kriminalitas juga paling banyak terjadi. Seorang pegawai VOC asal Jerman yang bertugas di Banda antara 1633 hingga 1638 melaporkan bahwa dalam lima tahun itu ia menyaksikan dilaksanakannya hukum mati sampai 25 kali dengan cara dibakar hidup-hidup, diremuk dengan roda, digantung dipenggal kepalanya, dan ditembak dengan meriam. Selain itu, pegawai tersebut juga menyaksikan tidak kurang dari 50 kali pelaksanaan hukuman yang lebih ringan seperti pemotongan anggota badan, dicambuk, dipukul, dirantai, dipecat dan dibuang ke pulau lain. Menurut keterangan pegawai asal Jerman tersebut,

jumlah penduduk Kepulauan Banda dalam tahun 1630-an itu adalah 3.843 jiwa. Komposisi penduduk itu adalah sebagai berikut:

- a Pegawai VOC berjumlah 351 jiwa
- b Sipil Belanda hanya 91 orang, sudah termasuk para Perkenier
- c Wanita Belanda 22 orang
- d 77 anak yang orang tuanya adalah campuran
- e Pribumi Banda berjumlah 560 orang yang terdiri dari kaum laki-laki 103 orang (53 orang di antaranya budak), kaum wanita 291 (158 orang di antaranya budak), dan 166 anak (69 di antaranya budak).
- f Orang asing 2.743 jiwa, kebanyakan Cina yaitu laki-laki 968 orang (782 di antaranya budak), wanita 1.042 orang (732 di antaranya budak), dan 733 anak (405 di antaranya budak) (Hanna, 1983: 71-72).

Berdasarkan angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahun 1630-an jumlah budak lebih banyak daripada jumlah orang bebas (yaitu 2.555 dan 1.284), orang Belanda (190 jiwa) lebih sedikit dari pribumi (560 jiwa) dan orang asing (2.743 jiwa).

Menurut Willand A. Hanna, salah satu penyebab pertikaian antara para Perkeniers dan pejabat-pejabat VOC di Kepulauan Banda adalah soal pajak. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa masalah yang lebih serius dan terkait dengan soal pajak itu adalah politik harga yang diterapkan VOC di Kepulauan Banda. Seperti halnya di Maluku Tengah, dalam situasi harga rempah-rempah jatuh di bursa Amsterdam, maka VOC memutuskan untuk mengurangi jumlah produksi dengan cara "extierpatie". Politik harga sudah tentu diberlakukan juga di Kepulauan Banda, tetapi belum jelas cara-cara yang digunakan.

2.8.3 Lada dari Sayap Kanan

Berbeda dengan cengkeh dan pala, lada bukan tanaman asli dari Nusantara. Jenis lada yang diperdagangkan secara internasional adalah lada hitam (piper nigrum) yang berasal dari Kerala di pantai Malabar (India). Sebelum abad ke-14, para pedagang India dan Arab telah memperdagangkannya. Melalui jalur Timur Tengah lada juga tiba di Eropa via kota-kota dagang di Italia. Peningkatan perdagangan di Asia Tenggara sejak abad ke-15 mungkin bertalian dengan menyebarnya ke Samdra dan Pasai di Sumatera Utara, dan kemudian menyebar juga ke daerah Minangkabau, Palembang, Jambi, Lampung dan Banten. Sejak

awal abad ke-16 Sultan Ali Mughayat Syah dari Aceh muncul sebagai kekuasaan terbesar di Sumatera Utara dengan bantuan Kerajaan Turki-Ottoman. Bersamaan dengan itu pula produksi lada di pesisir pantai Sumatera Timur dan Barat dapat dikendalikan oleh Aceh. Karena lada juga diperdagangkan di Semenanjung Malaya, maka saingan yang paling kuat dari Aceh ketika itu Johor. Tetapi Portugis yang menguasai Malaka sejak 1511 juga dilihat sebagai penghalang kepentingan Aceh. Aceh berkali-kali berusaha menakhlukkan kedua kekuasaan itu tanpa berhasil.

Dalam situasi yang demikian, muncullah VOC. Orang-orang Belanda pertama yang muncul di Aceh sesungguhnya adalah kakak-beradik de Houtman (Frederick dan Cornelis) yang tiba di Banda Aceh sebelum VOC terbentuk pada tahun 1599. Tingkah laku orang-orang Belanda itu ternyata tidak menyenangkan Aceh, sehingga kakak beradik de Houtman ditangkap dan dipenjara. Frederick meninggal dalam penjara, tetapi Cornelis menggunakan waktunya dalam tahanan untuk menulis kamus pertama Belanda-Aceh. Namun, hubungan Aceh dan VOC ternyata lebih baik. Pada tahun 1602 Aceh mengirim utusan-utusannya ke Negeri Belanda untuk bertemu dengan pangeran Mauritz yang sedang memerangi Spanyol di negerinya. Kelanjutan dari misi diplomatik itu adalah ditandatanganinya kontrak monopoli lada dengan imbalan bantuan VOC terhadap Portugis di Malaka.

Selama masa pemerintahannya Iskandar Muda (1607-1636) Aceh berusaha keras untuk mempertahankan persekutuan dengan VOC. Situasi politik di Selat Malaka tersebut dimanfaatkan oleh VOC demi kepentingan dagangnya. Kecuali aliansi dengan Aceh, VOC juga berhasil mengadakan aliansi dengan Johor. VOC juga berhasil mengadakan kontrak pembelian lada dengan Palembang (1659) dan Jambi (1687). Namun, sepeninggal Iskandar Muda, kerajaan Aceh menjadi lemah sehingga tidak aktif lagi dalam percaturan politik di Selat Malaka. Serangan ke Malaka yang dilancarkan VOC pada tahun 1641 hanya dibantu oleh Johor. Kemunduran Aceh itu memberi kesempatan kepada para pedagang lada di Minangkabau untuk melepaskan monopoli Aceh dengan cara mengadakan hubungan monopoli dengan VOC pada tahun 1663. Meskipun pemasukan lada dari Sumatera sudah terjamin, namun VOC belum mampu mencapai monopoli. Kota pelabuhan Banten yang berdiri awal abad ke-16 adalah saingannya yang utama. Kedudukan Banten menjadi sangat penting dalam abad ke-17 karena para pedagang Inggris (EIC), Prancis (Compagnie des Indes) dan Denmark (Denish East India Compagnie) diizinkan mendirikan markas perdagangannya di tempat itu. Juga para pedagang dari Cina menjadikan

Banten sebagai pelabuhan perantara. Masa keemasan Banten adalah zaman pemerintahan Sultan Abdullah Ageng (1653-1683). Perdagangan bukan saja meningkat, tetapi sultan pun ikut berdagang dengan mengirim kapal-kapal layarnya sampai ke Cina dan Parsi. Seperti halnya di Makassar, Sultan Ageng juga memanfaatkan orang-orang Barat yang tidak bersahabat dengan VOC untuk membangun kotanya dan tentaranya. Istana Tirtayasa yang dibangun seorang Belanda, nampak bagaikan sebuah kota di Negeri Belanda dengan kanal-kanal dan jalan-jalannya yang lurus (De Jong, 1998: 70).

Sementara itu VOC mencari berbagai alasan untuk menghancurkan kota pelabuhan Banten. Kesempatan itu muncul ketika terjadi pertikaian intern kerajaan. Pada tahun 1680 Sultan Ageng berselisih dengan putra mahkotanya, Abdulfatah. Putra mahkota mencari dukungan Batavia, dan Batavia merangkul kesempatan itu. Setelah serangan pertama gagal, pasukan VOC yang dipimpin Kapitan Yongker dengan pasukan Ambon dan Bugisnya akhirnya menduduki Istana Tirtayasa. Abdulfatah yang naik menjadi sultan menandatangani perjanjian monopoli dengan VOC. Selain tidak mengizinkan lagi para pedagang asing memasuki Banten, lada dari Banten dan Lampung selanjutnya hanya dijual pada VOC.

Berdasarkan strategi yang ditempuh VOC dalam menegakkan monopoli perdagangannya di Nusantara dapat disimpulkan bahwa VOC adalah badan dagang yang menggunakan senjata (*armed trade*) dan yang membangun birokrasi (*bureacratic trade*). Penilaian yang sejalan tetapi lain rumusnya adalah dari Reinout Vos yang menyelidiki perdagangan timah yang dilakukan VOC di Selat Malaka di bagian kedua dari abad ke-18. Ia melihat VOC sebagai makhluk bermuka dua yang di dunia Barat sering disebut “Janus Face”. Pada satu sisi, VOC di Belanda adalah sebuah perusahaan dagang terhormat, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, semboyan “*mare liberium*” (laut terbuka) dari Hugo de Grood menjadi patokan utama di Eropa. Tetapi di Asia, khususnya di Nusantara VOC memiliki wajah lain yang bertentangan. VOC di Asia bukan saja organisasi dagang tetapi juga organisasi politik, bukan “*mare liberium*” yang menjadi sembojannya di Asia tetapi “*mare clausum* (laut tertutup).

Penilaian seorang ahli sejarah lain, J.J.P. de Jong, agak berbeda tetapi memperjelas konsep “*armed trade*” tersebut. De Jong mengemukakan bahwa ciri utama VOC yang membedakannya dengan cara berdagang di Asia adalah keunggulan teknologi maritim dan teknologi militernya. Ahli sejarah itu berpendapat bahwa penguasa lokal menafsirkan ‘kontrak-kontrak’ atau

perjanjian tertulis mereka yang buat dengan VOC sesuai kepentingan sendiri. Bagi para penguasa lokal tersebut, perjanjian dagang dengan VOC yang mereka buat itu lebih banyak berkaitan dengan kepentingan politik daripada kepentingan dagang. Namun de Jong berbeda pendapat dengan para ahli sejarah kolonial dari masa lampau, yang menafsirkan kehadiran VOC di Asia, khususnya di Indonesia, sebagai suatu bentuk kolonialisme, di mana VOC mendominasi, bahkan menguasai seluruh Indonesia. Kritik de Jong itu ditujukan pada penafsiran mengenai hubungan VOC dengan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia dalam abad ke-17 dan ke-18. Hubungan yang didasarkan atas kontrak-kontrak antara VOC dan kerajaan-kerajaan tersebut, bukan hubungan kolonial (penjajahan), tetapi hubungan “aliansi”, persekutuan. Sultan-sultan atau raja-raja di Indonesia ketika itu bersedia membuat kontrak dengan VOC karena alasan kepentingan sendiri. Dari pihak VOC sudah tentu kontrak-kontrak itu juga dibuat karena alasannya sendiri pula. Biasanya kontrak-kontrak itu dibuat ketika kerajaan-kerajaan yang bersangkutan memerlukan bantuan militer dari VOC untuk menghadapi musuh-musuhnya, baik Portugis maupun kerajaan-kerajaan tetangga. Dari pihak VOC perjanjian-perjanjian itu dibuat karena kepentingan dagangnya, keinginan untuk mendapatkan hak monopoli membeli rempah-rempah. Dengan demikian, bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan VOC itu adalah perjanjian politik, sebab itu bersifat temporer. Kalau ancaman musuh telah berlalu maka perjanjian itu tidak diperlukan lagi. Bagi VOC, perjanjian itu tidak bersifat temporer, sehingga ketika kerajaan yang bersangkutan mencoba mengingkari janjinya yang menyangkut hak monopoli dagang, maka VOC menggunakan senjatanya untuk memaksakan kerajaan tersebut.

Sistem aliansi (persekutuan) itu menurut de Jong dapat bersifat ekonomi saja seperti yang dibuat di India, tetapi dapat juga bersifat politik seperti yang terdapat di Nusantara. Bentuk aliansi politik tersebut dalam kenyataannya dapat merupakan hubungan vawal, di mana penguasa lokal menyerahkan kedaulatannya kepada VOC, tetapi aliansi politik itu bisa juga berupa penyerahan hak monopoli sultan atau wilayah tertentu kepada VOC, sedangkan raja atau sultan tetap mempertahankan kedaulatannya. Kedua bentuk aliansi itu terdapat di Nusantara seperti yang dikemukakan de Jong, dalam hal Palembang, Jambi dan Banten, para penguasa kerajaan yang bersangkutan hanya menyerahkan hak monopoli dagang (yang merupakan hak prerogatif raja atau sultan) kepada VOC dengan imbalan dukungan militer terhadap musuh-musuhnya. Tetapi dalam hal Maluku ada kekeliruan kecil. Dalam masa VOC dibedakan antara Maluku (“Molukken”), Ambon dan Banda (baru sejak abad

ke-19 secara administratif Hindia Belanda menyebut ketiga wilayah itu dengan istilah Molukken. Hubungan VOC dengan masing-masing wilayah itu juga berbeda. Hubungan VOC dengan kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan (“Maluku”) adalah hubungan politik tipe pertama, yaitu kerajaan menyerahkan monopoli cengkeh sebagai imbalan perlindungan dari VOC atas ancaman Spanyol dari Manila.

Dalam hal ini urusan perdagangan cengkeh diserahkan sepenuhnya kepada VOC, tetapi kerajaan-kerajaan itu tetap berdaulat. Sebab itu setiap tahun VOC menyerahkan kepada ketiga kerajaan itu imbalan yang seharusnya diperoleh melalui perdagangan cengkeh itu, yaitu apa yang oleh VOC dinamakan “recongnitiepenningen”, atau uang tanda pengakuan atas kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut. Di Ambon dan Banda hubungan itu berbeda. Wilayah-wilayah itu ditakhlukkan oleh VOC, yaitu Banda tahun 1621 dan Ambon 1637. Di wilayah tersebut penguasa lokal melepaskan kedaulatannya, bahkan di Banda para penguasa lokal sama sekali diseingkirkan. Sistem perkebunan cengkeh di Ambon dilaksanakan oleh penduduk setempat, tetapi di Banda sistem perkebunan pala diusahakan oleh orang-orang Belanda yang dinamakan Perkeniers. Persamaannya adalah bahwa di kedua wilayah itu hasil produksi hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Dalam kedua wilayah tersebut, kekuasaan yang berdaulat adalah VOC (de Jong, 1998: 93-115).

2.9 Intervensi Politik dan Perdagangan VOC di Pasisir

Dalam pengertian Kerajaan Mataram daerah pantai utara Pulau Jawa adalah daerah “Pasisir”. Daerah Pasisir itu terbentang dari Banten hingga Surabaya. Peningkatan perdagangan di Asia Tenggara sejak abad ke-15 juga menyangkut wilayah itu. Seperti di tempat-tempat lainnya, di daerah Pasisir juga muncul kota-kota pelabuhan yang penting yang menghubungkan Indonesia Timur dengan emporium Malaka. Banten, Jayakarta, Cirebon, Demak, Jepara, Gresik, Tuban, Surabaya, Pasuruan dan lain-lain adalah kota-kota Pasisir yang mengandung unsur-unsur politik warisan Hindu dan rasionalisme dagang. Sebagian dari kota-kota pasisir itu ditemboki dengan sebuah dalem dari pangeran atau sultan yang berkuasa dan bangunan-bangunan lainnya yang

terkait, namun sejak abad ke-17 tembok-tembok itu telah dirobohkan. Kota-kota pelabuhan itu memiliki pasar-pasar, yang menjadi titik temu dari suatu jaringan pasar masing-masing di pedalaman untuk menyalurkan produksi barang konsumen dan kerajinan dari pedalaman. Namun, hubungan dengan pedalaman tidak selalu baik. Jalan-jalan yang baik praktis tidak ada, kecuali yang menghubungkan Semarang dan Keraton Kartasura (sejaka 1749 Surakarta).

Sebab itu pengangkutan barang paling banyak dilakukan dengan menggunakan kerbau, kemudian juga sapi dan kuda. Selain dari segi politik, dari segi budaya pun nampak kaitan antara kota-kota pelabuhan itu dan keraton Mataram. Mungkin juga keadaan serupa terdapat dalam masa Majapahit. Secara politik hubungan antara Mataram dan Pasisir bersifat dilematis. Banten dan Jayakarta sudah sejak awal secara politik terlepas dari Mataram, demikian pun Cirebon. Namun wilayah lain hanya mengakui hegemoni politik Mataram bila sultan Mataram berada dalam posisi yang kuat, seperti di masa Sultan Agung (1613-1646) dan Pakubuwono II (1726-1749). Dalam masa Sultan Agung umpunya seluruh daerah Pasisir, termasuk Madura ditakhlukkan melalui ekspedisi-ekspedisi militer yang berlangsung antara 1615-1625.

VOC sebagai suatu kekuatan maritim juga membangkitkan kecurigaan Sultan Agung. Sebab itu, dalam situasi demikian, loji VOC yang pertama di Gresik harus ditinggalkan ketika pasukan Mataram menduduki kota pelabuhan itu. Demikian pula loji VOC yang kedua di Jepara yang dibuka tahun 1613 terpaksa ditutup lagi tahun 1618. Hubungan Mataram dengan VOC makin memburuk sejak VOC merebut Jayakarta pada tahun 1619 dan membangun Kastel Batavia. Namun upaya Mataram untuk menaklukkan VOC dengan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629 ternyata gagal. Baru sepeninggal Sultan Agung berangsur-angsur hubungan VOC dan Mataram menjadi baik. Dalam masa pemerintahan Amangkurat II (1677-1703) malah tercapai hubungan persekutuan antara Mataram dan VOC. Sebab itu sudah sejak tahun 1651 VOC membuka kembali lojinya di Jepara yang menjadi pusat perdagangannya hingga 1677 ketika mereka dapat menyewa Semarang dari Mataram.

Kepentingan VOC di Pasisir sebelum abad ke-18 sesungguhnya tidak banyak. Ketika itu wilayah itu tidak menghasilkan komoditi untuk pasar dunia seperti rempah-rempah, VOC hanya membutuhkan beras, sayur mayur dan kayu jati dari Pasisir. Beras adalah makanan pokok dari VOC karena gandum tidak bisa diimpor dari Eropa, dan kayu jati diperlukan untuk pembangunan perumahan di Batavia dan perbaikan kapal-kapal layar VOC. Kedua komoditi itu dibelinya melalui sistem penjatahan dari para bupati setempat. Pengaturan itu memuaskan

VOC sehingga tidak ada alasan baginya untuk mengadakan intervensi karena intervensi membutuhkan biaya. Sebagai suatu perusahaan, VOC mempertimbangkan dengan hati-hati semua pengeluaran yang tidak menguntungkan. Bahkan ketika VOC terpaksa harus mengadakan intervensi politik atas permintaan Mataram, biaya perang dibebankan kepada Mataram. Dengan demikian intervensi VOC di Pasisir, yang berlangsung antara 1677 hingga 1743, bukan karena kepentingan perdagangan internasional, seperti di Maluku atau di Sumatera dan Banten. Proses intervensi itu dilakukan berdasarkan permintaan para sultan Mataram sendiri yang memerlukan dukungan senjata VOC untuk mengalahkan saingannya di keraton atau kekuasaan-kekuasaan tandingan yang terutama terpusat di Jawa Timur dan Madura. Bentuk dan sifat intervensi itu sangat rumit, sehingga memerlukan penelitian kearsipan yang teliti. Akhir-akhir ini ada beberapa studi yang menarik telah muncul mengenai hubungan VOC dan Mataram dan peranannya di Pasisir yang mengoreksi hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka sejarah kolonial di masa lampau (Hindia Belanda). Karya ahli sejarah Australia M.C.

Ricklefs mengenai Mataram periode Kartasurya masa 1677 hingga 1726 melengkapi penelitiannya mengenai proses pembentukan kerajaan Yogyakarta. Ricklefs sebenarnya tidak mempelajari masyarakat Pasisir dan kaitannya dengan perdagangan VOC. Ia mempelajari dampak dari perang dalam sejarah atau perang sebagai motor sejarah umat manusia, khususnya bagaimana dampak dari rangkaian peperangan yang terus menerus dilangsungkan oleh Mataram dengan bantuan senjata VOC terhadap pemberontakan dan intrik-intrik keraton yang berlangsung sejak 1677-1726. Ricklefs menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan VOC kepada Mataram antara tahun 1677-1726 itu menyebabkan kerajaan yang sebelumnya terancam hancur itu, menjadi makin lama makin kuat. Kepercayaan diri dari para sultan dan bangsawan lainnya, terutama sejak awal abad ke-18, pulih kembali dan malah makin meningkat. Ia juga membuktikan bahwa berbeda dengan perang-perang abad ke-19, peperangan dalam masa VOC itu tidak menyebabkan masyarakat Jawa kehilangan kepercayaan atas keunggulan budayanya. Bahkan dalam masa itu perang justru memperkuat identitas masyarakat tradisional (Ricklefs, 1993: 230).

Studi khusus yang menyangkut Pasisir adalah dari Luc Nagtegaal dan Gerrit J. Knaap. Studi Knaap mencakup dua permasalahan historiografi yang penting. Pertama, bagaimana Batavia yang tidak memiliki sistem pertanian bahan makanan yang memadai itu, menyediakan makanan bagi penduduknya yang

meningkat pesat sejak bagian kedua abad ke-17 (terutama karena migrasi orang Cina). Berbeda dengan historiografi kolonial, studi Knaap sangat mendetail karena menggunakan arsip VOC secara intensif. Ia memperlihatkan bahwa jaringan perdagangan dari Pasisir itu sangat kompleks, karena selain VOC juga terdapat para pedagang “swasta” (Cina, Jawa dan Melayu). Selain itu, dalam banyak hal perdagangan dari Pasisir justru tidak ditujukan ke Batavia, tetapi ke daerah luar Jawa seperti ke Selat Malaka dan Kalimantan. Selain itu Knaap juga meneliti permasalahan perkembangan teknologi militer dalam zaman yang dipelajarinya. Mengenai hal itu dalam historiografi terdapat dua pendapat yaitu pertama bahwa teknologi militer dunia Timur dan dunia Barat ketika itu tidak berbeda, sama saja. Pendapat kedua yaitu bahwa teknologi militer Barat jauh lebih unggul dari Timur. Hasil penelitian Knaap membuktikan bahwa pendapat kedua lebih tepat. Akan tetapi penjelasannya berbeda dengan penjelasan-penjelasan lainnya. Knaap setuju dengan pendapat bahwa dalam masa itu teknologi militer Timur (baca: Mataram) sama tingginya dengan teknologi Barat (baca: VOC). Tetapi hal itu disebabkan dalam abad ke-18 telah terjadi alih teknologi orang Timur telah berhasil membuat sendiri persenjataan buatan Barat. Ricklefs juga berpendapat yang sama. Sejak masa Sultan Agung telah berlangsung proses alih teknologi perang itu.

Sultan Agung mempekerjakan orang-orang Portugis yang mahir dalam soal persenjataan untuk mengalihkan teknologi itu pada Mataram. Ricklefs menunjukkan bahwa berbagai jenis senjata yang belum lama berselang digunakan oleh VOC, juga dapat dibuat sendiri oleh Mataram, serta berbagai jenis senjata yang belum lama berselang digunakan oleh VOC, juga dapat dibuat sendiri oleh Mataram. Snaphaen (senapan) dengan mekanisme pemicu yang dinamakan flinlock (pemicu batu api) yang mulai dipakai oleh VOC sejak 1680-an untuk menggantikan matchlock (pemicu bersumbu), mulai umum juga digunakan oleh tentara Mataram 1730-an. Juga granat dan mortir cochoorn (mortir kecil untuk melontarkan granat) yang ditemukan sekitar tahun 1673 dan pertama kali digunakan VOC dalam kampanye 1706, telah terdapat juga di kalangan tentara Trunojoyo dalam pertempuran Surabaya tahun 1718, demikian pula bayonet kemudian digunakan juga oleh Mataram (Ricklefs, 1993: 224).

Proses yang sama juga terdapat dalam teknologi maritim. Hasil penelitian Knaap membuktikan bahwa dalam abad ke-18 telah terjadi alih teknologi maritim di Nusantara. Para pemilik kapal-kapal layar di Jawa telah menggunakan jenis-jenis kapal layar ukuran menengah yang lebih baik yang berasal dari VOC, seperti chialoup (90 t0n) dan brigantijn (160 ton) yang sistem

layar dan sistem lambungnya jauh lebih baik dari jenis perahu mayang ataupun jung (100 ton) yang leih umum sebelumnya. Jenis kapal-kapal layar itu diproduksi di galangan-galangan kapal di Pasisir yang telah terkenal sebelumnya, seperti Rembang, Yuana dan Lasem (Knaap, 1996: 151-157).

Penelitian Nagtegaal lebih fokus pada perdagangan VOC di Pasisir sejak 1677 hingga 1741. Permasalahannya adalah menyangkut faktor-faktor sosial ekonomi yang menjadi latar belakang dari Pemberontakan Cina di Pasisir yang berawal dari tahun 1741 sebagai kelanjutan dari peristiwa di Batavia. Ia menolak endekatan yang terdapat dalam historiografi lama yang melihat masyarakat terkotak-kotak antara Jawa, Cina, dan Belanda. Menurut Nagtegaal, teori-teori tentang masyarakat kolonial seperti “plural society” bahkan “dual economy” tidak akan banyak membantu memahami masyarakat Pasisir zaman VOC. Ia melihat masyarakat Pasisir sebagai suatu sistem interaksi sosial, bahkan “negara” Jawa, khususnya di Pasisir lebih tepat disebut “network state” atau jaringan hubungan “patron-client” antara para pejabat yang rendah (bupati) sampai yang tertinggi (sultan) (Nagtegaal, 1996).

2.9.1 Intervensi Politik

Campur tangan VOC dalam urusan politik Mataram selalu dilakukan berdasarkan permintaan dari Sultan Mataram. Intervensi itu selalu berkaitan dengan dua masalah politik yang dihadapi keraton Kartasura, yaitu yang pertama, hubungan Mataram-Madura; kedua, konflik intern keraton antara para bangsawan. Intervensi pertama tahun 1677 berkaitan dengan hubungan Mataram dengan Madura. Sejak Sultan Agung menakhliukkan Madura pada tahun 1624 wilayah itu dianggap sebagai vazal Mataram, bahkan penguasa Madura Barat selalu harus berdiam di keraton (Cakraningratan). Sepeninggal Sultan Agung, Madura senantiasa berusaha melepaskan diri, proses ini ternyata berkelanjutan hingga tahun 1743. Pada tahun 1677, Raden Trunojoyo mencoba melepaskan cengkeraman Mataram atas Madura Barat. Setelah merebut kekuasaan dari pamannya ia memusatkan pasukannya di Surabaya dan berusaha merebut Pasisir. Amangkurat I (1646-1677) mencoba mendapatkan dukungan VOC untuk menghalau Trunojoyo dari Pasisir. Cornelis Speelman yang ditugaskan membantu Mataram ternyata tidak berhasil merebut Surabaya dalam pertempuran pertama bulan Mei 1677. Ketika itu hanya Jepara dan Tegal yang belum dikuasai Trunojoyo. Sementara itu di Kartasura timbul konflik antara pangeran, dan Amangkurat I terpaksa melarikan diri (28 Juni 1677) sehingga keraton dapat diduduki tentara Madura dan sekutu-sekutunya.

Amangkurat II (1677-1703) yang menggantikan ayahnya yang meninggal di Tegal, berhasil mencapai Jepara untuk meminta bantuan VCO untuk mengembalikannya ke Kartasura dan mengalahkan Trunojoyo. Sebelum memberi bantuan itu Speelman mengadakan perundingan dengan Ngabehi Wangsadipa, bupati Jepara, yang mendapat wewenang dari Amangkurat II untuk mewakilinya. Kesepakatan tahun 1677 yang kemudian masih ditambahkan itu merupakan langkah pertama dari VOC untuk memasuki Pasisir. Selain berjanji akan membayar kembali semua ongkos perang melawan Trunojoyo, pihak Mataram juga membebaskan VOC dari kewajiban membayar pajak impor dan ekspor di kota-kota pelabuhan Pasisir. Selain itu VOC diberi hak monopoli atas tekstil, gula dan ganja. VOC juga diijinkan mendirikan benteng di mana saja dianggap perlu, sehingga kemudian muncul benteng-benteng di Jepara, Rembang, Surabaya, dan Tegal serta loji-loji yang dikawal di Demak, Gresik dan Yuana, dan di Kartasura. Semua orang asing di Pasisir menjadi tanggung jawab VOC (Nagtegaal, 1996: 26).

Dengan bantuan VOC, Amangkurat II dapat kembali ke Kartasura, dan pada tanggal 26 Desember 1679, Trunojoyo tertangkap di Gunung Anjasmara oleh Kapitan Yongker dan dibunuh oleh Amangkurat II pada tahun 1680 (Ricklefs, 1993: 30-47). Meskipun Trunojoyo telah meninggal, namun ketenteraman di Kartasura ternyata tidak dapat bertahan lama (1680-1686). Pada tahun 1686 meletus pemberontakan baru yang dipimpin oleh Untung Surapati, seorang budak asal Bali milik Pieter Cnoll, seorang pejabat tinggi VOC (Opperhoofd) di Batavia (Blusse, 1988: 299-302).

Amangkurat II yang mencoba menggunakan Untung untuk menghalau VCO dari Semarang, mengundangnya berdiam di Kartasura. Upaya VOC untuk menangkapnya gagal, bahkan Kapitein Tack yang ditugaskan untuk melakukan hal itu, gugur bersama pasukannya. Untung yang lolos dalam pertempuran tanggal 4 Februari 1686 itu, melarikan diri ke Jawa Timur, dan memproklamasikan dirinya sebagai raja di Pasuruan. Sementara itu, VOC yang menyalahkan kematian Tack pada Amangkurat II, memutuskan hubungan dengan Kartasura dari 1685 hingga 1695. Namun selama itu VOC tetap menuntut ganti rugi yang dijanjikan padanya ketika membantu Mataram. Di Kartasura pun berkecamuk perebutan kekuasaan antara putra mahkota Amangkurat II (Adipati Anom) dan pamannya, Pangeran Puger. Situasi politik yang melemahkan Mataram itulah yang memungkinkan Surapati meluaskan kekuasaannya di Jawa Timur, sehingga meliputi Madiun dan Ponorogo. Baru setelah hubungan VOC dan Mataram pulih kembali, pengejaran atas Surapati

dilanjutkan hingga akhirnya pada tahun 1707 pasukannya dihancurkan di Bangil dan Surapati meninggal karena luka parah. Putra-putranya seperti Ki Adipati Wiroguna dan R. Tumenggung Surapati, dapat bertahan terus di Jawa Timur hingga 1727 (Ricklefs, 1993: 93, 143, 145, 199).

Konflik antara Adipati Anom dan Pangeran Puger memuncak ketika Amangkurat II meninggal 23 November 1703. Adipati Anom memproklamasikan dirinya sebagai Amangkurat III, namun Puger berhasil menduduki tahta di Kartasura dengan dukungan VOC di Semarang, dan memproklamasikan dirinya sebagai Pakubuwono I (1704-1719). Bantuan yang diberikan pada Puger menyebabkan VOC berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya di Pasisir. Dalam perjanjian 5 Oktober 1703 ditentukan bahwa selain Madura Timur VOC juga mendapat wilayah di sebelah timur Batavia hingga batas Cirebon hingga Cilacap. Selain itu, sekali lagi ditugaskan bahwa Semarang menjadi bagian dari kekuasaan VOC (Ricklefs, 1993: 129-142).

Masa Pakubuwono I diandai oleh berbagai pemberontakan yang dipimpin para pangeran dari Kartasura yang pada umumnya berkedudukan di Jawa Timur. Selain Surapati dan putra-putranya, para pangeran yang menentang Pakubuwono I adalah Panji Surengrana di Surabaya. Selain itu Cakraningrat III dari Madura Barat yang menginginkan agar kerajaannya dilepaskan dari Mataram dan menjadi vazal VOC (1717-1723). Kemudian terdapat pula pangeran Diponegoro yang mencoba membangkitkan kembali Kerajaan Majapahit (1717-1723). Konflik intern keraton dan pemberontakan berkobar terus pada masa Amangkurat IV yang menggantikan Puger (1719-1726). Surabaya berkali-kali menjadi pusat pemberontakan dengan pimpinan Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Aria Mataram. Pemberontakan itu berlangsung hingga 1723, ketika secara defenitif Amangkurat IV diakui di Kartasura (Ricklefs, 1993: 183-202).

Keadaan Mataram berangsur tenang antara tahun 1723 hingga 1749. Dalam masa tersebut kekuasaan Sultan Pakubuwono II (1726-1749) menjadi sangat kuat. Dalam situasi yang demikian, Mataram berusaha merebut kembali kekuasaan atas Pasisir dari tangan VOC. Ia memanfaatkan pemberontakan Cina di Pasisir. Namun dengan gagalnya pemberontakan itu, gagal pula usaha Pakubuwono II untuk merebut kembali Pasisir. Bahkan setelah VOC berhasil mengatasi pemberontakan Cina, ia harus memberi konsesi lebih besar pada VOC dalam Perjanjian 1743. Keinginan Cakraningrat dikabulkan, Madura Barat dilepaskan dari Mataram dan menjadi vazal VOC. Demikian pula para bupati di kota-kota pelabuhan Surabaya, Jepara, Rembang dan ujung timur Jawa

Timur serta wilayah pantai seluruh Pasisir (Ricklefs, 1993: 203-221). Sejak tahun 1743 VOC praktis berkuasa atas Pasisir. Kekuasaannya ditandai dengan pembentukan “Gouvernement van Java’s Noort-Oost Cust” pada tahun 1743. Gubernur pertama yang berkedudukan di Semarang adalah Baron van Hohendorff (1748-1754).

2.9.2 Perdagangan VOC

Daerah Pasisir tidak menghasilkan rempah-rempah yang menjadi tujuan utama perdagangan VOC di Asia. Namun, wilayah itu merupakan pengekspor bahan makanan dan kerajinan yang sangat penting. Kota-kota pelabuhan lain di Nusantara sangat bergantung pada pemasokan beras dari Pasisir, seperti Malaka dan Maluku. Pelayaran niaga dari kota-kota pelabuhan di Pasisir itu terdiri dari dua komponen yaitu pertama para pedagang dan kedua perahu dagang yang sering dimiliki juga oleh para pedagang yang bersangkutan. Para pedagang pada umumnya adalah orang Cina, Jawa dan Melayu. Pemilik perahu dagang juga berasal dari ketiga golongan itu, walau tidak selalu tumpang tindih. Para bupati di kota-kota pelabuhan juga berdagang dan menjadi pemilik perahu-perahu dagang dan barang-barang dagangan yang diperdagangkan oleh orang lain. Sampai sekitar tahun 1680-an kapal-kapal layar VOC tidak leluasa memasuki kota-kota pelabuhan di Pasisir, kecuali Jepara, karena pengawasan yang ketat oleh keraton. Keadaan seperti itu berlangsung sejak masa Sultan Agung yang masa pemerintahannya bersamaan dengan munculnya VOC di Banten dan kemudian di Batavia. Namun perjanjian 1677 yang dibuat oleh Cornelis Speelman memperlihatkan bahwa intervensi politik membawa keuntungan ekonomi juga.

Dari arsip-arsip VOC yang diteliti Nagtegaal diketahui bahwa pada tahun 1640 belum ada kapal-kapal layar VOC yang memasuki Pasisir, tetapi pada tahun 1675 sudah ada sekitar 7.747 kapal layar VOC yang memasuki Pasisir. Jumlah itu meningkat terus terutama sejak abad ke-18 sehingga mencapai angka di atas 10.000, mungkin berkaitan dengan perjanjian-perjanjian 1705 dan 1743. Adapun keperluan VOC di Pasisir adalah beras dan kayu. Beras sangat diperlukan VOC untuk penduduk Batavia yang mulai meningkat pesat sejak bagian kedua abad ke-17. Eksportir beras dari Pasisir sejak abad ke-16 adalah Tegal, Demak, Jepara, Yuwana, dan Surabaya, serta sampai 1686 juga Pasuruan. Kota-kota pelabuhan tersebut sesungguhnya hanya penyalur dari beras yang diproduksi ribuan petani di Pasisir. Sampai tahun 1676 para bupati memonopoli penjualan beras dari kota-kota pelabuhan tersebut. Mereka

memperoleh beras dari para petani melalui sistem upeti, tetapi juga dengan cara membeli (Nagtegaal, 1996: 124, 129).

Peningkatan jumlah penduduk Batavia yang disebabkan migrasi orang Cina berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan beras. Baru dalam abad ke-18 produksi beras di Ommelanden Batavia dapat diandalkan untuk menyediakan sekitar 30% dari kebutuhan kota itu. Kayu dibutuhkan selain untuk galangan kapal VOC, juga untuk perumahan dan lain-lain dalam kota Batavia. Peningkatan jumlah penduduk sudah tentu menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan berbagai jenis kayu yang hanya dapat dipasok oleh Pasisir. Sejak awal VOC dapat membeli beras dan kayu melalui bupati Jepara. Intervensi politik tahun 1677 yang didahului oleh suatu perundingan antara Bupati Jepara yang bertindak atas nama Amangkurat II, memberi kelonggaran yang lebih besar bagi VOC untuk berdagang di semua kota-kota pelabuhan di Pasisir. Meskipun perjanjian 1677 itu menentukan bahwa para bupati Pasisir harus bekerja sama dengan VOC, tetapi dalam hal dagang mereka tidak menyerah begitu saja. Persaingan antara VOC dan para bupati itu berlangsung terus menerus dari 1677 hingga 1705. Pokok persaingan utama adalah soal pembelian beras. Persaingan itu diawali oleh Speelman yang mencoba mematahkan monopoli para bupati dalam perdagangan beras. VOC ternyata tidak sanggup mematahkan monopoli para bupati itu tanpa intervensi politik. Kegagalan itu bertalian dengan sistem pembelian beras dari para petani di pedalaman.

VOC tidak mampu untuk membeli beras dari para petani yang tersebar di wilayah pedalaman yang menjual beras dalam jumlah yang kecil. Dalam hal ini para pedagang Cina dari kota-kota pelabuhan terutama Semarang lebih berhasil karena mereka dapat memasuki pedalaman dan membeli secara eceran. Selain itu, para bupati juga memiliki mekanisme pengumpulan beras yang lebih baik, yaitu melalui upeti yang harus dibayar oleh para petani in nature, termasuk beras (Nagtegaal, 1996: 130-132).

Keadaan itu berubah sejak 1705. Dalam perjanjian yang baru ditandatangani pada tanggal 5 oktober itu, sebagai imbalan membantu Pakubuwono I naik tahta di Kartasura, setiap tahun selama 25 tahun berikutnya. Mataram diharuskan menyerahkan beras sebanyak 800 koyan atau sekitar 1300 ton kepada VOC di Batavia (Ricklefs, 1993: 143), yang kemudian sejak 1733 ditingkatkan lagi menjadi 1000 koyan. Beras sejumlah tersebut ditagih dari para bupati di Pasisir sebagai contingenten. Sistem itulah yang menyebabkan para bupati kehilangan sebagian dari monopoli berasnya sejak awal abad ke-18. Walaupun jumlah

contingenten tersebut tidak pernah digenapi, namun apa yang diterima oleh VOC setiap tahun, menurut perhitungan Nagtegaal adalah sekitar 42% dari ekspor beras dari Pasisir. Menurut kalkulasi Knaap jumlah itu tidak jauh berbeda dalam tahun 1770-an (Knaap, 1996: 115).

Hubungan yang tidak serasi antara VOC dan para bupati di Pasisir itu berdampak pada pelayaran niaga “swasta” ke Batavia. Sejak semula pengaruh VOC dalam perdagangan di Pasisir adalah negatif terhadap para pedagang swasta dari Pasisir. Hak monopoli untuk madat, gula, tekstil yang diperolehnya sejak 1677 digunakan oleh VOC justru untuk menghalangi kelancaran perdagangan ketiga komoditi itu di Pasisir, dengan cara mengurangi impornya ke kota-kota pelabuhan tersebut. Impar madat ke Pasisir dapat dikendalikan VOC karena komoditi itu didatangkan dari India melalui Batavia, gula diproduksi juga di sekitar Batavia, sehingga VOC tidak sepenuhnya bergantung pada gula dari Pasisir. VOC juga mengimpor tekstil dari India dan Bali sehingga tekstil Jawa yang memang laku di Batavia dapat dihambatnya. Mundurnya perdagangan Pasisir dengan Batavia sejak 1677 hingga awal abad ke-18 terbukti dari makin berkurangnya perahu-perahu dagang dari Pasisir yang memasuki Batavia, dan meningkatnya kapal-kapal layar VOC yang memasuki Pasisir. Menurunnya peranan para pedagang swasta itu merupakan salah satu faktor struktural yang memungkinkan terjadinya gejolak sosial yang dikenal sebagai Pemberontakan Cina di Pasisir antara tahun 1741 dan 1743. Faktor lainnya adalah perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat pedagang itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan hubungan VOC dengan para bupati di Pasisir. Sejak awal abad ke-18 VOC memutuskan untuk menjadikan daerah Pasisir tidak saja sebagai wilayah produksi bahan makanan untuk Batavia, tetapi juga sebagai wilayah yang memproduksi komoditi-komoditi yang dibutuhkan VOC dalam perdagangan internasional, seperti kopi dan indigo. Sistem pertanian itu sangat menguntungkan VOC karena para bupati dimanfaatkan untuk mengerahkan para petani di wilayah kekuasaannya untuk menanam komoditi-komoditi itu sebagai bagian dari “heerendiensten” (Nagtegaal, 1996: 116-127).

Sistem pertanian yang diterapkan VOC di daerah Pasisir menyebabkan para bupati menjadi bagian dari aparat ekonomi VOC yang membawa keuntungan. Sistem itu juga membawa keuntungan bagi para bupati karena kesempatan berdagang bagi mereka semakin luas. Sejak semula para bupati di Pasisir telah berfungsi sebagai “political entrepreneur” atau “ndoro bakul” (noble merchant), namun sejak tahun 1705 peranan mereka makin meningkat sejalan dengan perubahan agraria itu. Yang paling terkenal di antara para bupati di Pasisir itu

adalah Jayasantika, bupati Kudus, dan dua putranya masing-masing bupati Grobongann dan bupati Yuwana; Jayadiningrat (turunan Cina) yang menjadi bupati di Pekalongan dan saudaranya, Puspanagara yang menjadi bupati di Batang, dan seorang lagi yang menjadi bupati di Sedayu, dan Tirtanata bupati Tegal (Nagtegaal, 1996: 166-167).

Perluasan perkebunan kopi dan indigo yang menguntungkan para bupati tersebut, sebaliknya memberatkan para petani karena jatah “*heerendiensten*” menjadi semakin bertambah. Bukan hanya para petani yang menjadi prihatin karena kewajiban-kewajiban yang makin meningkat, tetapi juga para migran Cina. Konsentrasi perdagangan pada para bupati dan para pemimpin masyarakat Cina di setiap kota pelabuhan menimbulkan keresahan di kalangan migran Cina, yang mulai membanjir di Pasisir sejak awal abad ke-18. Wujud permusuhan terhadap para pemimpin Cina itu adalah mekarnya jumlah “*secret society*” yang lazim terdapat di kalangan orang Cina. Kepincangan struktural tersebut berubah menjadi pemberontakan. Pemicunya sudah tentu adalah Pemberontakan Cina di Batavia tahun 1740 yang mengakibatkan ribuan orang Cina di kota itu meninggal karena dibantai VOC. Pemberontakan itu menjalar ke Pasisir sejak tahun 1741 hingga 1743. Bukan saja orang-orang Cina yang mengangkat senjata, tetapi juga ribuan petani menyerang kubu-kubu para bupati serta benteng-benteng VOC. Bahkan benteng utama VOC di Semarang terancam jatuh kalau VOC tidak segera mendatangkan bantuan dari Batavia. Pasukan-pasukan Bugis juga dikerahkan VOC untuk melindungi benteng-bentengnya. Pakubuwono I, yang menduga gejolak sosial itu akan menyebabkan VOC tersingkir dari Pasisir, lalu memihak kepada pemberontak. Tetapi ternyata perhitungannya keliru, VOC dapat mempertahankan diri. Tetapi lebih parah lagi bagi Pakubuwono adalah tindakan Cakraningrat IV dari Madura Barat yang mengambil kesempatan untuk mengerahkan pasukannya ke Kartasura dengan tujuan melepaskan diri dari Mataram. Menghadapi ancaman serangan Cakraningrat itu, Pakubuwono memutuskan untuk berlindung pada VOC. VOC bersedia memberi perlindungan dengan imbalan yang cukup mahal. Pada tahun 1743 Pakubuwono I harus menandatangani suatu perjanjian yang antara lain memberi kekuasaan yang sangat besar pada VOC di Pasisir.

Sejak itu para bupati Pasisir tidak lagi menjadi kawula Susuhunan tetapi kawula VOC. Mereka tidak diharuskan lagi mengunjungi upacara Gerebek Mulud di Kartasura untuk menyatakan kesetiaan kepada Susuhunan (Nagtegaal, 1996: 120-127). Selain itu VOC memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan pembelian beras dengan harga yang murah untuk kebutuhan Batavia. Ketentuan

lain dalam perjanjian itu adalah penambahan jumlah contingenten beras dari 800 koyan setiap tahun menjadi 1000 koyan. Sejak itulah pasukan beras ke Batavia melalui VOC meningkat.

Pada bagian kedua abad ke-18, perdagangan swasta di Pasisir pulih kembali. VOC berkepentingan di Pasisir selain beras dan kayu, wilayah itu menjadi pemasok bahan makanan dan lain-lain ke Batavia. Oleh karena itu, VOC tidak dapat membiarkan arus perdagangan itu terhenti sama sekali. Jaringan perdagangan para pedagang swasta dari Pasisir tidak terbatas pada Batavia, melainkan juga melakukan kegiatan ekspor-impor dengan berbagai kota pelabuhan di Nusantara. Kota-kota pelabuhan Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Yuana, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sumenep mengekspor bahan makanan (beras, sayur-mayur, ikan) bahan bangunan (jenis-jenis kayu), dan barang-barang kerajinan (manufaktur). Namun tidak semua komoditi itu secara merata diekspor oleh setiap kota pelabuhan. Semarang misalnya lebih menonjol dengan ekspor berasnya, Rembang dengan ekspor kayunya, dan sebagainya. Selain itu jumlah ekspor ke Batavia atau yang diimpor oleh VOC bukan merupakan jumlah yang terbesar. Kota-kota pelabuhan lain yang dipasok dari Pasisir antara lain terdapat di Nusatenggara, Sulawesi, Kalimantan, Selat Malaka, dan kota-kota pelabuhan di Jawa sendiri. Peranan pedagang swasta dalam kegiatan ekspor ke Batavia jauh lebih penting dibanding dengan VOC. Hasil penelitian Knaap mengenai perdagangan di Pasisir dalam pertengahan 1770-an diketahui bahwa VOC sama sekali tidak menghancurkan perdagangan swasta seperti yang dikemukakan dalam historiografi kolonial. Ia membuktikan bahwa peranan para pedagang swasta dari Pasisir samasekali tidak lumpuh karena kegiatan VOC. Bangkitnya kemampuan para pedagang swasta sejak bagian kedua abad ke-18 disebabkan inovasi dalam teknologi maritim yang terjadi dalam abad ke-18. Para pengrajin di galangan-galangan kapal layar di Rembang dan lain-lain berhasil memproduksi kapal-kapal layar jenis brigantijn dan chialoup yang sebelumnya hanya digunakan oleh VOC dalam pelayaran interinsuler. Perahu-perahu layar jenis mayang, yang merupakan alat pengangkutan laut yang utama di Pasisir, sejak itu mulai terdesak. Penggunaan kapal-kapal layar yang lebih besar itu memungkinkan peningkatan volume perdagangan pula (Knaap, 1996: 205-207).

Kesimpulan dari intervensi politik dan perdagangan VOC di Pasisir adalah cara dagang VOC dikategorikan sebagai “armed trade” dan “bureaucratic trade” menurut Chaudhuri. Sementara J.J.P de Jong suatu teori mengenai hubungan

itu dinyatakan dengan konsep aliansi. Dalam membangun hubungan persekutuan itu, VOC mengikuti pola feodalisme yang berlaku di tempat. Sampai tahun 1749 Mataram menganggap VOC sebagai vazalnya dan VOC cenderung mengikuti hal itu. Sejak tahun 1678, setiap tahun pada hari Gerebeg Mulud, Batavia mengirim utusan-utusannya ke Kartasura dengan membawa hadiah-hadiah yang berharga puluhan ringgit. Hadiah-hadiah itu oleh Mataram dilihat sebagai upeti yang harus diberikan oleh seorang vazal, seperti halnya para bupati yang juga diharuskan muncul pada saat yang sama di Kartasura. Kedudukan VOC di Semarang sejak tahun 1678 itu oleh Mataram juga dilihat sebagai pelimpahan hak shahbandar saja, jadi sebagai seorang vazal yang patut membayar upeti. Namun, masalah muncul karena para bupati Pasisir tidak senang dengan Kartasura, yang sejak Sultan Agung dan putranya Amangkurat I, menghancurkan potensi dagang para bupati itu. Inilah yang menjadi latar belakang dari pemberontakan Trunojoyo dari Madura Barat (1677). Para bupati selanjutnya lebih menginginkan menjadi vazal VOC daripada menjadi vazal Mataram. VOC nampaknya, oleh orang Jawa ketika itu dilihat sebagai suatu kerajaan yang berlokasi di Jawa Barat. Sementara itu VOC pun menginginkan agar Mataram mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Kesempatan muncul ketika Mataram sekali lagi menjadi kacau akibat Pemberontakan Untung Surapati (1686-1727). Sebelum membantu Pakubuwono I menumpas Untung Surapati, VOC telah menyodorkan perjanjian 1705 yang praktis menekankan kembali hak-hak VOC di Pasisir, ditambah dengan penyerahan beras dalam jumlah tertentu. Tetapi adalah perjanjian 1743, seusai pemberontakan orang Cina, yang memberi kesempatan bagi VOC untuk berdaulat di Pasisir, sehingga para bupatinya menjadi vazal VOC seperti yang mereka kehendaki. Sejak itu VOC juga tidak lagi dianggap sebagai vazal dari Mataram.

Teori de Jong itu didasarkan pada pendapat J.C. van Leur, bahwa selama masa VOC tidak terjadi perubahan sosial. Kenyataan itu menurut de Jong, sangat jelas nampak dalam hubungan antara VOC dengan Mataram yang mengikuti pola feodalisme Jawa. Hubungan itu terputus sejak tahun 1743, tetapi sejak itu hubungan VOC dengan para bupati di Pasisir tetap pula mengikuti pola feodalisme tersebut. Namun, menurut Knaap dan Nagtegaal dalam abad ke-18 Pasisir jelas mengalami perubahan sosial. Nagtegaal menunjukkan bukti dari perubahan peran para bupati yang makin menonjol sebagai pedagang dan Knaap memperlihatkan perubahan dalam dunia maritim dan perdagangan.

Di Mataram tidak terjadi perubahan sosial, terutama dalam soal budaya tidak terjadi perubahan, bahkan ada kecenderungan makin kuatnya identitas budaya Jawa dalam abad ke-18. Berbeda halnya dengan di Pasisir, struktur sosial-politik di Pasisir memang tidak berubah banyak karena VOC tetap menggunakan pola feodalisme dalam hubungannya dengan para bupati, namun struktur sosial-ekonomi memperlihatkan perubahan yang penting. Kenyataan serupa juga nampak di Kepulauan Ambon, tetapi tidak terdapat di Kepulauan Banda yang baik dari segi politik maupun ekonomi samasekali berubah.

2.10 Pembubaran VOC

Mengapa VOC dibubarkan dalam tahun 1798? Para ahli sejarah dalam masa Hindia Belanda sangat sering menunjuk pada faktor korupsi. Pendapat ini pertama kalinya dilontarkan oleh G.C. Klerk de Rues pada tahun 1894. Kemudian diulangi lagi dalam buku sejarah yang ditulis H.T. Colenbrander pada tahun 1925/26. Pendapat itu juga dibenarkan pula oleh J.C. van Leur pada tahun 1934. Setelah itu pandangan itu masih tetap bertahan, seperti C.X. Boxer umpamanya pada tahun 1979. Betapa populernya gagasan mengenai korupsi itu, sehingga ada yang menciptakann plesetan “Vergaan Onder Corruptie” (Tenggelam karena korupsi).

Pendapat lain di masa kini lebih meluas mencari kelemahan-kelemahan VOC dalam bidang perdagangan. Kenyataan bahwa sejak tahun-tahun 1689-1700 VOC terus menerus merugi merupakan alasan untuk memusatkan penelitian pada mekanisme perdagangannya. Seperti dicatat oleh Gaastra, sejak itu kerugian yang diderita VOC dari tahun ke tahun makin besar. Kalau dalam tahun-tahun 1731-1741 jumlah kerugian itu adalah 10.300.000, pada tahun 1731-1741 jumlahnya sudah menjadi 20.700.000, pada tahun-tahun 1769-1780 meningkat menjadi 30.100.000, dan menjelang dibubarkan kerugiannya mencapai 50.400.000 (Gaastra, 1991: 132). Dividen yang harus dibayar VOC kepada para pemegang saham sejak awal abad ke-18 diperolehnya melalui pinjaman-pinjaman dari Bursa Amsterdam, sehingga dapat dipastikan bahwa dari sudut itu kerugian makin bertambah lagi.

Salah satu penjelasan yang luas dipertimbangkan para ahli sejarah di masa kini adalah bahwa kerugian-kerugian VOC sejak awal abad ke-18 itu berkaitan dengan kenyataan, bahwa sejak itu VOC memadukan urusan dagang dengan

urusan politik di Kerajaan Mataram (Kartasura). VOC melakukan intervensi dalam politik Mataram untuk membantu Kartasura memadamkan berbagai pemberontakan yang telah muncul sejak abad ke-17. Tetapi seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh VOC untuk intervensi politik itu belum pernah dikalkulasi. Ricklefs mengemukakan bahwa Kartasura selalu diwajibkan mengembalikan semua pengeluaran untuk intervensi itu, namun apakah jumlah jumlah yang diterima oleh VOC sudah menutupi pengeluarannya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu belum dapat dipastikan secara kuantitatif seberapa besar pengeluaran untuk urusan perang itu mengurangi keuntungan VOC di Batavia.

Pendapat lain yang lebih menarik dari W.M.F. Mansvelt adalah mengenai kelemahan dalam sistem pembukuan perusahaan dagang VOC. VOC mengenal dua sistem pembukuan. Pertama adalah pembukuan mengenai pengeluaran dan pemasukan di Negeri Belanda. Kedua adalah pembukuan mengenai pengeluaran dan pemasukan di Batavia. Kedua sistem itu tidak pernah disinkronkan, masing-masing berdiri sendiri. Pembukuan di Negeri Belanda hanya mencatat berbagai biaya penyelenggaraan armada VOC yang tiga kali setiap tahun dikirim ke Batavia, serta muatan kapal-kapal itu yang terutama terdiri dari uang dan lempeng-lempeng emas dan perak. Pada lajur pemasukannya hanya tercatat hasil lelang berbagai komoditi yang dibawa armada-armada itu dari Asia. Pembukuan di Batavia hanya mencatat sebagai pemasukan jumlah uang dan logam mulia yang diterima melalui armada-armada tersebut, dan sebagai pengeluaran jumlah pembelian berbagai komoditi di kantor-kantor dagang yang diangkut kembali ke Belanda oleh armada-armada tersebut. Kerugian yang dicatat sejak akhir abad ke-17 adalah berdasarkan pembukuan di Negeri Belanda. Selain itu, belum diketahui dengan pasti berapa besar keuntungan yang diperoleh dari perdagangan antara Asia yang makin penting dalam abad ke-18.

Pandangan terakhir yang sangat menarik adalah mengenai strategi dagang VOC yang dilontarkan oleh K. Glamann pada tahun 1958. Menurut Glamann, kelemahan VOC adalah sifat kakunya dalam menghadapi pasaran. Ketika dalam abad ke-18 selera konsumsi di Eropa mulai meninggalkan rempah-rempah dan beralih ke teh dan kopi, VOC tidak sanggup mengubah strategi dagangnya untuk memenuhi permintaan pasar itu. Kopi memang dapat diusahakannya dalam abad ke-18 melalui sistem monopoli dari perkebunan-perkebunan kopi di Priangan, tetapi komoditi itu tidak sepenuhnya dikuasai VOC karena persediaan dari Yaman dan Aden tetap mengalir ke Eropa melalui

EIC. Kesalahannya lebih parah lagi mengenai teh. Pemasokan teh ke Amsterdam oleh VOC hanya diperoleh dari perdagangan teh yang dilakukan oleh orang-orang Cina yang membawanya ke Batavia setiap tahun dengan wangkang-wangkang mereka. Dari Batavia VOC mengangkutnya ke Amsterdam. Teh yang dimasukkan ke Batavia adalah dari mutu yang rendah, karena mutu yang baik sudah dibeli oleh para saudagar EIC yang mendatangi Cina dengan kapal-kapalnya dari India. Selain itu, kemasan teh yang diangkut dengan wangkang-wangkang ke Batavia itu tidak menjamin isinya, sehingga mutu teh yang memang sudah rendah itu menjadi makin rendah lagi. Selain itu, bagian terbesar dari supply teh ke Eropa memang berasal dari EIC yang memiliki hubungan dagang dari India ke Cina.

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor perang yang dialami Negeri Belanda sendiri. Kerugian-kerugian yang mulai diderita VOC sejak akhir abad ke-17 bisa jadi berkaitan dengan serangan Inggris dan Prancis atas negeri itu pada tahun 1672 yang membawa akibat tidak sedikit baik di Negeri Belanda maupun di Asia. Namun, VOC dapat bertahan karena tindakan-tindakan penghematan, terutama dalam soal jumlah armada yang harus dikirim ke Asia (Gaastra, 1989). Pembinaan organisasi sejak itu juga banyak membantu kelanjutan VOC, sekalipun tetap merugi.

Antara tahun 1780 hingga 1783 Belanda berperang dengan Inggris dan Prancis. Kali ini VOC tidak dapat bangkit lagi. Kerugian VOC terutama disebabkan kapal-kapalnya tidak bisa berlayar ke dan dari Asia karena senantiasa dapat dihadang oleh armada perang dari Inggris. Peperangan ini meluas hingga Asia, dan membawa hambatan yang tidak sedikit dalam perdagangan karena para pedagang swasta Inggris (country traders) dapat dengan leluasa memasuki wilayah monopoli VOC di Maluku. Kehancuran armada dagang VOC selama peperangan itu ternyata tidak dapat diatasi kembali. Pemerintahpun tidak bersedia lagi memberi pinjaman-pinjaman. Dalam tahun 1795 pemerintah Belanda malah mengambil alih manajemen VOC, memecat Heeren XVII dan membentuk suatu dewan yang tugasnya untuk melikwidasi VOC. Semua harta tidak bergerak dari VOC, berupa benteng dan wilayah-wilayah kekuasaan, diambil alih oleh pemerintah sebagai bagian dari pelunasan hutang-hutang VOC. Dengan resmi VOC dibubarkan pada tahun 1798.



THE
Character Building
UNIVERSITY



Bab 3

Pemerintahan Kolonial Belanda Di Indonesia

3.1 Penegakan Kekuasaan Belanda di Indonesia

Setelah pembubaran VOC, para pejabat dan pegawai VOC dialihkan statusnya dari pegawai VOC menjadi pegawai Pemerintah Negeri Belanda. Dengan demikian, kekuasaan terhadap semua tanah jajahannya diambilalih oleh Kerajaan Belanda. Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Republik Bataaf didirikan 1798. Pendirian Republik Bataaf dilatarbelakangi munculnya kelompok yang anti dinasti Oranye. Hal ini bertalian dengan diadakannya perjanjian perdamaian antara Belanda dan Inggris pada 1794. Akibatnya, Prancis menganggap Belanda sebagai musuhnya. Selain itu, perjanjian perdamaian tersebut mengakibatkan banyak orang Belanda yang anti Oranye (Dinasti yang saat itu memerintah Belanda) melarikan diri ke Prancis. Ketika para pelarian tersebut melakukan kerusuhan di Negeri Belanda.

Prancis memberi dukungan penuh kepada pelarian itu. Banyak dari pelarian itu yang memahami semboyan Revolusi Prancis (Liberte, Egalite, Fraternite) dan merencanakan untuk mendirikan sistem pemerintahan yang baru dengan merombak secara total pemerintahan di Belanda. Dengan bantuan Prancis, para patriot baik yang ada di Belanda maupun di pengasingan mulai melakukan penyerangan kepada Belanda pada Januari 1794. Penguasa Belanda Raja Willem V mengirim utusan ke Prancis untuk berunding, namun gagal. Pada

Januari 1795 pasukan patriot yang didukung Prancis menguasai Utrecht dan beberapa kota lainnya. Setelah Amsterdam dikuasai, pada tahun itu juga didirikanlah Republik Batavia di bawah pimpinan Rutger Jan Schimmelpenninck. Karena kondisi darurat perang, Republik Batavia baru memiliki konstitusi 3 tahun setelah pendirian republik itu (1798). Dalam konstitusi 1798 itu ditetapkan bahwa semua wilayah dan hutang VOC di Hindia Timur dilimpahkan kepada negara dan hak istimewa kompeni untuk mengelola koloni Hindia Timur dicabut. Modal yang dimiliki oleh para pemegang saham VOC akan dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, sejak 1 Januari 1800 Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda dan sejak itu Indonesia disebut Hindia Belanda.

Setelah Indonesia menjadi Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda mengangkat seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, yaitu van Overstraten pada tanggal 1 Januari 1800. Penguasa tertinggi di koloni Hindia Belanda ditetapkan dipimpin oleh Dewan Wilayah Asia (Raad der Aziatische Bezettingen) yang terdiri atas 9 orang. Selain mengelola wilayah koloni, dewan itu harus juga menghitung berapa jumlah uang yang harus disediakan oleh pemerintah untuk membayar hutang dan pembayaran saham VOC. Dewan wilayah Asia akan bekerja berdasarkan Undang-Undang Baru yang akan disusun, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Republik Batavia. Untuk sementara waktu, sebelum dikeluarkannya undang-undang itu, Dewan Wilayah Asia diijinkan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hak-hak istimewa lama yang diberikan kepada VOC, namun hak-hak istimewa itu akan dicabut sebelum tanggal 31 desember 1799. Kenyataannya pemerintah Republik Batavia tidak berhasil mengeluarkan undang-undang koloni karena wilayah itu sedang dalam keadaan darurat akibat peperangan melawan Inggris. Wilayah Batavia, khususnya Kepulauan Onrust dan Kuipers (di Kepulauan Seribu) dikuasai Inggris pada 23 Agustus 1800. Bahkan Inggris telah melakukan blokade di Teluk Batavia pada 26 Agustus 1800.

Batavia terancam jatuh ke tangan Inggris setelah pantai Marunda dikuasai Inggris pada Oktober 1800. Berkat bantuan pasukan yang dipimpin oleh Nicolas Engelhard, pasukan Inggris dapat dipukul mundur dan meninggalkan Batavia pada 9 November 1800. Inggris mengalihkan serangannya ke Kepulauan Ternate dan pada 19 Juni 1801 Ternate jatuh ke tangan Inggris. Perjanjian Amiens yang dibuat antara Prancis, Republik Batavia dan Spanyol di satu pihak dan Inggris di lain pihak, menguntungkan Prancis dan sekutunya terutama wilayah koloni, karena dalam perjanjian itu disepakati bahwa Inggris akan mengembalikan semua wilayah yang telah dikuasainya kepada Prancis kecuali

Ceylon. Perjanjian yang ditandatangani pada 25 Maret 1802 memberikan angin segar bagi pengelola koloni Hindia timur. Akibat penandatanganan Perjanjian Amins pada 25 Maret 1802, dewan wilayah Asia berdasarkan keputusan 11 November 1802 membentuk suatu komisi yang bertugas mengajukan nasihat dan pertimbangan kepada pemerintah Belanda agar wilayah koloni dapat segera memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Komisi yang dibentuk itu terdiri atas Dirk van Hogendorp (mantan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa), Mr. J. Meerman, Mr. S.C. Nederburgh (mantan Komisaris Jenderal VOC di Batavia, FOJ Pontoi, Mr. W. Six, CA Verhuel, dan R. Voute. Komisi ini berhasil menyusun undang-undang koloni sebanyak 108 pasal yang disahkan pada tanggal 27 September 1804 (Marihandono, 2005: 10-12).

Pada saat undang-undang koloni itu diberlakukan, wilayah Hindia Timur dalam keadaan darurat, karena perang kembali pecah antara Prancis dan Inggris yang mulai berkobar lagi tahun 1803. Perang tersebut meletus kembali setelah ditandatanganinya Perjanjian Amiens membawa dampak yang besar terhadap masa depan wilayah koloni di Hindia Timur. Perang melawan Inggris baru berakhir setelah setelah Napoleon Bonaparte ditangkap dan dibuang ke Pulau Elba pada tahun 1815. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Republik Bataf mengganti konstitusi tahun 1801 dengan konstitusi tahun 1805 yang memungkinkan kekuasaan negara berada pada satu pimpinan yang dipegang oleh Rutger Jan Schimmelpenninck. Undang-undang koloni yang sudah ada sebelumnya pada tanggal 27 Januari 1806 dicabut dan diganti dengan "Reglement op het Beleid van de Regeering en het Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen en van den Handel op en in Dezelve Bezittingen" (Peraturan Pemerintah, Peradilan dan Perdagangan di wilayah Asia). Undang-undang koloni ini dianggap lebih baik bila dibandingkan dengan undang-undang tahun 1804. Undang-undang yang baru ini melarang kepemilikan tanah bagi orang Jawa dan menuntut agar pribumi disejahterakan dan dimakmurkan.

Untuk melaksanakan rencananya itu Schimmelpenninck mengirim dua orang ke wilayah Hindia Timur yakni C.Th. Elout untuk menjabat sebagai Komisaris Jenderal dan Dr. Carel Hendrik van Grasvelt untuk menduduki jabatan Gubernur Jenderal menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese. Keduanya berangkat menuju Jawa melalui Amerika. Setibanya di New York mereka menerima surat melalui Duta Besar van Pollanen yang isinya mereka berdua diperintahkan untuk kembali ke Belanda karena Republik Bataf telah dibubarkan dan Pemerintahan di Belanda telah digantikan dengan sistem

Kerajaan di bawah kekuasaan Raja Louis Napoleon, adik kandung Napoleon Bonaparte (Marihandono, 2005: 12-13).

Kekuasaan pemerintahan atas daerah-daerah jajahan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab raja. Pada tahun 1806 dan 1807 merupakan tahun kehancuran militer di Hindia Timur, karena armada Inggris telah beberapa kali menyerang pelabuhan di Pulau Jawa dan menghancurkan semua kapal laut yang ada di pelabuhan itu. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan pemberontakan yang terjadi di wilayah Cirebon yang dimulai pada tahun 1806. Pemberontakan Cirebon sangat menyita pemerintah kolonial, karena dikhawatirkan menjalar ke wilayah lain di Jawa. Louis Napoleon berpendapat bahwa Koloni Hindia Timur, khususnya Jawa harus dipimpin oleh seorang militer yang kuat, yang mampu mempertahankan diri dari serangan Inggris dan memiliki potensi untuk membuat perubahan. Oleh karena itu, Raja Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur pada 29 Januari 1807. Daendels satu-satunya orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena Daendels sebagai mantan komandan Legiun Asing (Legio Etrangere) Prancis ia memiliki kemampuan itu, dan dianggap mampu memperjuangkan kepentingan Prancis di Hindia Timur.

Daendels mengemban dua tugas pokok yaitu menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi di wilayah koloni. Sebelum keberangkatannya ke Pulau Jawa pada 9 Februari 1807, Daendels menerima tiga instruksi khusus dari Raja Belanda, yaitu: Instruksi untuk Gubernur Jenderal, Instruksi untuk Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia (Raad van Indie), dan Instruksi untuk membubarkan pemerintahan tinggi (Hooge Regering) di Batavia. Setelah menempuh perjalanan selama 10 bulan dari Negeri Belanda, Daendels mendarat di Anyer bersama lima orang ajudannya. Di Anyer, Daendels bersama rombongan disambut oleh Komandan Militer Banten PP Du Puy yang mewakili Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese. Setelah menempuh perjalanan darat selama empat hari, Daendels bersama rombongan sampai ke Batavia untuk menemui Gubernur Jenderal. Walau tanpa sepuuk surat pun Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese, pada 14 Januari 1808 menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Hal itu dilakukan, karena sebelumnya ia telah mengetahui pergantian itu dari koran Amerika (Stapel, 1940: 32-35).

Gubernur Jenderal H.W. Daendels (memerintah 1808-1811) dipandang sebagai peletak dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Daendels mengemban dua tugas pokok yaitu menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan

membenahi sistem administrasi di wilayah koloni. Daendels menerapkan dua perintah itu lebih bersifat politis daripada ekonomis. Penerapan perintah itu dilakukan dengan menjalankan sentralisme kekuasaan pemerintahannya dalam semua bidang. Selama masa pemerintahannya, aspek politik lebih dominan, terbukti dengan dilakukannya kebijakan militerisasi birokrasi, pengaturan kembali hubungan dengan penguasa pribumi, penataan pemerintahan, yaitu dengan menghapuskan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa dan penggantian Residen menjadi Prefek yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal. Para Prefek berkedudukan di Semarang, Tegal, Pekalongan, Jepara, Juwana, Rembang, Gresik, dan Surabaya. Prefek adalah orang pertama di prefekturnya dan dianggap sebagai pejabat Gubernur di sana. Prefek wajib untuk menjaga keamanan dan keteriban di wilayahnya serta menjalankan fungsi pemerintahan di sana. Para prefek selain bertugas untuk mengawasi para bupati dan pejabat lain di bawahnya agar mematuhi kewajibannya, juga mengawasi agar orang pribumi tidak diperlakukan sewenang-wenang dan dikembalikan hak-hak yang dimilikinya. Orang pribumi harus dibebaskan dari semua tekanan, seperti tertuang dalam pasal 21 bahwa penyewaan desa dan ibukota kabupaten (negori) kepada orang Cina dan bangsa lain dilarang, kecuali demi kepentingan negara seperti penyewaan tanah untuk penggilingan gula, tambak garam, dan sarang burung. Pada tanggal 1 September 1808 di Semarang telah diputuskan Peraturan Reorganisasi Pemerintahan di Pulau Jawa yang berisi 82 pasal. Wilayah Pantai Timur Laut Jawa dan Ujung Timur dibagi menjadi 9 prefektur yaitu: Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan dan Sumenep (Stapel, 1940: 40).

Setelah Daendels melakukan reorganisasi di Jawa, Daendels menempatkan Pemerintahan Tinggi sebagai pusat kekuasaan. Gubernur Jenderal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki fungsi dan wewenangnya untuk mengatur menurun sampai pada eselon paling bawah. Setiap pegawai pemerintah menerima instruksi yang jelas, menerima gaji sesuai jabatannya. Eselonisasi kepangkatan diatur kembali. Hubungan antara pejabat pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan pangkat militer kepada pejabat di daerah. Penghapusan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa merupakan langkah penting dalam proses menuju pemberantasan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Sentralisme kekuasaan dimaksudkan untuk memberantas korupsi. Sebelum pemerintahan Daendels, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa memiliki lebih banyak kekuasaan ketimbang pemerintahan pusat Batavia. Para pejabat bawahan sebelumnya lebih banyak hidup berkat sumber pendapatan gelap yang diperolehnya, berdampak besar pada

pembentukan birokrasi yang terpusat pada Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Para pejabat rendahan dengan mudah melakukan suap kepada pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Daendels melakukan pembenahan Pantai Timur Laut Jawa dengan melakukan reorganisasi untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan di daerah. Masuknya militer dalam birokrasi pemerintahan bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian aparat di bawahnya. Penghapusan wilayah Pantai Timur Laut Jawa dan pembagian wilayah Pantai Timur Laut Jawa menjadi sembilan prefektur merupakan upaya Daendels untuk mewujudkan sentralisasi kekuasaan dalam pemerintahannya.

Setiap prefektur dibagi dalam beberapa distrik yang dipimpin oleh pejabat pribumi seorang bupati. Para bupati itu juga menerima pangkat militer sesuai dengan jabatan yang melekat pada dirinya. Pemberian pangkat militer kepada pejabat sipil untuk memudahkan pelaksanaan sentralisme pemerintahan. Dengan masuknya militer dalam birokrasi diharapkan mereka memiliki disiplin yang tinggi, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian aparat yang berada di bawahnya. Daendels menerapkan prinsip birokrasi Napoleon. Aparat di bawahnya menerima instruksi yang jelas lengkap dan sangsinya. Mereka memperoleh gaji yang memadai bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pemberian gaji yang tinggi bagi semua pejabat memiliki dampak yang baik, karena pejabat tidak perlu lagi mencari tambahan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Marihandono, 2005: 140-141).

Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan, pengangkatan, pemecatan, dan pemindahan baik pejabat Eropa maupun pribumi langsung ditangani oleh Gubernur Jenderal. Penggantian para Residen Pertama (Eerste Residenten) dan para Menteri di Vorstenlanden, ditentukan oleh Daendels. Pengangkatan para bupati berada langsung di bawah Gubernur Jenderal. Kebiasaan memberi hadiah, upeti, ataupun uang bakti kepada atasan saat pelantikan jabatan, ulang tahun, tahun baru dilarang keras oleh Daendels. Mereka yang melanggar aturan ini akan dipecat dari jabatannya. Kebijakan Daendels terhadap para raja pribumi dilakukan dengan mengubah hubungan antara mereka dan pemerintah kolonial, yang semula hubungannya bersifat horizontal berubah menjadi hubungan vertikal. Hubungan antara para raja dan pemerintah kolonial bukan lagi hubungan pemilik dan penyewa tanah, melainkan antara yang menguasai dan yang dikuasai (subordinasi). Dengan kekuatan militer Daendels memaksa para raja Jawa tunduk kepada Gubernur Jenderal dan mengakui bahwa ia adalah wakil Raja Belanda. Penggunaan kekuatan militer saat itu kepada raja-raja Jawa membangkitkan ketakutan tidak hanya di kalangan kraton tetapi juga rakyat.

Pamer kekuatan yang seharusnya ditujukan kepada pasukan Inggris digunakan untuk mengancam para raja Jawa, dengan satu tujuan untuk menegaskan sentralisme kekuasaan di Jawa (Marihandono, 2005: 185-186).

Pada masa pemerintahan Daendels, bidang peradilan mulai ditingkatkan peranannya. Lembaga peradilan berfungsi sebagai alat pengontrol pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnegara. Daendels menambah jumlah pengadilan tinggi di Jawa dan mengeluarkan instruksi bagi kinerja bagi kinerja peradilan. Untuk mengefektifkan lembaga peradilan, didirikan pengadilan negeri (*landgericht*) di tingkat prefektur, dengan melibatkan seluruh aparat pemerintahan dari tingkat prefektur sampai dengan bupati. Untuk menjamin terlaksananya instruksi atau aturan dikeluarkan aturan tanggal 2 Februari 1808 tentang pelarangan menerima hadiah lengkap dengan sanksi yang diberikan akibat pelanggannya (Marihandono, 2005: 187)

Dalam bidang perdagangan, Daendels mengatur penyerahan komoditas dagang, dengan cara menyeragamkan bobot timbangan dan mengatur kembali penimbunan komoditas ini di gudang pemerintah. Penyeragaman bobot itu dilakukan untuk menghindari manipulasi bobot komoditas hasil bumi yang dilakukan oleh pejabat pribumi maupun pejabat eropa pada waktu menyerahkan komoditas itu kepada pemerintah. Daendels mengatasi masalah keuangan dengan melakukan penyeragaman harga komoditas hasil bumi yang jumlahnya sangat banyak. Untuk mengatasi krisis keuangan, Daendels menjual tanah-tanah partikelir, yang hasilnya digunakan untuk menutup biaya operasional pemerintah. Upaya terakhir yang dilakukan Daendels sebelum kembali ke Prancis adalah mengeluarkan mata uang dengan jaminan hasil penjualan tanah di Probolinggo yang dikenal dengan nama mata uang Probolinggo. Kebijakan pertanahan Daendels dilakukan dengan pengambilalihan tanah-tanah negara yang disewa pihak swasta dan dinilai tidak produktif, atau penaguran kembali tanah-tanah kerajaan di Banten, Cirebon, Yogyakarta dan Surakarta. Tanah-tanah itu dijual kepada pihak swasta untuk menutupi defisit keuangan pemerintah, seperti yang terjadi pada tanah-tanah di ujung timur Pulau Jawa (Probolinggo, Basuki, dan Pasuruan). Berhubung karena kegiatan penjualan tanah-tanah partikelir ini dapat cepat menghasilkan uang, maka Daendels menetapkan kembali batas-batas wilayah kraton Surakarta dan Yogyakarta, dengan tujuan untuk menentukan tanah-tanah partikelir di sekitar Vorstenlanden.

Kebijakan tata kota dilakukan Daendels dengan membongkar Kota Batavia lama dan membangun kota baru di Weltevreden (daerah Jakarta Pusat sekarang)

yang dianggap lebih sehat dan nyaman. Untuk menjadikan Weltevreden sebagai kota sehat, semua makam baik makam orang Eropa, orang Cina, orang Moor maupun pribumi harus dijauhkan dari pemukiman. Daendels mengeluarkan keputusan untuk memindahkan makam-makam itu. Penduduk Batavia dipermudah aktivitasnya dengan dilakukannya penataan institusi pemerintahan dalam satu kompleks bangunan. Dalam kehidupan keagamaan, selain agama Protestan, Daendels memberikan pengakuan kepada agama Katolik, dengan memberikan lahan untuk pembangunan gereja Katolik dan rumah pastor yang bertugas di gereja. Daendels menetapkan adanya pertahanan teritorial di setiap kota untuk melindungi kota. Oleh karena itu ia mendirikan sejumlah benteng, seperti benteng Meester Cornelis dibangun di sebelah selatan Weltevreden, benteng Lodewijk dibangun di Gresik, dan benteng lain di Sronol di dekat Kota Semarang, lengkap dengan pasukan pribumi yang ditempatkan di benteng itu. Kebijakan tata kota lainnya adalah Daendels menjadikan Kota Buitenzorg sebagai kota penting sebagai tempat tinggal Gubernur Jenderal. Pemilihan Buitenzorg sebagai tempat tinggal memiliki fungsi strategis karena dianggap cukup aman dari serangan musuh yang dipastikan akan datang dari laut. Untuk mencapai tempat tinggal Gubernur Jenderal, musuh harus melalui pertahanan berlapis yakni pertahanan lapis pertama di Weltevreden, lapis kedua di Meester Cornelis dan lapis ketiga di Buitenzorg (Marihandono, 2005: 388-389).

Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintahan tinggi di Batavia dan aparat pemerintahan di daerah, maka Gubernur Jenderal wajib memperhatikan sarana yang paling cocok dirancang melalui kesepakatan dengan para bupati pribumi dan diterapkan untuk memperbaiki dan menjamin nasib orang Pribumi di wilayah Hindia Timur. Sarana yang paling cocok untuk menjamin komunikasi antara Pemerintah Tinggi di Batavia dan para pejabat pribumi adalah membuat jalan raya. Pembangunan Jalan Raya Pos, ternyata bukan hanya kepentingan militer saja yang terlayani, tetapi juga untuk pengembangan sosial, ekonomi dan politik. Jalan tersebut tidak hanya berperan dalam bidang transportasi, tetapi juga dalam bidang administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial. Gagasan pertama untuk membangun jalan raya dari Buitenzorg menuju ke Karangasambung dicanangkan oleh Daendels pada 5 Mei 1808, ketika Dendels baru tiba dari Buitenzorg ke Semarang. Sebagian besar proyek pembukaan jalan raya ini ditujukan untuk memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa yang telah ada. Kepemimpinan proyek ini diserahkan kepada pimpinan pasukan zeni. Untuk jalur dari Buitenzorg ke Karangasambung yang berjarak 150 kilometer dikerjakan oleh tenaga yang

dibayar. Daendels menginginkan agar pembangunan jalan itu diteruskannya dari Semarang menuju ke Timur agar jalan itu dapat dilalui sepanjang musim.

Biaya untuk pembangunan jalan bagian ini bukan biaya negara, tetapi menjadi tugas para pejabat setempat. Jalan ini dikerjakan dalam bentuk kerja wajib di bawah pimpinan para pejabat Jawa karena pemerintah sudah tidak memiliki dana lagi. Oleh karena itu, pembangunan jalan itu menjadi tanggungan para pejabat pribumi. Daendels menegaskan bahwa jalan harus dibuat antara ujung Barat sampai ujung Timur yang jaraknya hampir 1000 kilometer. Karya terbesar Daendels di Hindia Belanda adalah pembangunan jalan raya ini. Sebagian dari jalan ini dikerjakan tanpa upah karena menurut Daendels masyarakat juga dapat memanfaatkan jalan itu. Dengan dibangunnya jalan raya ini maka terjadilah komunikasi antara Batavia dan daerah. Setelah selesai pembangunan jalan raya yang menghubungkan Pulau Jawa di bagian barat dan timur, maka dibutuhkan perawatan dan pengaturan pemanfaatannya. Oleh karena itu Daendels mengeluarkan tiga peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan jalan raya itu. Peraturan pertama dikeluarkan pada 12 Desember 1809 yang mengatur aturan umum pemanfaatan jalan raya, pengaturan pos surat dan pengelolanya, penginapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos, komisariss pos, dinas pos dan jalan yang semuanya terdiri dari 90 pasal. Peraturan kedua dikeluarkan pada 16 Mei 1810 tentang penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos beserta gerobaknya. Peraturan ketiga tentang penggunaan pedati atau kereta kerbau baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari landrost Jakarta, Priangan dan Cirebon sampai di Surabaya, yang dikeluarkan pada 21 November 1810 (Marihandono, 2005: 110-111).

Daendels dikenal memiliki sifat gila hormat, gila kuasa dan keras kemauannya. Karena sifat-sifatnya itu ia dijuluki Tuan Besar Bledeg (Tuan Besar Guntur), sehingga mengundang kebencian rakyat dan para pegawainya. Louis Napoleon yang merasa bertanggung jawab atas baik-buruknya pemerintahan di Indonesia, merasa tersinggung kehormatannya atas sikap Daendels itu. Oleh karena itu, pada tahun 1811 ia dipanggil ke Eropa diganti Jansens. Setelah dicopot dari jabatannya, ia menjadi opsir tentara Perancis dan ikut menyerang Rusia pada tahun 1812. Ketika Napoleon jatuh pada tahun 1814, Daendels kembali ke Negeri Belanda dan diangkat menjadi Gubernur di Guinea Afrika (Afrika Barat) sampai meninggal pada tahun 1818.

3.2 Masa Pemerintahan Liberal 1811-1816

Setelah Daendels diganti Jansens, tentara Inggris di bawah pimpinan Lord Minto menyerang Jawa. Inggris mendapat simpati raja-raja di Jawa, sehingga dengan mudah dapat merebut Batavia. Pada tahun 1811 itu Jansens menyerah tanpa syarat kepada Inggris di Tuntang, sehingga terjadi rekapitulasi Tuntang yang berisi (1) seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris, (2) hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris, dan (3) Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi milik Inggris. Artinya, Belanda menyerahkan semua daerah jajahannya di Asia Tenggara kepada Inggris. Inggris membagi empat semua bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara yaitu Sumatera Barat, Malaka, Maluku, dan Jawa serta daerah sekitarnya. Semua bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara dikuasai oleh Gubernur Jenderal EIC (East Indian Company), Lord Minto yang berkedudukan di Calcutta (India). Pulau Jawa diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles selaku wakil Lord Minto di Pulau Jawa dengan pangkat Letnan Gubernur. Untuk melancarkan pemerintahannya, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan (pada masa Daendels hanya dibagi menjadi 8 prefektur).

Pada setiap keresidenan dibentuk badan pengadilan (*landraad*). Saai itu tidak ada ancaman musuh, sehingga tugas utama Raffles adalah memperbaiki nasib rakyat dengan cara menghapus pajak hasil bumi (*kontingen*) dan leveransi paksa dan menggantinya dengan pajak tanah (*landrente*). Dengan pengertian bahwa semua tanah milik Gubernemen sehingga rakyat wajib membayar rente atau sewa. Pajak tanah ditetapkan sebesar 2/5 hasil panen, boleh dibayar dengan hasil bumi atau uang. Raffles juga menjual tanah Gubernemen kepada orang-orang swasta. Raffles melarang perdagangan budak dan *pandelingschap* (membayar hutang dengan tenaga). Raffles mengadakan monopoli garam. Selain menerapkan kebijakan di bidang politik dan ekonomi, Raffles juga memperhatikan bidang kebudayaan. Raffles menulis buku *History of Java* pada tahun 1817. Raffles membantu lembaga Betawi untuk kesenian dan pengetahuan. Ia juga memberi bantuan kepada ahli-ahli pengetahuan seperti Horsfield, Crewford, dan Mackensie, untuk meneliti sejarah Indonesia kuno. Setelah kedudukannya kuat, Raffles lalu mengambil berbagai tindakan terhadap raja-raja di Indonesia, misalnya: Sultan Banten dan sultan Cirebon dijadikan

sultan-sultan yang digaji; Sultan Hamengku Buwono II dari Yogyakarta diasingkan ke Pulau Penang dan puteranya dipaksa menggantinya sebagai Hamengku Buwono III; Beberapa daerah kesultanan Yogyakarta pada tahun 1813 diserahkan kepada Pangeran Notokusumo, yang bergelar Paku Alam I di Pakualaman; Paku Buwono IV harus menyerahkan Banyumas dan Madiun kepada Inggris (Wiharyanto, 2017).

Ide dasar politik kolonial Raffles bertolak dari ideologi liberal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasannya. Pelaksanaan politik liberal itu telah merombak dan mengganti struktur tradisional dan feodal dengan sistem baru yang didasarkan pada prinsip legal-rasional. Dalam melaksanakan politiknya, Raffles dihambat oleh unsur feodal yang sangat kuat kedudukannya dan sistem ekonomi yang masih bersifat tertutup, sehingga pembayaran pajak belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan uang, tetapi in natura (hasil bumi). Dengan kata lain, politik kolonial berdasarkan liberalisme tidak cocok dan tidak realistis. Setelah Napoleon jatuh tahun 1814, Inggris dan Belanda mengadakan Traktat London I (1814). Traktat tersebut menyatakan bahwa semua daerah jajahan Belanda yang direbut Inggris, dikembalikan kepada Belanda, kecuali Kaapkoloni dan Sri Lanka. Keputusan itu mengecewakan Raffles. Ia tidak mau menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Akan tetapi Raffles dipaksa, sehingga ia mengundurkan diri dan diganti John Fendall. Pada tahun 1816 John Fendall menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda.

3.3 Masa Komisi Jenderal (1816-1819)

Setelah Traktat London I ditandatangani (1814), pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang akan menerima kembali semua jajahannya di Asia Tenggara dari pemerintah Inggris di Indonesia. Walaupun Raffles menghalang-halangi pengembalian daerah jajahan Belanda itu, tetapi usaha tersebut hanya menunda waktu penyerahan, karena akhirnya dikembalikan juga kepada Belanda. Raffles yang tidak setuju pengembalian daerah jajahan tersebut, terutama Pulau Jawa, maka setelah menyerahkan jabatannya kepada Jansens, ia lalu pergi ke Bangkahulu dan menjadi Gubernur di daerah itu. Tetapi tindakan Raffles itu ditentang Muntinghe (penguasa Belanda di Palembang). Akhirnya Raffles pergi ke Selat Malaka. Sewaktu melewati bukit Barisan ia menemukan bunga Rafflesia, yaitu bunga yang terbesar di dunia. Dari situ

akhirnya Raffles berhasil mendirikan Kota Singapura untuk menyaingi dan menutup pelabuhan Belanda di Batavia. Sementara itu, komisi yang dibentuk Belanda untuk menerima kembali Indonesia dari Inggris dinamakan Komisi Jenderal. Adapun anggota komisi tersebut adalah Cornelius Theodore Elout, A. A. Buyskes dan Baron van der Capellen. Pada tahun 1816 komisi itu datang ke Indonesia. Dalam tahun 1816 itu juga Letnan Gubernur Inggris, John Fendall menyerahkan Indonesia kepada Belanda.

Selain bertugas bertugas untuk menerima Indonesia dari tangan Inggris, komisi tersebut juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain yaitu (Wiharyanto, 2017):

- a Menyusun pemerintahan baru.
- b Mengusahakan ketenteraman dan perbaikan nasib penduduk Indonesia, misalnya penduduk harus dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, perdagangan dan pertanian (penanaman) harus bebas, kecuali tanaman kopi, rempah-rempah dan candu.
- c Menyusun angkatan darat dan laut.
- d Menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman pemerintahan Belanda di Indonesia.

Berdasarkan hak dan kewajiban Komisi Jenderal, akhirnya berhasil disusun suatu pedoman pemerintahan yang benar-benar bersifat liberal, yaitu:

- (a) Pajak tanah yang dibuat oleh Raffles dilanjutkan dan disempurnakan agar peraturan-peraturan yang bersifat sewenang-wenang tidak terjadi lagi.
- (b) Pajak tersebut dapat dibayar dengan uang kontan atau dengan barang-barang. Peraturan ini bertujuan agar rakyat terhindar dari para peminjam uang dan memudahkan mereka yang memiliki uang.
- (c) Pajak kepala tidak dipungut secara perorangan tetapi dibayar oleh desa. Cara ini menyimpang dari tujuan, namun merupakan pendekatan yang lebih realistis. Sistem tersebut dapat mengurangi banyaknya petugas, serta mengatasi kesulitan tanah-tanah yang belum diukur secara rinci.
- (d) Besarnya pajak harus disetujui oleh kerajaan dan desa yang bersangkutan.

- (e) Rakyat tidak boleh disuruh kerja paksa. Orang-orang yang datang bekerja dengan sendirinya harus dibayar sesuai dengan bidang garapnya.
- (f) Penanaman wajib bagi tanaman-tanaman tertentu diteruskan guna mendapatkan devisa negara, misalnya kopi di Priangan. Pengawasan tanaman model pelayaran Hongi di Maluku, dihapuskan.
- (g) Perlu ada penambahan pegawai, pegawai yang buruk dipecat. Pegawai pribumi diperlakukan dengan hormat, dan digaji dengan uang (bukan tanah atau memeras rakyat).
- (h) Sistem pemerintahan tidak langsung dihidupkan kembali, pengadilan dibentuk, dengan sistem dua lapis. Perkara yang menyangkut orang Eropa dan pribumi hendaklah diadili dalam pengadilan yang berbeda, dan dipimpin oleh hakim bukan juri.
- (i) Pembaruan Raffles yang menghormati hak asasi manusia dan penghapusan perbudakan diteruskan dan diabadikan.

Rencana undang-undang yang dibuat oleh Komisi Jenderal tersebut disahkan pada tahun 1819. Berdasarkan roh undang-undang baru itu dapat diketahui bahwa pemerintah Belanda akan menguntungkan rakyat Indonesia akan diberlakukan, terutama di Jawa. Jika undang-undang itu dilaksanakan secara jujur, maka rakyat Indonesia akan terbebaskan dari pemerintahan yang kejam yang telah dirasakan selama ini. Pemberlakuan undang-undang tersebut menyebabkan Belanda mendapat faedah yang besar. Nampaknya undang-undang yang bersifat liberal ini benar-benar akan dilaksanakan sungguh-sungguh sebab salah seorang anggota Komisi Jenderal, yakni Gourdet A. Baron van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal yang baru, sekaligus yang akan melaksanakan undang-undang yang liberal itu.

3.4 Masa van der Capellen (1819-1825)

Pada tahun 1819 tugas Komisi Jenderal dinilai sudah selesai, sehingga Elout dan Buyskes kembali ke Netherland. Sedangkan van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal. van der Capellen ikut menyusun undang-undang yang akan diterapkan di Indonesia setelah wilayah itu kembali kepada

Belanda. van der Capellen diangkat sebagai Gubernur Jenderal karena dia dianggap yang paling mengetahui bagaimana undang-undang itu dilaksanakan. Akan tetapi van der Capellen ternyata tidak melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Alasan van der Capellen melakukan penyimpangan terhadap undang-undang tersebut karena undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi di Indonesia saat itu. Menurut van der Capellen, tugas yang paling penting adalah mengumpulkan uang untuk menjalankan pemerintahan yang baru itu. Apabila peraturan yang liberal dalam *regerings-reglement* tahun 1819 itu diterapkan sepenuhnya, maka tidak akan memperoleh dana. Dengan alasan tersebut, van der Capellen ingin mencari jalan pintas. Oleh karena itu, beberapa peraturan ditangguhkan, sedangkan aturan-aturan yang menguntungkan pemerintah dilakukan. Karena tindakannya itu, Clive Day menyebut van der Capellen adalah Gubernur Jenderal yang reaksioner. Pendapat tersebut juga sejalan kritik-kritik yang dilakukan berbagai pihak kepada van der Capellen.

Menurut Clive Day, van der Capellen selama tujuh tahun pemerintahannya, mengabaikan undang-undang yang berlaku. Ia kembali kepada sistem lama. Dengan demikian, peraturan pemerintah kolonial menjadi undang-undang yang beku. Meskipun demikian, Cornelius Elout yang ikut menyusun undang-undang itu ikut mempertahankan van der Capellen yang bersikap reaksioner yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat itu. Selama pemerintahan van der Capellen itu, anggaran belanja membengkak, sehingga ia dikecam keras oleh Raja dan orang-orang Belanda. Sementara di Indonesia terus berlangsung peperangan. Semua ini semakin meyakinkan banyak orang bahwa praktek pemerintahan liberal itu telah gagal. Di antara pembaruan-pembaruan yang dicoba oleh van der Capellen adalah pembaruan sistem perdagangan yang akhirnya mengundang kemarahan orang-orang Eropa (terutama orang Belanda) terhadapnya. Dalam tahun 1821 van der Capellen mengeluarkan undang-undang yang melarang segala bentuk perdagangan Eropa di daerah kopi (Priangan), kecuali dengan izin khusus. Ia melakukan hal tersebut dengan harapan untuk melindungi orang-orang Indonesia agar tidak ditipu oleh para pedagang Eropa serta untuk memperbesar hasil bagi pemerintah Belanda. Tindakan lain yang juga mengundang kemarahan orang Eropa adalah peraturan yang dikeluarkan tahun 1823.

Dalam pembaruan itu dia melarang orang-orang Eropa menyewa tanah rakyat. Peraturan ini juga untuk melindungi orang pribumi. Orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang merasa paling dirugikan adalah mereka yang menyewa tanah di Surakarta dan Yogyakarta. Mereka sudah membayar uang muka yang besar, sehingga sewaktu peraturan itu turun, mereka menuntut pengembalian

uang. muka yang sudah habis dibelanjakan oleh orang-orang pribumi. Akibatnya orang-orang pribumi itu, terutama para pegawai dan peladang merasa kecewa terhadap pemerintah Belanda. Anggaran belanja negara semasa pemerintahan van der Capellen senantiasa menunjukkan defisit, sehingga Negeri Belanda harus menutupnya. Dalam kondisi kesulitan keuangan yang dialami Negeri Belanda pada waktu itu, suatu koloni yang tidak mampu memenuhi keperluan sendiri adalah sesuatu yang tak ada gunanya. Oleh karena keadaan itu tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pada tahun 1825 Pemerintah Belanda memanggil Gubernur Jenderal van der Capellen kembali ke Negeri Belanda (Wiharyanto, 2017).

3.5 Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Sejak masa pemerintahan van der Capellen, pemerintah Belanda berusaha untuk memperbaiki keuangan di Hindia Belanda. Usaha tersebut mendapat hambatan akibat persaingan perdagangan dengan Inggris. Dalam perdagangan Samudera, Inggris mengungguli perdagangan Belanda. Di kawasan Selat Malaka, pedagang-pedagang Inggris telah menggantikan pedagang-pedagang Belanda. Berdirinya Singapura pada tahun 1819, menyebabkan peranan Batavia semakin merosot sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 (Konvensi London) menyebabkan Inggris masuk ke kawasan itu untuk seterusnya. Barang-barang buatan Inggris menyaingi barang-barang Belanda, termasuk yang dikonsumsi di Jawa. Di kepulauan Nusantara sendiri, Belanda juga kehilangan banyak perdagangan pulau karena diambil pedagang-pedagang Bugis dan Cina. Kekuasaan Belanda terhadap perdagangan di luar Pulau Jawa telah diungguli oleh kekuatan ekonomi Cina. Kegiatan-kegiatan perkapalan dan perdagangan Belanda di Asia Tenggara dan di tempat-tempat lain mengalami kemerosotan yang parah. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan jatuhnya harga kopi pada tahun 1820-an yang disebabkan oleh masa meleset di Eropa. Kopi merupakan andalan pendapatan utama bagi Belanda, sehingga dengan jatuhnya harga kopi tersebut memberi pukulan yang berat bagi pemerintah Hindia Belanda. Program-program yang dipraktekkan antara tahun 1819 hingga 1824 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari Jawa, semuanya mengalami kegagalan.

Sistem liberal dari Raffles diterapkan oleh Belanda tidak dapat memperbaiki kondisi Indonesia. Petani-petani Indonesia tidak mampu menggunakan

kebebasan bertanam itu untuk menyelesaikan krisis keuangan di Indonesia. Di Eropa keadaan Negeri Belanda tidak jauh berbeda dengan keadaan negara-negara yang dikuasai Perancis. Belanda kehilangan peranannya sebagai distributor hasil-hasil Eropa dan Asia Tenggara. Setelah era Napoleon, Perancis mampu mengembangkan perusahaannya sendiri, sehingga tidak mengalami ketergantungan lagi. Di Negeri itu semakin ada kecenderungan tidak mau menggunakan Belanda sebagai pedagang perantara. Pada tahun 1830 negeri Belanda pecah karena perlawanan orang-orang Belgia. Perang saudara yang meletus itu berlangsung beberapa tahun lamanya dan menyebabkan keruntuhan keuangan Belanda dan berakhir dengan kemerdekaan Belgia. Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan Culturstelsel (Sistem Tanam Paksa) sebagaimana direncanakan oleh van den Bosch itu dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi kemerosotan keuangan Belanda saat itu.

Culturstelsel mempunyai dua tujuan yaitu (Wiharyanto, 2017):

- (a) Culturstelsel untuk memperoleh uang yang sebanyak-banyaknya dari penjualan hasil bumi yang laku di Eropa. Pemerintah Hindia Belanda menentukan tanaman-tanaman yang akan ditanam dan sebagian dari hasil tanaman itu diserahkan kepada Belanda. Penyerahan hasil tanaman itu merupakan pengganti pajak tanah. Kelebihan hasil tanaman itu dijual kepada Belanda dengan harga yang sangat murah. Hasil-hasil tersebut akan dibawa ke Amsterdam oleh pedagang-pedagang dan kapal-kapal Belanda. Dengan cara seperti itu, Amsterdam akan menjadi bandar distribusi hasil-hasil dari Indonesia. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki keuangan Belanda.
- (b) akan mendorong orang pribumi untuk memperoleh lebih banyak uang dengan menanam lebih banyak tanaman ekspor. Orang Belanda percaya bahwa jika dipaksa, orang-orang pribumi Culturstelsel itu dapat mencari jalan keluar dari kemiskinannya.

Dalam rencana pelaksanaan Culturstelsel dimasukkan unsur-unsur liberal supaya orang-orang liberal di Negeri Belanda tidak menentangnya. Menurut sistem ini, orang-orang Indonesia itu lebih bebas menggunakan waktunya serta uangnya asal saja mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu. Pada awalnya pemerintah tradisional mengatur rakyat dalam menentukan tanaman

dan yang akan diserahkan kepada Belanda. Berdasarkan kebijakan tersebut, terdapat kerjasama antara pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat Indonesia, kedua-duanya akan diuntungkan. Namun kenyataannya, pihak Belanda yang paling diuntungkan. Rakyat Indonesia yang terlibat dalam Sistem Tanam Paksa, mempunyai kesempatan untuk membeli barang-barang impor buatan Belanda. Dengan demikian Belanda memperoleh pasar tertutup yang lebih menguntungkan. Hal inilah yang mendorong pemerintah Negeri Belanda menggalakkan pengiriman barang-barangnya ke Indonesia.

Pokok-pokok Culturstelsel

- a) Orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanah sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi, teh, gula, nila. Tanah yang diserahkan itu tidak lebih dari seperlima dari seluruh sawah desa.
- b) Bagian tanah yang disediakan seperlima luas sawah itu bebas dari pajak.
- c) Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri.
- d) Hasil tanaman yang dipungut itu dikirim ke pusat-pusat daerah untuk ditimbang. Sebagian dari hasil tanaman itu, yaitu kira-kira sebanding dengan nilai sewa tanah itu, akan diserahkan kepada Belanda, selebihnya akan dibayar oleh Belanda. Hal ini bertujuan untuk memacu penanam tanaman ekspor itu supaya bertanam dan memajukan tanaman ekspor itu.
- e) Jika tanaman itu rusak akibat bencana alam seperti kemarau panjang, banjir, serangan serangga dan bukan disebabkan oleh kelalaian penanam, maka penanam-penanam itu tidak diwajibkan mengirimkan hasil punggutannya kepada Belanda.
- f) Para penanam itu akan bekerja di bawah pimpinan para pamong praja dan diawasi oleh pegawai-pegawai Belanda. Pegawai-pegawai Belanda bertugas untuk memastikan pekerjaan di ladang, pemungutan hasil dan pengangkutan hasil tanaman itu.

- g) Penduduk yang tidak menyediakan tanahnya untuk Culturstelsel, wajib bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik selama seperlima tahun atau 66 hari dalam setahun tanpa imbalan.
- h) Ada pembagian tugas yang jelas yaitu ada yang bertugas menanam saja, ada yang memungut hasil, ada yang bertugas mengirim hasil ke pusat-pusat pengumpulan, dan ada yang bekerja di pabrik. Pembagian tugas ini bertujuan untuk menghindarkan agar tidak ada tenaga yang harus bekerja sepanjang tahun terus-menerus.

Aturan Pencegahan Penyalahgunaan Culturstelsel

Orang percaya bahwa program yang dibuat oleh van den Bosch memperhitungkan kepentingan rakyat banyak. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Culturstelsel.

Adapun aturan-aturan yang menjaga agar Culturstelsel tidak disalahgunakan antara lain:

- 1) Sistem Tanam Paksa itu menegaskan bahwa persetujuan hendaklah dibuat dengan rakyat.
- 2) Sistem itu mengakui pemaksaan tetapi digabungkan dengan perusahaan bebas (pemaksaan yang baik).
- 3) Besarnya pajak tidak terlalu tinggi yaitu kira-kira hanya 20% saja.
- 4) Jika nilai/hasilnya melebihi nilai sewa tanah, maka yang lebihnya akan diberikan kepada penanamnya.
- 5) Adat-istiadat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dijamin oleh para pamong praja.

Pelaksanaan Culturstelsel

Dalam sepuluh tahun pertama, Culturstelsel berhasil dengan baik. Pada tahun 1831 saja, van den Bosch telah mampu menyehatkan anggaran belanja. Kondisi tersebut menyebabkan kekurangan dana dapat diatasi, bahkan setelah itu terjadi kelebihan anggaran. Keadaan itu berjalan terus dan taraf hidup rakyat Indonesia tentu akan bertambah baik jika sekiranya tidak terjadi pemberontakan Belgia. Pemberontakan tersebut menyebabkan terjadinya krisis keuangan negara Belanda. Oleh karena itu, penghasilan Culturstelsel harus ditingkatkan untuk

mengatasi krisis tersebut. Rencana untuk memeras ekonomi Indonesia dilakukan dengan kedok agama dan adat-istiadat rakyat, dan hubungannya dengan pejabat-pejabat tradisional seperti raja, bupati, wedana maupun lurah. Kedudukan para pejabat tradisional itu digunakan oleh Belanda untuk memaksa rakyatnya bekerja sesuai dengan kehendak Belanda. Sebagai imbalannya, para pejabat tradisional itu diberi sebagian dari hasil yang diserahkan, makin besar yang diserahkan makin besar pula preminya. Untuk mengatur hubungan kerja tersebut, maka dibuat perjanjian tentang pengaturan tenaga dan tanaman yang dikehendaki oleh Belanda. Setiap pejabat tradisional akan mendapat persen dari perjanjian tersebut. Rakyat patuh pada mereka, sebab mereka punya kharisma karena agama dan adat-istiadat. Jika diperintah oleh para pejabat tradisional maka tidak mungkin memberontak kepada Belanda.

Pelaksanaan sistem tersebut dimulai dari penanaman tebu, nila, dan kopi. Hasil tanaman tersebut sangat memuaskan, sehingga macam tanamannya diperluas dengan lada hitam, tembakau, teh, kina, kayu manis, murbai, kapas dan padi. Tanaman di Jawa diawasi sendiri oleh tenaga-tenaga Belanda. Sedangkan tanaman di luar Pulau Jawa dipercayakan kepada pejabat-pejabat setempat. Mengenai Culturstelsel ini, Hall menyatakan bahwa dalam beberapa hal, sistem itu merupakan sistem lama tentang penyerahan paksa dan pengangkutan dalam bentuk yang baru. Clive Day tidak hanya menyamakan dengan sistem lama, tetapi justru mengecam keras. Ia menyatakan bahwa Culturstelsel merupakan suatu sistem pemerasan yang sangat besar dan yang menimbulkan beberapa banyak kesengsaraan bagi para penanamnya. Ia bahkan menuduh van den Bosch mengkhianati kebaikan rakyat Indonesia. Pendapat-pendapat yang lebih liberal mengatakan bahwa sistem itu pada awalnya sangat menjanjikan. Setelah Culturstelsel tidak dijalankan sesuai dengan pokok-pokok sistem Tanam Paksa itu, sehingga sangat merugikan bangsa Indonesia. Sebaliknya Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar. Pada pelaksanaan semua unsur yang ada dalam rencana Culturstelsel, sejak awal sudah disingkirkan semua yang dianggap menghambat pengasilan Belanda. Dengan demikian, Indonesia dipaksa untuk menyelamatkan keuangan Belanda. Dengan praktek pelaksanaan seperti itu, uang dari Indonesia mengalir ke Negeri Belanda untuk menolong negeri itu dari kehancuran ekonomi. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk membina sarana dan prasarana di Negeri Belanda, seperti perbaikan jalan kereta api. Walaupun uang berlimpah-limpah namun Indonesia tetap miskin dan rakyatnya sengsara.

Culturstelsel itu semakin ditingkatkan untuk membangun negeri Belanda. Paksaan semakin ditingkatkan pula, sehingga rakyat Indonesia semakin tertekan. Hampir semua kelebihan dari keuntungan para penanamnya (batig saldo) dikirim ke Negeri Belanda. Dalam tahun 1832 peraturan ekspor diperketat, penjualan hasil kepada Belanda ditekan serendah mungkin atau harus ditentukan oleh Belanda. Sebaliknya, rakyat tidak boleh menjual hasil buminya kepada pedagang lain. Pada tahun 1834 van den Bosch pulang ke Negeri Belanda, namun penggantinya yang konon berpaham liberal, ternyata tetap melanjutkan pemerasan di Indonesia.

Meskipun banyak kecaman, namun van den Bosch melaporkan bahwa Culturstelsel berhasil baik sebab:

- a Untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, perlu dilakukan paksaan kerja.
- b Krisis keuangan yang hebat telah berhasil diatasi.
- c Tanah-tanah yang bisa ditanami bertambah luas.
- d Keamanan dan ketertiban terpelihara.

Sementara itu Negeri Belanda menilai Culturstelsel sebagai berikut:

- a Pelaksanaan Tanam Paksa mampu menghasilkan uang sehingga orang-orang Belanda ikut mendapatkan keuntungan pula.
- b Akibat Culturstelsel pelabuhan Amsterdam kembali muncul sebagai pasar utama bagi hasil bumi Indonesia.
- c Perkapalan Negeri Belanda menempati urutan ketiga setelah Inggris dan Perancis.
- d Persekutuan Dagang Belanda menjadi kaya raya karena persekutuan tersebut mendapat hak mengangkut hasil bumi tersebut.
- e Rakyat Belanda merasa bahwa Indonesia (terutama Jawa) merupakan pelampung penyelamat yang mengapungkan Nederland dari kemerosotan ekonomi.

Penyalahgunaan Culturstelsel

Secara teori, Culturstelsel memang bersifat liberal, namun parkteknnya disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena kepentingan negeri Belanda atau pelaksana di lapangan didahulukan ketimbang kepentingan rakyat Indonesia.

Akibatnya rencana yang diharapkan dapat mengentaskan rakyat tersebut justru menjadi beban yang maha berat dan perlakuan yang tidak adil.

Adapun praktek penyalahgunaan Sistem Tanam Paksa tersebut sebagai berikut:

- (a) Menurut pokok pertama, penanaman tanaman ekspor itu hendaklah disetujui oleh orang-orang Indonesia. Prakteknya, perjanjian itu hanya dibuat dengan para pembesar saja. Para pejabat tradisional itu dibujuk supaya menyetujui perjanjian tersebut dengan janji bahwa mereka akan memperoleh sebagian dari keuntungannya.
- (b) Walaupun dalam perjanjian disebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk Culturstelsel adalah $\frac{1}{5}$ sawah, tetapi prakteknya adalah $\frac{1}{3}$ atau bahkan $\frac{1}{2}$ dari tanah desa, bahkan dipilih tanah yang subur.
- (c) Waktu untuk bekerja buat tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda, jauh lebih lama (lebih dari 66 hari, yaitu antara 200 sampai 225 hari dalam setahun) dari pada waktu yang digunakan untuk mengerjakan tanahnya sendiri.
- (d) Kerapkali orang yang dipekerjakan berasal dari tempat-tempat yang jauh dari kampungnya, padahal makanan harus disediakan sendiri, sedang waktu untuk mengerjakan sawahnya habis, sehingga persediaan makanan kurang sekali.
- (e) Tanah yang diserahkan untuk Culturstelsel ternyata masih tetap dipungut pajak sehingga tidak sesuai dengan perjanjian.
- (f) Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada pemilik tanah, tetapi harus dijual kepada Belanda dengan harga yang murah, karena harga tersebut ditentukan oleh pemerintah Belanda.
- (g) Pengangkutan hasil-hasil tanaman ekspor itu dilakukan sendiri oleh para penanam ke tempat-tempat pengumpulan yang pada umumnya jaraknya sangat jauh sehingga banyak menghabiskan waktu.
- (h) Pembagian tugas yang telah direncanakan tidak dipraktekkan. Ada yang bekerja terus sepanjang tahun, ada yang kerjanya sedikit bahkan ada pula yang tidak bekerja secara langsung. Orang-orang yang paling banyak menderita adalah rakyat yang kerjanya banyak tetapi hasilnya sedikit, terutama bagi mereka yang bertanam nila.

- (i) Dalam pelaksanaannya, tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasilnya menjadi kurang.
- (j) Dengan adanya sistem persen (kultur persen) yang diberikan kepada para pejabat, maka para pejabat itu memaksa orang-orangnya supaya tanamannya bisa menghasilkan lebih banyak.

Dengan adanya praktek-praktek yang menyimpang tersebut, maka penderitaan rakyat terus bertambah. Hal ini disebabkan di samping beban tanam paksa, rakyat masih mempunyai beban yang lain yaitu:

- (a) masih berlakunya landrente untuk bagian yang dipergunakan oleh pemerintah;
- (b) masih adanya cukai-cukai (pasar, jalan), yang kerap kali digadaikan kepada orang-orang Cina.
- (c) pegawai-pegawai yang berkewajiban mengawasi pekerjaan rakyat bertindak sewenang-wenang, semata-mata untuk menambah upah mereka yang didasarkan atas banyaknya hasil bumi yang dikumpulkan;
- (d) rakyat masih mempunyai kewajiban-kewajiban lain, misalnya rodi dan ronda.

Culturstelsel menyebabkan rakyat Indonesia semakin miskin, sehingga di beberapa daerah yang kurang subur mulai diserang bahaya kelaparan. Salah satunya daerah yang tidak menderita hanyalah di Pasuruan, sebab hasilnya berlimpah, sehingga para penanam mampu membayar buruh sawah yang mengerjakan tanahnya. Di sisi lain, keuangan Hindia Belanda berlimpah, bahkan mampu menyelesaikan krisis keuangan Negeri Belanda. antara tahun 1830-1877. Lebih dari 900 juta golden mengalir dari Indonesia ke Belanda. Dengan uang itu Belanda mampu membayar hutangnya kepada Inggris, mengganti uang yang dihabiskan dalam perang dengan Belgia, membiayai perusahaan-perusahaan Belanda, dan membuat jalan-jalan kereta api di Negeri Belanda.

3.6 Politik Kolonial Liberal (1850-1870)

UUD Belanda tahun 1814 mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dipegang oleh raja. Ini berarti, bahwa di daerah-daerah kekuasaan Belanda di luar Eropa, termasuk Indonesia, tidak turut campur dalam pemerintahan, misalnya: Sesudah Culturstelsel berjalan di Indonesia, maka mengalirlah uang ke dalam kas negeri Belanda. Pemasukan uang itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tentang caranya pemerintah mendapatkan uang itu dirahasiakan benar-benar. Menteri daerah jajahan van den Bosch mengusulkan, agar daerah jajahan memikul sebagian dari hutang piutang Negeri Belanda. Usul ini ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan lantaran cara mendapatkan uang itu, tetapi lantaran caranya raja mempertanggungjawabkan pemakaian uang itu. Dengan demikian daerah jajahan itu sebetulnya ada di dalam genggamannya raja Belanda. Tak ada badan atau orang yang mengkritik cara-caranya memerintah di daerah-daerah itu.

Apabila raja menyetujui suatu sistem yang dijalankan di Indonesia, maka dapat dikatakan tidak akan ada kritik yang dikeluarkan untuk menguji baik-buruknya sistem itu. Kira-kira pada pertengahan abad ke-19 di Eropa timbul suatu gerakan politik yang bertujuan mendorong pemerintah agar rakyat diajak pula berunding dalam pemerintahan. Di negeri Belanda gerakan tersebut juga ada. Di dalam dewan perwakilan rakyat mereka masih menjadi golongan yang terkecil. Tetapi dalam suatu rapat mereka berani mengajukan usul, supaya diadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan daerah jajahan, terutama tentang kekuasaan raja dalam pemerintahan itu. Mula-mula usul itu ditolak parlemen, tetapi ketika tahun 1848 di beberapa negara di Eropa berkobar pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada, terpaksa pemerintah Belanda mengubah pasal-pasal UUD yang berkaitan dengan kekuasaan raja atas daerah jajahan. Pasal-pasal itu diubah sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap tahun raja Belanda diharuskan menyampaikan pertanggungjawaban tentang pemerintahan daerah jajahan kepada parlemen. Tahun 1848 merupakan titik balik, sebab mulai tahun itu ada kesempatan untuk melakukan perubahan pemerintahan lewat parlemen. Pada tahun 1854 Regeerings Reglement (RR) memberikan dasar bagi pemerintahan kolonial. Prinsip liberal tentang kebebasan individu, keamanan hak-hak dan usaha-usaha di dalam RR itu adalah esensial.

Dengan adanya konstitusi kolonial itu mulailah standar baru bagi pemerintahan di Indonesia dan dipaksakanlah politik yang lebih liberal. Sejak itu menyusullah

beberapa peraturan baru yang menghilangkan beberapa penyelewengan. Akhirnya tanaman-tanaman pemerintah yang kurang penting seperti indigo, tembakau, teh, dihapus. Pelaksanaan prinsip-prinsip liberal tidak hanya berarti terbaginya kekuasaan pemerintahan dengan parlemen, tetapi juga berarti dilancarkannya kritik mengenai segala persoalan kolonial. Usaha-usaha kaum liberal untuk mengadakan sejumlah pembaharuan didasarkan pada doktrin ekonomi politik klasik dan ditujukan untuk melawan monopoli dan pemaksaan. Tujuan-tujuan ini diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan tidak terbatas pada persoalan-persoalan kolonial. Politik ekonomi kaum liberal adalah perbaikan dari politik yang dijalankan oleh Willem I. Kedua sistem tersebut dicampur, sehingga kerajaan Belanda harus menarik diri dari segala campur tangan; segala rintangan terhadap inisiatif individu dan kebebasan harus dihapuskan, dan segala bantuan pemerintah kepada usaha swasta harus dihentikan. Kesemuanya itu berarti tumbuhnya politik merkantilisme dan proteksionisme. Konsekuensinya hak istimewa perusahaan-perusahaan nasional dihapus. Tindakan-tindakan ini sebagian disebabkan karena kepatuhan ideologis golongan liberal dan sebagian juga karena tekanan-tekanan politik dari pihak Inggris.

Kecenderungan umum di Eropa yang menuju ke perdagangan bebas menyebabkan Belanda menghapus peraturan-peraturan proteksinya. Kebetulan pada waktu itu terdapat orang-orang seperti Baron van Hoevell dan Multatuli (Dauwes Dekker) yang mengendaki juga perubahan-perubahan yang sedikit banyak akan memperbaiki keadaan di Indonesia. Terutama *Culturstelsel* menjadi sasaran kritik mereka. Douwes Dekker membentangkan kekejaman-kekejaman sistem ini dalam bukunya yang terkenal, *Max Havelaar*. Sebagai tokoh lain yang mengendaki perubahan daerah jajahan ialah van der Putte, menteri daerah jajahan, yang terkenal sebagai orang progresif. Bukan saja ia setuju dengan saran-saran yang diberikan oleh van Hoevell, tetapi saran-saran itu dipraktekkan pula, sehingga banyak sekali aturan-aturan yang tidak sesuai dengan zaman dihapuskan, untuk kemudian dikeluarkan peraturan-peraturan baru. Begitulah penyerahan paksa cengkeh dan pala di Maluku, tanam paksa di Jawa, kecuali gula dan kopi, dihapuskan (tanam paksa gula dihapuskan tahun 1870, dan kopi tahun 1920). Berkat perjuangan van der Putte dalam tahun 1867 keluarlah Undang-Undang Perbendaharaan (*Comtabiliteit*) yang menentukan, bahwa anggaran belanja untuk Indonesia ditetapkan oleh parlemen dan pengawasan dijalankan oleh Dewan Pengawas Keuangan Negara (*Rekenkamer*). Dengan aturan ini parlemen ikut campur juga dalam pemerintahan daerah jajahan.

Undang-Undang Agraria

Pada tahun 1870 keluarlah Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) yang disusun oleh menteri de Waal. Undang-undang ini menerangkan bahwa:

- 1) Pemerintah berhak menyewakan tanah yang tidak dipergunakan penduduk asli selama 75 tahun, kepada bangsa asing. Peraturan ini disebut *erfpacht* artinya tanah yang dapat diwariskan.
- 2) Penduduk asli tidak boleh menjual tanahnya kepada orang asing, tetapi boleh menyewakannya (misalnya untuk tanaman tebu).
- 3) Tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, menjadi hak milik pemerintah.

Ada dua macam tanah, yaitu:

- 1) Tanah bebas: (*egendom* (milik sendiri), *recht van opstal* (untuk mendirikan bangunan, *erfpacht* (tanah sewa selama 75 tahun), dan lain-lain.
- 2) Tanah tidak bebas: milik anak negeri, tanah swasta, yaitu tanah yang dijual kepada bangsa asing oleh pemerintah. Tanah tidak bebas tidak boleh pindah dari tangan anak negeri. Maksudnya ialah supaya anak negeri tidak terdesak oleh bangsa lain, tetapi perlindungan itu tidak dijalankan. Beribu-ribu anak negeri menyewakan tanahnya kepada bangsa lain, misalnya untuk menanam tebu, tembakau dan lain-lain.

Dengan dihapuskannya *Culturstelsel* secara berangsur-angsur, maka tanaman wajib pemerintah diganti dengan perkebunan-perkebunan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Kalau di satu pihak modal Belanda diekspor maka di lain pihak modal asing, khususnya Jerman, di tanam di beberapa cabang industri di Negeri Belanda. Dengan perkembangan baru tersebut maka berarti liberalisasi politik perdagangan Belanda yakni pembukaan Negeri Belanda bagi perdagangan internasional. Sebagai negara kecil di antara negara-negara besar dengan industri-industrinya yang sudah maju, maka sudah selayaknya kalau Negeri Belanda mengarahkan dirinya ke konstelasi ekonomi umum. Dengan adanya UU Agraria berarti Belanda menganut politik pintu terbuka, yang berarti pemerintah kolonial memberi kesempatan kepada kaum modal asing (Belanda, Inggris, Amerika) untuk menanamkan modal sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Sistem baru ini membuat Belanda tidak langsung memeras rakyat tetapi lewat

kaum kapitalis itulah rakyat Indonesia diperas. Dengan demikian politik kolonial liberal (1850-1870) berkembang menjadi imperialisme modern. Penanaman modal di Indonesia terutama terjadi pada industri gula, timah, dan tembakau yang mulai berkembang sejak tahun 1885. Dengan demikian politik kolonial liberal yang semula menghendaki liberalisasi tanah jajahan lalu politik itu berkembang menjadi bagaimana mengatur tanah jajahan untuk memperoleh uang. Perubahan tersebut terjadi karena munculnya kaum liberal dibarengi dengan munculnya kaum borjuis yang mempergunakan slogan-slogan liberal untuk membenarkan tuntutan mereka memperoleh kekuasaan politik. Memang kelas-kelas tertentu di antara bangsa Belanda mempunyai kepentingan ekonomi di daerah-daerah jajahan.

3.7 Politik Etis

Setelah melaksanakan politik pintu terbuka, pemerintah Hindia Belanda memasuki periode kapitalisme modern. Hasil Revolusi Industri selama masa dua puluh tahun sebelumnya terwujud dalam perkembangan industri, perkapalan, perbankan, dan komunikasi yang modern. Volume perdagangan berkembang dengan pesatnya, sedangkan perkembangan modal terjadi secara besar-besaran. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik pintu terbuka di Hindia Belanda dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negeri-negeri asing daripada negeri Belanda sendiri. Sebagian besar perkebunan yang didirikan sesudah tahun 1870 merupakan obyek-obyek penanaman modal. Ekspor modal ke Hindia Belanda meningkat sejak tahun 1850. Dapat ditambahkan di sini, bahwa modal Belanda diekspor juga ke negeri-negeri di luar tanah jajahannya. Modal tersebut di atas terutama berupa modal uang, dan terdiri dari modal pinjaman (*rentier capital*) yang dipusatkan di bank-bank. Pacuan ekspor modal, yang menurut Lenin merupakan hal yang sangat esensial pada imperialisme, dengan mudah mendapat tempat di Hindia Belanda yang sejak zaman *Culturstelsel* mengusahakan hasil-hasil bumi untuk pasaran dunia. Kondisi-kondisi yang menyenangkan penanam modal dijamin oleh pemerintah kolonial seperti tenaga kerja dan tanah yang murah. Banyak bank kolonial didirikan pada bagian kedua abad ke-19, di antaranya sebagian dengan modal asing. Meskipun pada permulaannya bank-bank kolonial itu berfungsi sebagai

lembaga kredit dan finansial, akan tetapi akhirnya mereka mengawasi dan menguasai perusahaan-perusahaan kolonial. Inilah sifat imperialisme yang difusikan antara modal industri dan modal finansial. Arah menuju ke sentralisasi modal menjadi jelas.

Di dalam sistem baru ini pengusaha-pengusaha swasta mengambil-alih perusahaan-perusahaan perkebunan yang dahulunya diurus oleh pemerintah kolonial, dan cara mengurusnya tetap berjalan seperti sedia kala, bedanya kalau dulu hanya ada pemegang saham tunggal, sekarang jumlah pemegang sahamnya banyak. Perusahaan-perusahaan swasta menunjukkan tanda-tanda lebih menekan daripada pemerintah. Pengusaha-pengusaha dan kaum humaniter mengumpulkan kekuatan untuk bersama-sama mematahkan *Culturstelsel*; yang pertama didorong oleh kepentingan ekonomi, sedang yang akhir oleh kepercayaan bahwa kebebasan berusaha dan kebebasan bekerja merupakan jaminan yang paling utama bagi kemajuan dan kesejahteraan. Kaum humaniter percaya, bahwa perusahaan swasta dan modal bebas akan melepaskan daerah-daerah jajahan dari eksploitasi. Tetapi kenyataannya hanya ada pergantian pemerias.

Bagaimanapun juga perkembangan politik kolonial Belanda ada hubungannya dengan evolusi kondisi ekonomi dan sistem politik di Negeri Belanda. Di Hindia Belanda, tampaklah suatu perkembangan yang lebih lambat. Periode antara tahun-tahun 1850 dan 1870 adalah masa jaya bagi liberalisme di negeri Belanda, sedangkan di Hindia Belanda ketika itu merupakan periode transisi dari politik kolonial konservatif ke politik kolonial liberal. Di Inggris periode perdagangan bebas dan kompetisi bebas berlangsung sejak tahun 1860. Sedangkan kapitalisme modern Belanda baru dimulai sekitar tahun 1870, yakni suatu tahun yang biasanya dianggap sebagai permulaan politik kolonial liberal. Sejak dihapuskannya *batig saldo* (sistem keuntungan bersih) tahun 1877, berkembanglah suatu mentalitas baru mengenai kesejahteraan bangsa Indonesia dan berpengaruh di antara para politisi. Bersamaan dengan itu juga timbul suatu orientasi politik kolonial baru yang terarah ke prinsip Hindia Belanda untuk orang pribumi. Dengan berpijak pada kepentingan orang pribumi diajukan tuntutan pembayaran kembali keuntungan bersih, politik keuangan kolonial dikritik sangat pedas, rencana perbaikan dibuat. Janji-janji tertuju pada kepentingan penduduk pribumi di Hindia Belanda terus menerus diucapkan, tetapi hampir-hampir tak ada yang dikerjakan untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Politik kolonial terbatas pada membuat penyelidikan dan persiapan untuk perbaikan. Negeri Belanda tak mendapat apa-apa dan seharusnya tidak juga membayar sesen pun juga. Kegasifan ini dengan jelas memperlihatkan adanya perbedaan besar antara teori dan praktek. Cita-cita terlalu sering dipergunakan untuk menutup kegiatan yang kurang baik. Ekspedisi yang banyak dikirimkan ke daerah-daerah yang memberontak. Biaya mengadakan peperangan makin lama makin terasa sebagai beban berat bagi Hindia Belanda. Kekhawatiran akan akibat-akibat finansial menghalangi pemerintah untuk mengambil tindakan yang kongkrit.

Pada saat kekurangan aktivitas ini unsur radikal memasuki arena politik. Kaum Sosial Demokrat mempertajam kritik terhadap politik kolonial pada akhir-akhir tahun 1890-an. Juru bicara mereka adalah van Kol. Dengan kekuatan konstruktifnya dan protesnya yang berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, ia mendesak pemerintah untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Dua tokoh lainnya yang memberikan tekanan sungguh-sungguh untuk perbaikan kolonial adalah Brooshoof dan van Deventer. Perjuangan politik mereka membuka suatu periode baru. Sehubungan dengan permasalahan ekspedisi militer dapat dikatakan bahwa sepanjang abad ke-19 tentara kolonial terus menerus melancarkan peperangan-peperangan terhadap penguasa-penguasa lokal, raja-raja kecil, dan sultan-sultan. Beberapa di antaranya hanya merupakan perang kecil-kecilan, tetapi ada juga yang mendatangkan bencana, misalnya Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Paderi (1821-1837), dan perang Aceh (1873-1904). Apa pun penyebab langsung dari peperangan-peperangan itu, mereka selalu memakai alasan perang pembawa perdamaian dan ketertiban. Konflik lokal atau perang saudara setiap saat dijadikan dalih pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan intervensi. Bertahun-tahun Belanda mengadakan perjanjian-perjanjian politik dengan penguasa-penguasa lokal, atau raja pesisir, serta membatasi diri hanya untuk memeproleh pengakuan suzerinitas. Sikap yang agak pasif ini mulai mengalami perubahan-perubahan selama masa dua puluh tahun terakhir dari abad ke-19 dengan alasan, bahwa politik pintu terbuka memasukkan kapital-kapital asing, oleh karena itu negara-negara besar atau negara-negara lain mungkin lebih tertarik kepada daerah-daerah yang belum dibuka. Berlomba-lombanya kaum kapitalis tersebut menunjukkan sifat dari imperialisme modern yang mencari tanah jajahan itu dilakukan dengan cara yang kasar dan sewenang-wenang tanpa memperhatikan nasib penduduk setempat.

Pada masa pembukaan daerah luar Jawa untuk perkebunan-perkebunan swasta timbul masalah tenaga kerja. Untuk mencari tenaga-kerja untuk pekerjaan pembukaan dan pengolahan perkebunan penguasa swasta di Sumatera Timur, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang hubungan kerja. Pekerja-pekerja banyak didatangkan dari Jawa yang dilakukan secara kontrak, disebut kuli-kontrak. Pemerintah Belanda menjamin kepada para majikan perusahaan, untuk menghukum para kuli atau buruh yang melarikan diri sebelum habis masa kontraknya. Ancaman hukuman dapat dikenakan terhadap para pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja itu kemudian terkenal sebagai poenale sanctie. Praktek-praktek dari sistem kerja-kontrak ini telah membawa kehidupan yang buruk pada para pekerjanya dan tindakan-tindakan pemerasan dan penekanan. Pengiriman-pengiriman tentara Belanda tersebut dengan sendirinya menimbulkan kritik pedas dari berbagai pihak. Perang Aceh yang nampaknya tak kunjung selesai, menguras harta negara, sehingga usaha usaha untuk umum yang produktif terpaksa dikesampingkan.

Kekejaman-kejajaman yang dilakukan tentara kolonial sangat menggoncangkan pendapat umum, dan banyak politisi yang menganggap tak ada alasan untuk melanjutkan perang ini. Militer memainkan peranan penting di dalam politik kolonial. Kritik-kritik yang paling tajam dilancarkan oleh kaum kapitalis, yang menghendaki agar pemerintah kolonial membuka daerah baru untuk investasi-investasi modal. Kaum kapitalis sangat berkepentingan dengan dibuatnya kontrak-kontrak, karena kontrak-kontrak itu biasanya diikuti oleh konsesi-konsesi untuk memperoleh monopoli. Akhirnya uraian-uraian yang bersemangat mengecap ekspedisi-ekspedisi itu sebagai manifestasi tirani, barbarisme, dan perampasan yang kejam. Pada permulaan abad ke-20 itu timbullah ide-ide baru yang anti imperialisme sehingga muncullah politik kolonial baru.

Praktek kolonial yang dijalankan pemerintah Belanda dari tahun 1870-1900, telah membawa kemerosotan kehidupan penduduk Indonesia, terutama di Jawa. Oleh sebab itu, timbullah kritik yang tajam terhadap pemerintah. Kritik-kritik itu mirip dengan kritik-kritik yang dilancarkan kepada sistem tanam paksa. Pada dasarnya kritik itu tidak menyetujui praktek-praktek dari kebijaksanaan yang telah dilakukan itu, yang telah membawa keuntungan hanya di pihak pemerintah Belanda. Pihak pribumi tetap hidup dalam kesengsaraan, padahal mereka telah bekerja keras untuk menghasilkan keuntungan bagi Negeri Belanda. Kehidupan mereka tidak diperbaiki, padahal telah berjasa. Usaha-usaha untuk sedikit memperbaiki nasib rakyat Indonesia baru dilaksanakan pada peralihan abad ke-

19 ke-20. Kebijaksanaan yang melandasinya dikenal dengan sebutan Politik Etis. Kebijaksanaan itu didasarkan atas gagasan-gagasan golongan etis yang menyatakan bahwa tanah jajahan perlu perbaikan dalam bidang pertanian, yaitu pembangunan dalam soal irigasi, peningkatan pendidikan atau edukasi dan mengadakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang masih kosong tanahnya, yakni transmigrasi. Salah seorang juru bicara kaum etis yang terkemuka adalah van Deventer, penulis artikel yang berjudul *Hutang Budi*. Ia menuntut restitusi berjuta-juta uang yang diperoleh Negeri Belanda sejak berlakunya undang-undang Comtabilitet pada tahun 1867.

Politik Etis yang menggunakan tiga sila irigasi, edukasi dan imigrasi, mulai dilaksanakan tahun 1901. Perkebunan tebu menghendaki irigasi yang intensif. Pabrik-pabrik yang banyak jumlahnya, kantor-kantor dagang, dan cabang-cabang perusahaan lainnya menyebabkan timbulnya kebutuhan manusia dan tenaga kerja yang trampil dan murah. Sementara itu program pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih kosong, ternyata juga hanya untuk mengirimkan tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan Belanda. Dengan demikian walaupun pemerintah Belanda menjalankan Politik Etis yang mendasarkan diri pada triloginya van Deventer (irigasi, edukasi dan imigrasi), pelaksanaannya hanya untuk menguntungkan pemerintah Belanda. Irigasi dibuat untuk perkebunan-perkebunan Belanda, edukasi dibuka untuk menghasilkan tenaga-tenaga trampil yang murah, dan imigrasi dilakukan untuk mengirimkan tenaga kuli yang murah ke perkebunan-perkebunan Belanda luar Pulau Jawa





Bab 4

Kolonialisme Belanda Di Sumatera Timur

4.1 Motivasi Kolonialisme Belanda ke Luar Pulau Jawa

Pada awal penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara, perhatian Belanda hanya terbatas di Jawa. Hal ini bertalian dengan diberlakukannya peraturan Cultuurstelsel di Pulau Jawa pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Penerapan Cultuurstelsel tersebut telah mampu mengatasi kebangkrutan kas Negeri Belanda. Dengan adanya Cultuurstelsel telah menjadi sumber keuntungan besar bagi Negeri Belanda. Meskipun demikian, sejak 1840 pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Adapun alasan pemerintah kolonial Belanda melakukan perluasan wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah luar Jawa adalah pertama, untuk menjaga keamanan daerah-daerah yang sudah berhasil dikuasai. Oleh karena itu, Belanda merasa terpaksa menaklukkan daerah-daerah lain yang mungkin akan mendukung atau membangkitkan gerakan perlawanan. Kedua, ketika perjuangan bangsa Eropa untuk memperoleh daerah-daerah jajahan mencapai puncaknya pada akhir abad ke-XIX, pemerintah Belanda merasa wajib menetapkan hak mereka terhadap daerah-daerah di luar Jawa sebagai upaya untuk mencegah campur tangan kekuatan Barat lainnya di wilayah itu (Ricklefs, 1995: 200).

Perluasan wilayah jajahan Belanda ke luar Pulau Jawa sesuai dengan tujuan imperialisme yaitu kebijakan memperluas wilayah suatu negara dan menciptakan emporium di luar wilayahnya. Selain itu, perluasan wilayah itu merupakan sarana yang penting dalam melestarikan dan memperkuat semangat nasional serta merupakan sumber keampuhan politik yang baru. Perluasan wilayah jajahan juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi negara dari pemerintah kolonial. Dengan berdalih kepentingan ekonomi negara dari suatu pemerintah kolonial, imperialisme sebagai perluasan wilayah disebut juga sebagai perluasan nasionalisme.

Unsur nasionalisme dalam ide politik imperialisme sangat penting dalam mengesahkan kebijakan imperialis di semua negara Eropa. Dengan kata lain, konsep imperialisme merupakan kebutuhan nasional yang sangat luwes dan sangat berarti. Dengan demikian, ide bangsa sebagai kekuatan pendorong terkuat bagi negara imperialisme. Hal ini berarti imperialisme modern tidak hanya bertumpu pada fondasi ekonomi, melainkan juga pada supra-nasional yang disebut sebagai struktur psikis baru dari Eropa Modern. Bangsa Eropa berupaya menjelaskan fenomena imperialisme sebagai ungkapan nasionalisme. Konsep imperialisme nasionalis semakin menonjol pada akhir abad ke XIX.

Imperialisme modern bertujuan agar perekonomian nasional memperoleh sumber bahan mentah, daerah pemasaran hasil industri, dan lahan investasi yang menguntungkan di tanah seberang. Kecenderungan bangsa-bangsa Eropa mencari wilayah koloni di tanah seberang (Asia dan Afrika), berkaitan dengan kenyataan bahwa sejak 1873 laju perkembangan ekonomi internasional mulai melemah karena kemerosotan harga, sehingga keuntungan berkurang secara drastis. Orang-orang Eropa umumnya dan khususnya kelompok borjuis dari negara-negara industri berkeyakinan bahwa perekonomian nasional memerlukan tanah koloni sebagai sumber bahan mentah dan pemasaran hasil industri serta sebagai lahan investasi modal. Perluasan wilayah berpengaruh terhadap kenaikan investasi bangsa-bangsa barat di tanah seberang. Dengan demikian imperialisme merupakan usaha dari pemilik modal untuk menemukan peluang investasi yang menarik di tanah seberang. Peluang investasi di tanah seberang sangat dibutuhkan karena kurangnya permintaan di pasar dalam negeri, sehingga terjadi over produksi. Setelah tahun 1880 terjadi peningkatan investasi modal dan perluasan koloni di Afrika dan Asia. Hal ini bertalian dengan kemacetan ekonomi dalam negeri Eropa dan rendahnya standard hidup kelas pekerja di wilayah itu. Dengan kata lain, imperialisme modern disebabkan oleh persaingan modal surplus yang tidak menemukan penggunaan yang

menguntungkan dalam negeri. (Momsen, 1977. 4-15). Hal ini membuktikan bahwa ada keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan ekspansi wilayah.

Sejak 1880-an perluasan wilayah dan perburuan wilayah koloni menjadi politik nasional dari negara-negara Eropa. Namun, pelaksanaan imperialisme itu berbeda antara negara Inggris dengan negara-negara Eropa lainnya dan Amerika Serikat. Misalnya, imperialisme ekonomi Jerman dan imperialisme Amerika Serikat dianggap sebagai proteksionisme terhadap Inggris, yaitu sebagai usaha untuk menjaga kestabilan pasaran domestik untuk kepentingan industri dalam negeri sendiri dengan menerapkan/ memberlakukan cukai impor tinggi terhadap Inggris sebagai pesaingnya (Bartstra, 1947: 3-5). Menurut pola imperialisme nasionalis, bangsa-bangsa kulit putih dianggap lebih unggul daripada ras dan warna kulit lainnya. Oleh karena itu, misi dan tugas bangsa-bangsa Eropa adalah untuk menguasai bangsa yang bukan ras dan warna kulit putih.

4.2 Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Pembukaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur

Pada tahun 1870 politik kolonial konservatif Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi diganti menjadi politik kolonial liberal. Pergantian politik kolonial tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi perpolitikan di Belanda. Kondisi perpolitikan di Belanda dikuasai sebagian besar parlemennya dikuasai kaum liberal. Parlemen Belanda yang sebagian besar dikuasai oleh kaum liberal tidak menyetujui sistem tanam paksa yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa serta sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta. Kaum liberal tidak menyetujui sistem tanam paksa karena mereka menganggap pemerintah kolonial sewenang-wenang mengambil alih tanah rakyat.

Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria pada 1870 yang bertujuan menjamin kepemilikan tanah kaum petani. Dengan demikian, pemberlakuan Undang-Undang Agraria oleh Engelbertus de Wall selaku menteri jajahan merupakan reaksi atas kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Jawa, yang memberlakukan Sistem Tanam Paksa.

Adapun isi dari Undang-Undang Agraria tahun 1870 sebagai berikut:

- 1) Gubernur Jenderal VOC tidak memperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah tersebut dapat disewakan paling lama sekitar 75 tahun.
- 2) Tanah milik pemerintah antara lain, hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar kawasan milik desa dan penghuninya dan tanah milik adat.
- 3) Tanah milik penduduk antara lain, semua sawah, dan ladang yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah sejenis itu boleh disewa oleh pemodal asing sekitar 5 tahun.

Sejak parlemen Belanda dikuasai kaum liberal dilaksanakan sistem ekonomi liberal antara tahun 1870-1900. Sejak pelaksanaan sistem liberalisme, pemerintah kolonial Belanda memberi peluang sepenuhnya kepada modal swasta untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa. Selama masa sistem liberalisme pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, kina, perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur.

Pembukaan perkebunan-perkebunan besar dimungkinkan oleh dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada tahun 1870. Di satu pihak, Undang-Undang Agraria ini melindungi hak milik kaum petani Indonesia atas tanah mereka. Di lain pihak, Undang-Undang Agraria membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia untuk kepentingan usaha-usaha perkebunan orang asing. Dengan demikian, orang-orang Eropa dan orang-orang asing lainnya dapat menyewa tanah-tanah pemerintah, yakni tanah-tanah yang belum digarap oleh penduduk. Bagi pengusaha industri pertanian dapat memperoleh hak *erfpacht* selama 75 tahun. Persil-persil tanah luasnya tidak boleh lebih dari 500 bahu (355 ha). Satu orang tidak boleh menyewa lebih dari satu persil. Bagi orang Eropa yang tidak begitu mampu dapat menyewa persil tanah yang luasnya tidak boleh melebihi 25 bahu dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Demikian pula kaum kapitalis masih dapat menyewa sawah-sawah rakyat Indonesia untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (Daliman, 2012: 45-46).

Adapun tujuan Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870 sebagai berikut:

- 1) Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing.
- 2) Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang dan Cina dan lain-lain.
- 3) Membuka lowongan pekerjaan kepada penduduk untuk menjadi buruh di perkebunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria mendorong masuknya industri-industri perkebunan Eropa ke Indonesia. Dalam industri-industri perkebunan liberal di Indonesia, rakyat Indonesia secara yuridis bebas dalam menggunakan tenaga dan tanahnya, sedangkan dalam sistem tanam paksa kedua alat produksi itu dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Dengan kata lain, secara yuridis rakyat bebas untuk menyewakan atau tidak menyewakan tenaga dan tanahnya (sawahnya) kepada para pengusaha perkebunan swasta, sedangkan dalam sistem tanam paksa rakyat dipaksa untuk menyerahkan kedua faktor produksi itu (tenaga dan tanah) kepada pemerintah. Dalam industri liberal harga ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang saling berhadapan dengan bebas

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria mendorong masuknya industri-industri perkebunan Eropa tidak hanya ke Pulau Jawa, akan tetapi juga ke daerah-daerah luar Jawa. Salah satu daerah yang menjadi sasaran masuknya industri-industri perkebunan Eropa adalah Sumatera Timur. Wilayah Deli merupakan wilayah industri perkebunan pertama di Sumatera Timur. Pondasi perkebunan tembakau Deli Sumatera Timur mulai dibangun setelah Sultan Deli yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam menyetujui gagasan masuknya penanaman modal asing di perkebunan pada tahun 1862. Pemberian izin dari Sultan Deli membuka pintu bagi kapitalis-kapitalis Belanda untuk membuka perkebunan tembakau di Deli. Pada tahun 1863 Jacob Nienhuys datang ke Deli untuk menjadi seorang pengusaha perkebunan tembakau. Saat itu, daerah Deli belum dikenal oleh orang-orang Belanda. Jacob Nienhuys adalah orang pertama yang membuka perkebunan tembakau di Deli pada tahun 1865. Perkebunan tembakau Jacob Nienhuys terus berkembang, sehingga pada tahun 1869 ia mendirikan perusahaan perkebunan yang diberi nama Deli Maatschappij (Said, 1990: 7-24).



Gambar 4.1: Perkebunan Tembakau Deli

Pembukaan perkebunan tembakau Deli membutuhkan tenaga kerja atau buruh untuk dipekerjakan di perkebunan tersebut. Pada awal pembukaan perkebunan di Deli, pengusaha perkebunan mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja atau buruh. Bahkan, pencarian tenaga kerja atau buruh untuk dipekerjakan di perkebunan jauh lebih sulit daripada mencari lahan untuk dijadikan perkebunan. Berbeda dengan perusahaan perkebunan di Jawa, dimana perluasan lahannya berkembang maju akibat tenaga kerja yang didatangkan dari desa-desa sekitar, perusahaan perkebunan di pantai timur Sumatera pada mulanya mengimpor pekerja Cina dan kemudian pekerja Jawa dalam jumlah ratusan ribu orang yang ditampung dan diberi makan di barak-barak perkebunan dan diikat dengan status sebagai budak (Stoler, 200: 3).

Penduduk lokal yaitu penduduk asli yang mendiami wilayah Deli kurang berminat untuk menjadi buruh di perkebunan. Para Sultan Deli dapat memberikan tanah tetapi bukan tenaga buruh, karena penduduk pribumi Batak dan Melayu tidak dapat dibujuk atau dipaksa oleh para pejabat lokal atau asing agar mau bekerja untuk perkebunan. Oleh karena itu, para pengusaha perkebunan di Deli terpaksa mencari buruh dari luar daerah Deli, yaitu pertama Malaya, Singapura dan Cina, kemudian di desa-desa miskin Jawa Tengah untuk memperoleh kuli-kuli, serta di Eropa untuk mencari staf manajemen. Perekrutan

kuli-kuli dilakukan melalui calo-calo, hingga para pengusaha perkebunan mulai berorganisasi konvoi mereka sendiri langsung dari Cina (Stoler, 2005: 43-44).

Pada awal pembukaan perkebunan, kaum buruh didatangkan dari Singapura. Para buruh yang berasal dari Singapura merupakan orang-orang Tionghoa. Setelah Deli Maatschappij dibentuk oleh Jacob Nienhuys diadakan penambahan 800 pekerja Tionghoa untuk meningkatkan produksi di dalam perkebunan itu (Said, 1990: 35).

Menurut Perret (2010: 10-11) pembukaan perkebunan-perkebunan tembakau di pantai timur Sumatera pada 1963 menimbulkan imigrasi buruh Tionghoa secara besar-besaran. Sebelum Perang Dunia I, orang Tionghoa merupakan satu-satunya sumber tenaga kerja untuk jenis pekerjaan di perkebunan-perkebunan. Pada awalnya pemilik perkebunan memperoleh buruh Tionghoa di Singapura, Pinang atau bahkan Deli sendiri, dari calo-calo di daerah Selat Malaka yang dibayar perkuli. Sejak 1888, pemilik perkebunan Deli mendatangkan sekitar 7000 buruh per tahun dari Tiongkok, terutama dari daerah Guangzhou, sehingga pada 1930 jumlah buruh Tionghoa yang dipekerjakan di perkebunan Deli berjumlah hampir setengah juta orang. Pada tahun 1930, pemerintah kolonial Belanda mengharuskan pemilik perkebunan membayar pajak imigrasi sebesar 100 gulden untuk setiap buruh yang didatangkan dari Tiongkok. Pajak tersebut dianggap terlalu tinggi, sehingga perusahaan perkebunan beralih mempekerjakan buruh dari Jawa. Meskipun para pemilik perkebunan beralih mempekerjakan buruh Jawa, bukan berarti buruh-buruh dari Tiongkok meninggalkan Sumatera. Mereka tetap bermukim di Sumatera Timur, di antaranya di daerah perkotaan, dan mengembangkan kegiatan perdagangan dan bisnis. Pemerintah kolonial Belanda mendukung kegiatan perdagangan dan bisnis orang Tionghoa. Pemerintah kolonial Belanda ingin menjadikan mereka sebagai perantara antara kalangan orang Eropa dan kaum pribumi. Para buruh Tionghoa yang telah keluar dari perkebunan menyebar sampai dataran tinggi di utara Danau Toba, tempat mereka menjadi pedagang atau petani sayur.

Peningkatan imigrasi buruh seiring dengan perluasan lahan perkebunan di Deli. Pada awalnya yaitu pada 1863 Jacob Nienhuys membuka sebuah perkebunan tembakau eksperimental seluas 75 hektar di Deli. Jacob Nienhuys mendatangkan tenaga kerja orang-orang Cina dari Singapura untuk dipekerjakan di perkebunan tembakau tersebut. Keputusan Jacob Nienhuys mendatangkan orang-orang Cina dari Singapura disebabkan penduduk setempat tidak ada seorangpun yang bersedia bekerja sebagai buruh di perkebunan. Hasil panen pertama dari perkebunan tembakau Jacob Nienhuys dikirim ke Belanda

pada awal tahun 1864. Tembakau yang dikirim itu dinilai memiliki kualitas yang istimewa, sehingga para spesialis terkesan. Jacob Nienhuys memperoleh lagi pinjaman dana yang digunakan untuk mencari pekerja Tionghoa ke Sinagapura dan menandatangani konsesi lahan dengan sultan Deli pada tahun 1865. Setelah penandatanganan konsesi tersebut, pada tahun 1865 juga dua pekebun Swiss dan seorang pekebun Prussia tiba di Deli untuk membuka perkebunan. Mereka berusaha dalam perkebunan tembakau, pala dan kelapa. Pada tahun 1967 Jacob Nienhuys memperoleh konsesi baru antara Sungai Percut dan Deli. Pada tahun 1868, di Deli sudah ada enam perkebunan besar yang menghasilkan lebih dari 200 ton tembakau. Besarnya produksi tembakau Deli mendorong Jacob Nienhuys mendirikan Deli Maatschappij pada tahun 1869. Pada saat mendirikan Deli Maatschappij, perusahaan itu telah memiliki 7.000 hektar lahan yang dijadikan sebagai lokasi budidaya tembakau. Pada tahun 1870 Deli Maatschappij mempekerjakan 1.200 buruh Tionghoa dari total 3.000 buruh yang bekerja di wilayah Kesultanan Deli.

Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di Deli Maatschappij mempererat hubungan dengan Semenanjung Melayu, khususnya Pinang dan Singapura. Orang-orang Keling didatangkan dari Pinang untuk melakukan pekerjaan drainase. Dari Pinang juga didatangkan tukang kayu Tionghoa untuk membangun dua rumah kayu yaitu satu rumah besar untuk pekebun dan satu rumah lebih kecil untuk pegawai Eropa. Kemudian orang-orang Boyang yang direkrut dari Singapura mendirikan bangunan-bangunan lain, gubuk jerami dan pondok. Sementara pembangunan berjalan, diadakan kesepakatan dengan penduduk setempat mengenai pembukaan hutan dan pasokan bahan-bahan bangunan yaitu rotan dan atap untuk bangunan ringan. Penduduk setempat dan orang-orang Banjar dipekerjakan untuk membangun bangsal-bangsal yang digunakan sebagai tempat pengeringan tembakau. Setelah pembukaan hutan selesai, buruh-buruh Tionghoa direkrut dari Pinang, Singapura atau Deli sendiri (Perret, 2010: 181-182).

Perkembangan perkebunan juga menarik orang India yang dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu orang Keling, orang Benggali, orang Chetti dan orang Bombay. Kelompok pendatang lainnya yang menjadi buruh di perkebunan Deli adalah orang Banjar asal Kalimantan yang bekerja sebagai buruh bangunan bangsal-bangsal pengeringan tembakau dan pembabat hutan sebelum kemudian membentuk koloni petani sawah di sepanjang pesisir. Orang Boyang asal Pulau Bawean antara Jawa dan Borneo direkrut di Singapura untuk kemudian dipekerjakan membangun bilik-bilik kuli dan pondok-pondok jerami. Orang

Siam bekerja memabat hutan, membuka jalan dan membangun gedung. Pembukaan perkebunan milik orang Eropa di Sumatera Timur juga menarik kaum pendatang dari Minangkabau yang biasanya menjadi pedagang kecil atau pengrajin. Sebelum Perang Dunia II, orang-orang Melayu Semenanjung juga bermigrasi ke Pesisir Timur dengan alasan meningkatkan perekonomiannya. Ada juga orang Aceh yang bermigrasi ke Deli, namun jumlahnya hanya sedikit dan umumnya mereka menjadi pengemudi tongkang di Belawan. Pada tahun 1870 penduduk dari utara, timur dan selatan Danau Toba juga bermigrasi ke dusun dekat perkebunan. Alasan mereka bermigrasi karena kecilnya pendapatan sebagai petani di dataran tinggi dan pesona kehidupan penduduk yang dinilai lebih baik di lereng gunung dekat perkebunan. Juga pada tahun 1870-an banyak penduduk Raya di timur laut Danau Toba yang saat itu berada di bawah kekuasaan Tuan Rondahaim meninggalkan daerah yang dilanda kerusuhan menuju dataran rendah dan daerah lereng gunung di Batubara dan Dolok. Pada tahun 1929, lebih dari seribu orang Batak Tobayang menetap di dataran rendah Deli Serdang, antara lain di Medan (Perret, 2010: 39-41).

Pada akhir abad ke-19 pekerja Tionghoa dicari secara khusus karena kerajinan dan keterampilan mereka, namun biaya perekrutan meski dengan ikatan kontrak, membuat sumber ini semakin tidak menarik (Stoler, 2005: 47). Permintaan tenaga kerja (buruh) semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perkebunan di Deli. Kondisi yang demikian mengakibatkan naiknya harga buruh yang berada di Semenanjung Malaya, yaitu buruh yang didatangkan oleh para broker. Oleh karena itu, para pemilik perkebunan mencari upaya lainnya dengan mencari buruh ke daerah asal para buruh seperti India dan Cina. Cara pencarian buruh tersebut juga mengalami kendala, karena Inggris memberlakukan aturan yang sangat ketat yang membatasi pekerja ke luar dari India dan kepekaan orang-orang Tionghoa akan uang menjadi kendala mendatangkan buruh dalam jumlah yang sangat besar. Terkendalanya pencarian buruh dari Cina dan India, memaksa para pemilik perkebunan untuk mencari alternatif lain yaitu mencari buruh dari Jawa. Mencari buruh dari Jawa menjadi solusi untuk memenuhi permintaan buruh perkebunan di Deli. Buruh dari Jawa menjadi alternatif pilihan para pemilik perkebunan karena pekerja di Jawa selalu tersedia setiap saat. Meskipun tenaga buruh dari Jawa selalu tersedia, namun banyak dari pemilik perkebunan yang menolak buruh dari Jawa, terutama tenaga buruh yang dipekerjakan untuk merawat tembakau (Reid, 2011: 220).

Sejak 1875 ada sebuah fenomena dalam perekrutan tenaga kerja setempat oleh perkebunan Barat di Deli. Hal ini dapat diketahui dari tenaga kerja yang

dipekerjakan di Deli Maatschappij. Pada tahun 1873 Deli Maatschappij mempekerjakan sekitar 350 orang untuk membuka hutan bagi perkebunan tembakau, membangun pondok tempat tinggal para pekerja, merawat perkebunan pisang dan pala, dan mengangkut barang dengan sampan. Pada tahun 1880 orang-orang dari pegunungan tiba di Deli karena tertarik dengan dollar orang Eropa. Mereka menawarkan tenaga untuk membangun pondok dan bangsal. Mereka bekerja secara berkelompok dibawah pimpinna seorang pemimpin dari ras mereka dan tidak mau bergabung dengan orang Tionghoa atau orang Melayu. Pada tahun 1883 ribuan orang turun dari pegunungan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Barat. Perpindahan itu bukan saja dilakukan orang-orang biasa tetapi juga dilakukan oleh raja-raja dan orang-orang terpendang dari pedalaman yang mencoba mengumpulkan kekayaan untuk menambah pengaruh mereka sekembalinya ke daerah asalnya. Hubungan terjalin antara pemimpin-pemimpin yang telah memiliki pengalaman dalam perkebunan Barat dan mereka yang bermaksud masuk dalam petualangan itu.

Pada saat merantau, para tokoh terpendang dari pedalaman tersebut membawa rakyatnya untuk berunding dengan Tuan yaitu pengurus perkebunan. Setelah memperoleh pekerjaan, mereka membangun sebuah rumah tersendiri yang ditempati oleh 50 sampai 60 orang laki-laki. Pada umumnya, mereka diberi sebuah ladang kecil untuk menanam padi yang hasilnya dijual kepada perkebunan. Ketika pekerjaan sudah selesai dan mereka merasa sudah mempunyai cukup uang kembali ke dataran tinggi dan digantikan oleh yang lain. Pada tahun 1883, diperkirakan seperempat sampai sepertiga penduduk laki-laki yang tinggal di tepi timur laut Danau toba sudah pergi ke Deli untuk bekerja di perkebunan. Ada juga raja-raja tidak turun ke perkebunan, tetapi mengizinkan sejumlah penduduknya mencari pekerjaan di perkebunan Barat. Dalam hal ini para perantau dikelompokkan dalam kategori kuli, mandor dan kepala. Mandor memiliki prestise tertentu karena mempunyai hubungan kekeluargaan dengan raja, sementara kepala dipilih dari antara mereka dengan merekrut, menjalankan perundingan dengan pekebun serta bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan. Kepala menerima upah antara 5 sampai 10% dari bayaran para kuli, dan ketika kembali, raja mengambil sebagian besar dari sisanya. Aliran perpindahan semakin meningkat dan orang-orang pedalaman memperoleh reputasi mantap sebagai pembuka hutan dan tukang bangunan dari kayu. Mereka juga ditugaskan untuk menangkap kembali kuli-kuli yang melarikan diri dengan melancarkan operasi perburuan. Jika mereka berhasil menagngkap kuli-kuli yang melarikan diri, mereka mendapat upah beberapa gulden per orang. Selain orang dari pedalaman, sejak pertengahan tahun 1920-an, banyak

orang Melayu bekerja sebagai buruh harian di perkebunan tembakau, terutama perempuan dan anak-anak. Orang-orang Melayu pada umumnya dipekerjakan untuk meungut ulat dan menyortir tembakau. (Perret, 2010: 189-191).

Kehadiran para buruh dari luar Sumatera (Cina, India dan Jawa) telah membentuk pola pemukiman yang heterogen. Selain itu, warna kulit dan asal suku/etnis ikut menentukan posisi pekerjaan yang ditugaskan bagi kaum buruh di perkebunan. Pembagian kerja di perkebunan juga didasarkan pada etnis/suku setiap pekerja perkebunan. Orang-orang Jawa dipekerjakan sebagai penggali tanah dan pembuat jalan di perkebunan. Orang Baewan dianggap cocok untuk membangun bangsal-bangsal pengeringan dan perumahan kuli. Orang keling cocok untuk pekerjaan menggali tanah. Orang Banjar dan orang Siam ditugaskan untuk membangun lumbung pengeringan. Orang Melayu dipekerjakan sebagai kusir. Orang Batak bekerja sebagai upahan dalam membangun rumah dan menebang hutan. Sedangkan orang Cina merupakan pekerja utama/pokok (Breman, 1995: 98-99). Pembagian kerja tersebut dimaksudkan oleh pemilik perkebunan untuk efisiensi kerja dan optimalisasi produksi perkebunan. Para pemilik perkebunan juga beranggapan bahwa heterogenitas etnis dalam suatu tugas yang sama harus dikurangi, karena heterogenitas etnis sering menjadi pemicu perkelahian antara sesama kuli yang berbeda suku/bangsa.

Perekrutan buruh dari Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan Deli diatur oleh lembaga yang bernama Vrij Emigratie Deli Avros (VEDA). Para pemilik perkebunan memesan para buruh melalui lembaga tersebut. Lembaga VEDA bertugas untuk mencari para pekerja dari daerah Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan Deli dan perkebunan di daerah Sumatera Timur lainnya. Pada tahun 1874 lembaga VEDA telah mendatangkan buruh dari Jawa untuk perkebunan di Deli sebanyak 316 orang (Pelly, dkk., 1984: 61).

Pada tahun 1875 Deli Maatschappij mendatangkan buruh-buruh yang cocok untuk dipekerjakan di perkebunan yaitu orang-orang Jawa dari Bagelan. Meskipun pemilik perkebunan telah mendatangkan kaum buruh orang-orang Jawa dari Bagelan, akan tetapi tingkat kepuasan pemilik perkebunan terhadap buruh dari Jawa sangat rendah. Hal ini disebabkan pada umumnya kaum buruh yang berasal dari Jawa dianggap sangat malas dan tidak cocok untuk pekerjaan perkebunan tembakau. Oleh karena itu, para buruh dari Jawa lebih banyak dipekerjakan pada pekerjaan kasar seperti pembukaan lahan dan pembangunan jalan. Dalam tahun 1911 saja lebih 50.000 kuli kontrak didatangkan dari Jawa Tengah untuk memenuhi permintaan mendesak akan buruh di perkebunan-

perkebunan. Alasan membanjirnya orang Jawa ke Deli disebabkan penurunan kesejahteraan penduduk pribumi. Menjelang tahun 1912, di perkebunan Deli, kaum laki-laki 100.000 orang lebih banyak daripada perempuan, dan dari hampir 100.000 orang etnik Cina hampir 93.000 orang adalah laki-laki. Dengan perbandingan yang sangat timpang antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, kaum perempuan yang datang merupakan sumber daya langka dan menjadi titik pusat konflik antara orang Cina dan orang Jawa, dan menjadi alasan serangan-serangan ganas terhadap manajemen Eropa oleh pekerja-pekerja Asia. Kuli-kuli perempuan masih muda dan hampir semuanya orang Jawa, walau tidak secara terang-terangan dipaksa melacurkan diri. Melayani kebutuhan-kebutuhan seksual dan pelayanan rumah tangga umum dari pekerja lelaki dan pihak manajemen lebih merupakan keharusan daripada pilihan. Upah pekerja perempuan pada tahun 1894 hanya separuh upah pekerja lelaki dan tidak cukup untuk keperluan makan sehari-hari. Minimnya upah buruh perempuan merupakan penyebab meluasnya prostitusi dan penyakit kelamin di kalangan penduduk perkebunan. Kuli-kuli perempuan merupakan bagian dari umpan yang digunakan untuk memikat para pekerja lelaki di Deli dan sebagai bagian pelipur lara yang diharapkan untuk menahan mereka di sana (Stoler, 2005: 48-53).





Bab 5

Dampak Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Masyarakat Kota Medan

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi penjajajah dan merugikan bagi kaum terjajah. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Belanda di Indonesia umumnya dan Sumatera Timur khususnya membawa berbagai dampak terhadap masyarakat Kota Medan. Adapun dampak dari kebijakan yang diterapkan di Sumatera Timur umumnya dan Kota Medan khususnya sebagai berikut:

5.1 Terciptanya Masyarakat Yang Multikulturalis

Sebelum pembukaan perkebunan tembakau di Deli, di wilayah telah ada penduduk yang bermukim. Penduduk pesisir di wilayah Sumatera Timur disebut Melayu. Mayoritas orang Melayu di pesisir timur Sumatera merupakan keturunan pendatang Minangkabau. Wilayah Sumatera Timur telah menjadi tujuan migrasi dari luar wilayah itu. Adapun pendatang yang bermigrasi ke wilayah itu adalah orang Tionghoa. Migrasi orang Tionghoa dimulai pada saat pembangunan Singapura pada tahun 1819. Selain itu, ada juga orang-orang

yang bermigrasi dari selatan Tapanuli yang mulai berlangsung tahun 1840-an. Para pendatang dari selatan Tapanuli itu pada umumnya beragama Islam. Aktivitas para pendatang dari selatan Tapanuli di Deli bertalian dengan agama yang dianut mereka. Pendatang lainnya yang bermigrasi ke wilayah itu dapat diketahui dari Hikayat Deli. Dalam hikayat Deli diceritakan bahwa ada seorang India yang datang ke Deli pada abad ke-17. Selain itu, ada juga pendatang lainnya seperti pelaut dari Malabar dan Koromandel yang terdampar di pantai pesisir timur Sumatera, pendatang dari Aceh, Jawa, Borneo, Sulawesi, Trengganu, kota-kota pelabuhan di Semenanjung Melayu, Riau, Lingga dan lain-lain (Perret, 2010: 43).

Kaum migran yang datang ke pesisir timur Sumatera sebelum pembukaan perkebunan tembakau Deli tidak banyak. Hal ini dapat diketahui dari Hikayat Deli yang menceritakan kedatangan seorang India di Deli pada abad ke-17. Selain itu, dari catatan Anderson yang mengunjungi pesisir timur Sumatera pada tahun 1823 dapat diketahui bahwa asal kaum migran ke daerah yaitu pelaut dari Malabar dan Koromandel yang terdampar di pantai. Dengan demikian, dari antara kaum migran datang ke daerah itu merupakan pelaut yang terdampar. Artinya, jumlah pelaut yang terdampar itu tentunya tidak sebanyak tenaga kerja yang sengaja didatangkan untuk menjadi buruh perkebunan tembakau Deli.

Pembukaan perkebunan di Sumatera Timur telah menciptakan masyarakat perkebunan yang multikultural. Kehadiran kaum buruh perkebunan dari luar Deli menyebabkan penduduk wilayah tersebut sangat heterogen. Penduduk yang bermukim di wilayah Deli terdiri dari berbagai suku/ras. Selain itu, kehadiran kaum buruh perkebunan juga berperan meningkatkan jumlah penduduk di wilayah itu. Adapun komposisi buruh berdasarkan suku bangsa yang bekerja di perkebunan Sumatera Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1: Komposisi Suku Bangsa Tenaga Kerja Perkebunan di Sumatera Timur

Etnis Pekerja	Tahun 1874	Tahun 1884	Tahun 1890	Tahun 1900	Tahun 1916	Tahun 1926
Tionghoa	4.476	21.136	53.806	58.516	43.689	27.133
Jawa	316	1.771	14.847	25.224	150.329	194.189

Tahun	Perekrutan di tempat Asal			Perekrutan di Sumatera Timur			Perekrutan di Sumatera Timur Warga Setempat		
	Cina	Jawa	India	Thailand	Bawean	Banjarmasin	Batak	Melayu	Mandailing
1886	31.732	4.453	1.975	10	1.180	269	4.248	2.910	-
1887	33.526	6.186	1.623	75	1.020	1.087	3.905	2.211	-
1888	44.790	9.503	2.123	-	1.353	1.853	5.521	3.078	-
1889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	53.806	14.847	2.461	-	1.212	4.098	3.434	372	398
1891	54.715	-	2.850	-	1.282	4.787	3.405	351	385
1892	39.963	15.850	2.415	-	431	2.885	2.368	561	-
1893	41.051	10.347	2.294	-	708	2.823	2.317	836	-
1894	42.876	11.179	2.272	-	825	3.155	2.860	1.150	-
1895	48.204	13.443	2.570	-	833	3.036	3.232	1.134	-
1896	48.548	15.908	2.585	-	770	2.702	2.413	1.162	-
1897	49.407	17.605	3.139	24	1.072	2.760	2.292	571	-
1898	50.862	19.291	3.360	-	877	3.085	2.101	687	-
1899	56.000	23.022	3.000	-	-	-	-	-	-
1900	59.038	32.000	3.295	-	946	3.101	1.433	289	-
1901	54.489	30.484	4.140	-	721	2.869	983	409	7
1902	55.287	29.457	3.529	-	725	2.960	993	378	136

Sumber: Berman, 1977: 65.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 1881 hingga 1902 tenaga kerja (buruh) yang paling banyak direkrut dari luar Sumatera Timur adalah orang Cina, yang kemudian diikuti oleh orang Jawa. Sedangkan buruh yang

paling sedikit direkrut dari Sumatera Timur adalah orang Mandailing dan buruh yang terbanyak yang berasal dari Sumatera Timur adalah orang Batak.

Peningkatan jumlah buruh Jawa yang dipekerjakan di perkebunan Sumatera Timur karena kepercayaan para pemilik perkebunan mulai tumbuh kepada kaum buruh dari Jawa. Selain itu, harga buruh Jawa lebih murah daripada buruh yang berasal dari Tionghoa, baik dalam hal upah maupun dalam hal dana transportasi dari asalnya ke Deli. Dalam kondisi yang demikian, buruh Jawa menjadi pilihan terbaik untuk dijadikan buruh di perkebunan. Para buruh Jawa juga banyak yang bersedia dikirim ke Sumatera Timur untuk dipekerjakan di perkebunan. Kesiediaan kaum buruh Jawa tersebut bertalian dengan menurunnya kesejahteraan penduduk di Jawa (Stoler, 2005: 48).

Masyarakat perkebunan terdiri dari bangsa Eropa, Cina, India, Jawa dan pribumi lainnya. Sensus penduduk pada tahun 1930 yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda menggambarkan multirasilisme penduduk Afdeeling Deli Serdang. Adapun populasi Afdeeling Deli-Serdang pada tahun 1930 sebagai berikut:

Tabel 5.3: Populasi Afdeeling Deli-Serdang Tahun 1930 (Perret, 2010: 41)

Wilayah	Penduduk Asli	Eropa dan Disamakan	Tionghoa	Asia Lainnya	Jumlah
Afd. Deli Serdang	431.599	6.307	88.740	9.357	536.603

Dari data tersebut diketahui bahwa penduduk asli di Afdeeling Deli Serdang adalah 80%. Urutan kedua ditempati orang Tionghoa yaitu 17%. Urutan ketiga ditempati orang Asia lainnya yaitu 2 %.

Adapun populasi asal Nusantara di Afdeeling Deli-Serdang pada tahun 1930 sebagai berikut:

Tabel 5.4: Populasi Asal Nusantara di Afdeeling Deli Serdang Tahun 1930

Suku	Afd. Deli Serdang
Melayu	61.953
Batak	81.012
Aceh	1.167
Minagkabau	11.856
Lain-lain asal Sumatera	1.037
Banjar	14.443
Dari luar Sumatera dan Jawa	797
Jawa	231.044
Sunda	17.516
Madura	822
Batavia	3.899
Banten	3.689
Lain-lain	2.308
TOTAL	431.599

Sumber: Perret, 2010: 42

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah orang Jawa di Afdeeling Deli-Serdang adalah 54%. Penduduk urutan kedua terbanyak di wilayah itu adalah Suku Batak yaitu sebanyak 19%. Penduduk urutan ketiga terbanyak ditempati Suku Melayu yaitu 14%.

Pada tahun 1930 Suku Batak di Afdeeling Deli Serdang berjumlah 81.012 orang. Suku Batak tersebut terdiri dari beberapa sub-suku Batak. Adapun rincian sub-suku Batak di Afdeelling Deli Serdang sebagai berikut:

Tabel 5.5: Populasi Suku Batak di Afdeeling Deli Serdang Tahun 1930

BATAK	Afdeeling Deli Serdang
Batak tanpa perincian	3.608
Angkola	1.148
Karo	37.341
Mandailing	20.198
Padang Lawas	23
Pakpak	55
Simalungun	16.167
Toba	2.472
Total	81.012

Sumber: Perret, 2010: 42.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentasi Batak terbanyak di Afdeeling Deli-Serdang adalah Batak Karo yaitu 46%. Urutan kedua ditempati Batak Mandailing yaitu 25%. Sedangkan urutan ketiga ditempati Batak Simalungun yaitu 20%.

5.2 Terciptanya Pemukiman Yang Tersegmentasi Berdasarkan Suku Bangsa

Para buruh yang dipekerjakan di perkebunan Sumatera Timur memperoleh fasilitas pemukiman yang sangat sederhana. Pemukiman yang disediakan pemilik perkebunan adalah barak-barak yang berbentuk bangsal panjang yang dihuni ratusan para kuli/buruh perkebunan. Barak-barak yang ditempati para buruh itu dibangun di sekitar lahan perkebunan. Para kuli/buruh itu ditempatkan di barak-barak berdasarkan suku/bangsa asalnya. Misalnya, buruh Tionghoa bermukim di barak Tionghoa; buruh Jawa bermukim di barak-barak Jawa, buruh India bermukim di barak India, buruh Melayu bermukim di barak Melayu, buruh batak bermukim di barak Batak. Pemilik perkebunan membangun barak-barak sebagai pemukiman para buruh di sekitar perkebunan.

Hal ini dimaksudkan agar para buruh memiliki akses yang mudah untuk masuk lahan perkebunan sebagai tempatnya bekerja. Meskipun barak-barak Jawa dan barak-barak Cina dibangun di sekitar perkebunan, akan tetapi jarak antara barak Cina dan barak Jawa sangat jauh. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan terhadap para buruh. Pengontrolan terhadap para buruh terutama dilakukan pada saat terjadi kerusuhan. Para buruh yang terlibat dalam kerusuhan akan lebih mudah ditindak dengan menempatkan para buruh dalam barak-barak secara berkelompok berdasarkan suku/bangsa. Selain itu, penempatan para buruh berdasarkan suku/bangsa asalnya dimaksudkan agar tidak terjadi pembauran di antara para buruh yang berbeda suku/bangsa. Hal ini dimaksudkan agar buruh tidak bersatu pada dalam menghadapi tekanan-tekanan pekerjaan dari tuan-tuan kebun.

Kuli-kuli ditempatkan pada barak-barak yang berbeda dan berkelompok-kelompok. Kelompok kuli Cina ditempatkan pada daerah tersendiri, begitu juga dengan kelompok kuli Jawa. Mereka tidak boleh membaur dan hal ini memang sengaja diciptakan untuk memudahkan pengontrolan dan pengamanan, sebab pengusaha tidak ingin mereka bersatu karena dapat membahayakan kelangsungan perusahaan.

Pada umumnya barak-barak pemukiman orang Cina jauh lebih baik dibandingkan dengan barak-barak yang menjadi pemukiman Cina. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan orang Cina dalam masyarakat pada masa

pemerintahan kolonial Belanda ditempatkan di bawah kelas orang Eropa. Sedangkan kedudukan penduduk pribumi ditempatkan di bawah kelas orang Cina (Asia lainnya). Oleh karena itu, dalam pengganjian antara kuli Cina dan kuli Jawa juga juga berbeda. Buruh Cina menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima buruh Jawa. Perbedaan upah buruh Cina dan buruh Jawa dapat diketahui dari tabel pengganjian para buruh di perkebunan Sumatera Timur. Adapun upah yang diterima kaum buruh di perkebunan di Sumatera Timur sebagai berikut:

Tabel 5.6: Daftar Upah/Gaji di Perkebunan Sumatera Timur

Tahun	Kuli Pribumi		Kuli Cina	
	Mandor	Kuli Perkebunan	Kuli	Mandor
1910	0,59-1	0,29-0,46,	0,42-1,84	0,84-1,34
1911	0,59-1	0,29-0,46	0,42-1,84	0,84-1,34
1912	0,59-1,25	0,29-0,46	0,45-1,85	0,85-1,35
1913	0,59-1,26	0,30-0,50	0,45-1,85	0,85-1,35

Sumber: Koloniaal Verslag Tahun 1915

Pembayaran upah buruh Cina yang lebih besar dibandingkan dengan upah buruh pribumi tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan buruhnya. Besaran upah yang diterima buruh Cina hampir dua kali dari upah yang diterima buruh pribumi.



Gambar 5.1: Barak-Barak Cina di Perkebunan Deli



Gambar 52: Barak-Barak Jawa

Penempatan buruh di barak-barak dimaksudkan untuk menghemat tanah dan air bersih dan menudahkan pengawasan. Satu barak pada umumnya dihuni oleh ratusan buruh. Pemandokan kuli ditempatkan dalam rumah-rumah berbentuk bangsal-bangsal panjang yang disebut “tanksi”. Setiap tanksi mampu menampung sebanyak-banyaknya 1000 orang pekerja. Jumlah kuli dalam suatu perkebunan berkisar antara 50.000 hingga 70.000 orang. Tanksi-tanksi tersebut

dapat ditempatkan dalam lahan seluas 4 hingga 5 hektar, sedangkan apabila para buruh itu diteampatkan dalam rumah-rumah yang ditempati 2-3 keluarga dibutuhkan 32 hingga 35 hektar tanah. Tanksi dibangun guna menghemat penggunaan tanah untuk pemondokan kuli, pengontrolan air bersih, serta pengawasan umum atas kebersihan dan ketertiban dapat semakin intensif. Pada perkebunan yang tidak memiliki buruh lebih dari 30.000 orang, kuli-kuli ditempatkan pada pondok-pondok besar yang tiap kamarnya berukuran 3 x 4 meter. Setiap kamar digunakan untuk menampung satu keluarga buruh atau 2 – 3 pekerja yang belum menikah. Namun, dimanapun para buruh ditempatkan, pemondokan para buruh di perkebunan masih jauh dari kata layak untuk dihuni pada era kolonial Belanda. Barak-barak kuli kotor dan pengap (Keizerina, 2004: 127).

Banyaknya penghuni satu barak menyebabkan terjadinya masalah kebersihan di barak-barak. Barak-barak yang dihuni para buruh pada umumnya sangat kotor dan pengap. Sisa sampah dan air yang tergenang menambah bau dan kotornya lingkungan tempat tinggal dan menjadi sumber penyakit yang berbahaya. Pemukiman kaum buruh menjadi daerah epidemi penyakit malaria, tipus, cacangan dan disentri. Untuk kakus digunakan lubang-lubang terbuka yang dibuat tidak jauh dari perumahan. Bangsal-bangsals kaum buruh diperkebunan boleh dikatakan sama sekali tidak memiliki perabot rumah tangga, berlantai tanah, ber dinding papan, dan beratap daun enau. Perabot rumah tangga satu-satunya adalah tempat tidur, yang juga berfungsi sebagai meja makan. Bangsal-bangsals pengap karena tidak ada lubang angin. Kaum buruh banyak yang jatuh sakit karena beban kerja yang berat di perkebunan dan pemukiman yang kurang bersih dan sehat. Kaum buruh yang menderita sakit parah dirawat di rumah sakit milik perkebunan. Kemelaratan pemondokan para buruh perkebunan itu sangat kontras dengan kekayaan dan bungalo tuan pemimpin perusahaan (Bremen, 1992-121).

Penempatan para kuli secara berkelompok berdasarkan suku/ras pada awalnya menumbuhkan persaudaraan antara sesama kuli. Namun, penempatan kuli secara berkelompok itu menyebabkan tidak adanya privasi para buruh. Para kuli yang menikah atau yang telah memiliki pasangan tinggal pada bangsal yang sama, yang hanya disekat dengan karung-karung seadanya saja. Perempuan yang belum menikah juga ditempatkan pada bangsal yang sama. Kondisi yang demikian memicu terjadinya konflik, terutama antara kuli-kuli Cina dengan kuli-kuli Jawa. Untuk memperkecil konflik antara para kuli, pemilik perkebunan menetapkan dan memberlakukan aturan tentang larangan kuli-kuli perempuan

memasuki bangsal-bangsal kuli-kuli Cina. Rumah tuan kebun dan pemondokan kaum buruh merupakan lambang hierarki sosial/ stratifikasi sosial. Tuan kebun dan karyawan orang Eropa menempati bangunan/rumah yang sangat besar dan bersih, serta memenuhi standar kesehatan. Sedangkan para buruh menempati pemondokan atau bangsal-bangsal yang pengap dan tidak memenuhi standar kesehatan (Kartodirdjo, 1991: 149-150).

Pemukiman masyarakat perkebunan merupakan suatu kawasan yang terdiri dari unsur sosial-ekonomi yang berbeda-beda, akan tetapi tidak terpisahkan dalam hubungan sistem produksi yang berlangsung di dalam perkebunan. Akibatnya, sering terjadi kontradiksi dalam kehidupan bermasyarakat. Pertentangan kepentingan menyebabkan intensitas konflik dan ketegangan yang sangat tinggi. Selain itu, tidak ada ikatan solidaritas antara masyarakat perkebunan yang mampu mencegah dan meleraikan setiap konflik dan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat perkebunan (Kartodirdjo, 1991: 144).



Gambar 5.3: Rumah Sakit Deli

Kehidupan kaum buruh pribumi di perkebunan sangat memprihatikan. Sedangkan kehidupan pemilik perkebunan (tuan kebun) bergelimang kemewahan dan kenikmatan. Para tuan kebun menempati rumah-rumah yang sangat besar dan bersih. Bahkan rumah-rumah tempat tinggal tuan-tuan kebun

dan orang Eropa yang bekerja di perkebunan sangat mewah dan memenuhi persyaratan rumah sehat dan sangat layak.



Gambar 5.4: Rumah Asisten Kebun

5.3 Terciptanya Stratifikasi Sosial Baru di Perkebunan

Pembukaan perkebunan di Deli dan Sumatera Timur umumnya menyebabkan terciptanya stratifikasi sosial baru di perkebunan tersebut. Struktur dan fungsi sosial dalam masyarakat perkebunan didasarkan pada hubungan kerja dan etnis. Dalam masyarakat perkebunan ditemukan empat golongan pembagian tenaga kerja yaitu pertama, administratur yang terdiri atas orang-orang Eropa; kedua, pegawai staf yang terdiri dari asisten dokter orang-orang Eropa; ketiga, pegawai non staf yang terdiri atas dokter-dokter pribumi, dan keempat, buruh yang terdiri atas buruh laki-laki dan buruh perempuan yang berasal dari etnis Cina, Keling, Jawa dan Batak (Lukitaningsih & Padmo, 2004: 41).

Dalam masyarakat perkebunan juga ditemukan pembagian masyarakat dalam beberapa kelas. Kelas pertama, adalah penguasa yaitu Pemerintah Hindia Belanda. Kelas kedua adalah kelas kapitalis yaitu pemilik modal yang berasal dari orang-orang Eropa. Kelas ketiga adalah kelas plotariat yaitu para pekerja

perkebunan. Kelas lain yang juga termasuk masyarakat perkebunan adalah para penguasa lokal yaitu para sultan yang menjadi pemilik tanah yang dijadikan lahan perkebunan.

Tuan kebun dan asisten perkebunan adalah orang Belanda atau orang Eropa lainnya. Sedangkan mandor terdiri dari kaum pribumi, Tionghoa ataupun Tamil. Para mandor bertugas membantu para asisten untuk melakukan pengawasan langsung dan mengkoordinir pekerjaan yang dilakukan oleh para kuli perkebunan. Para mandor juga menjadi perantara antara kuli perkebunan dengan para asisten. Para mandor bertugas menyampaikan informasi dan pesan dari para asisten kepada para kuli. Para asisten Belanda yang tidak menguasai bahasa dari para kuli perkebunan menjadi sangat tergantung kepada para mandor. Tuan-tuan kebun dibantu oleh beberapa administrasi yang mengurus administrasi dan keuangan kebun, termasuk gaji dari para kuli perkebunan.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat perkebunan ditentukan jabatan dalam pekerjaan. Para kuli dibawah pimpinan mandor harus patuh kepada asisten. Para kuli dibagi dalam beberapa regu yang dipimpin oleh seorang mandor. Mandor juga bertugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dari para kuli yang dibawah pimpinannya.

Stratifikasi sosial masyarakat perkebunan selain dipengaruhi jabatan dalam pekerjaan juga dipengaruhi oleh etnis orang yang bermukim di perkebunan. Orang-orang Eropa dianggap sebagai kelas atas dan para kuli ditempatkan pada lapisan paling bawah. Warna kulit dan asal etnis ikut menentukan posisi pekerjaan dalam perkebunan. Orang-orang Keling didatangkan dari Pinang untuk melakukan pekerjaan drainase. Dari Pinang juga didatangkan tukang kayu Tionghoa untuk membangun dua rumah kayu yaitu satu rumah besar untuk pekebun dan satu rumah lebih kecil untuk pegawai Eropa. Kemudian orang-orang Boyang yang direkrut dari Singapura mendirikan bangunan-bangunan lain, gubuk jerami dan pondok. Sementara pembangunan berjalan, diadakan kesepakatan dengan penduduk setempat mengenai pembukaan hutan dan pasokan bahan-bahan bangunan yaitu rotan dan atap untuk bangunan ringan. Penduduk setempat dan orang-orang Banjar dipekerjakan untuk membangun bangsal-bangsal yang digunakan sebagai tempat pengeringan tembakau. Setelah pembukaan hutan selesai, buruh-buruh Tionghoa direkrut dari Pinang, Singapura atau Deli sendiri (Perret, 2010: 181-182).

Lebih lanjut Breman (1995: 98-99) menjelaskan pembagian kerja berdasarkan etnis dan suku setiap pekerja perkebunan sebagai berikut:

“Untuk kerja menggali tanah dan membuat jalan digunakan orang-orang Jawa, orang Bawean ternyata cocok untuk membangun bangsal-bangsal pengeringan dan perumahan kuli. Orang Keling baik untuk pekerjaan menggali tanah. Orang Banjar dan Siam secara berkelompok membangun lumbung pengeringan. Orang Melayu mau jadi kusir. Orang Batak turun juga dari pegunungan mereka yang selalu hijau dan mencoba mendapatkan upah dengan membangun rumah dan menebang hutan, namun pekerja pokok tetaplah orang Cina”.

Pembagian kerja berdasarkan etnis dan suku setiap pekerja perkebunan berperan dalam menumbuhkan rasialisme di dalam masyarakat perkebunan. Dengan kata lain, rasialisme telah membentuk sebuah pola di dalam masyarakat perkebunan. Hal ini tentunya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat dalam membentuk stereotipe dari masing-masing suku yang dipekerjakan di perkebunan.

Struktur masyarakat perkebunan menggambarkan fungsi sosial dalam masyarakat yang hierarkis. Semua kegiatan yang dilakukan masyarakat di perkebunan merupakan sebuah jaringan yang bekerja sama secara terorganisasi dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat yang harus dipatuhi oleh semua elemen masyarakat yang terdapat di dalam perkebunan. Misalnya, peraturan jam kerja para buruh yang diatur dalam Koeli Ordonantie mengharuskan para buruh harus bekerja mulai pukul 05.30 pagi hingga pukul 17.30 sore. Jam istirahat para buruh ditetapkan mulai pukul 11.00 hingga pukul 12.00. Hari libur para buruh perkebunan ditetapkan hanya pada hari penerimaan upah (Lukitaningsih & Padmo, 2004: 43).

Kehidupan sosial para buruh di perkebunan diatur dan dikekang oleh pemilik perkebunan. Kehidupan para buruh dipenuhi dengan rutinitas pekerjaan dengan jadwal pekerjaan yang padat, sehingga tidak dapat keluar dari perkebunan. Padatnya jadwal pekerjaan para buruh perkebunan dideskripsikan Jan Breman sebagai berikut:

Cuti hari gajian dua kali dalam sebulan dianggap sebagai hari berhenti kerja resmi, tetapi sama sekali bukan hari libur. Pagi-pagi sekali para kuli mendapatkan berbagai pekerjaan-menyapu jalan, membersihkan sampah sekitar bangunan, dan lain-lain, sebelum penghitungan bayaran setengah bulan dimulai. Untuk pekerjaan ekstra itu, kuli tidak dibayar sama sekali. Baru setelah jam-jam itu para pekerja dapat melakukan apa yang mereka kehendaki, itupun hanya dalam batas-

batas tertentu. Tetapi paling tidak, pada hari itu biasanya mereka dapat meninggalkan perkebunan untuk berkunjung ke ibukota yang dekat dengan perkebunan. Pada hari-hari biasa tidak dikenal waktu libur. Kuli baru pulang kerja sesudah gelap atau terus bekerja di ladang pada malam hari.

Pemilik perkebunan dapat melakukan tindakan semena-mena terhadap para buruh. Tuan kebun menerapkan hukum sendiri dalam mengatasi setiap persoalan hukum di dalam perkebunan dengan 'pengadilan' sendiri. Pengadilan yang diberlakukan tuan kebun pada prinsipnya bertujuan agar para buruh perkebunan harus selalu berada di perkebunan dan terus bekerja. Bahkan jika terjadi pemberontakan di luar perkebunan, asal tidak mempengaruhi produksi dan sistem pekerjaan di dalam perkebunan para tuan kebun tidak peduli. Praktik negara dalam negara itu berjalan sejak awal pembukaan perkebunan oleh Nienhuys. Bagi tuan kebun praktik ini merupakan fasilitas yang memadai untuk menghukum para kuli yang bekerja dengan malas. Derita tentang hukuman para kuli itu tidak pernah dicatat, bahkan menjadi rahaasia kebun (Said, 1990: 51). Peraturan yang ditetapkan pemilik perkebunan mengakibatkan para kuli kontrak menjadi anggota masyarakat yang dikategorikan sangat miskin. Para kuli dipaksa untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemilik perkebunan. Para tuan kebun memperbudak para kuli di perkebunan. Kehidupan di dalam perkebunan memiliki struktur sosial yang melambangkan struktur kekuasaan sosial. Dalam pengelompokan masyarakat di perkebunan, para buruh yang populasinya lebih besar dibandingkan dengan orang Eropa tetap menjadi golongan paling rendah. Para buruh seperti tidak berdaya dalam melawan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik perkebunan. Para kuli menerima peraturan dan perlakuan yang menggunakan kekerasan dari tuan kebun.

5.4 Timbulnya Masalah-Masalah Sosial

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah mendukung pembukaan perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Pembukaan perkebunan diikuti dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan tuan-tuan kebun atau pemilik perkebunan. Pada umumnya peraturan yang diberlakukan para tuan kebun bertujuan untuk menguntungkan pemilik perkebunan di satu pihak. Pada pihak lain, para buruh yang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut sangat dirugikan. Bahkan peraturan-peraturan yang diberlakukan tersebut memicu

timbulnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat perkebunan pada era pemerintahan kolonial Belanda. Adapun masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat perkebunan sebagai berikut: Pergundikan, Pelacuran dan Penyakit kelamin, Perjudian, Kriminalitas dan Kekerasan.

Pada awal pembukaan perkebunan Deli hanya diisi oleh para laki-laki yang populasinya terdiri dari para pengusaha Eropa yang kesepian, staf laki-laki Eropa dan kuli laki-laki Asia. Nienhuijs merupakan pengusaha perkebunan di Deli yang pertama kali mempekerjakan 120 orang kuli Tionghoa yang didatangkannya dari Penang, Malaka (sekarang Malaysia). Kesuksesan Nienhuijs dalam membangun perkebunannya di Deli, telah menarik minat para pengusaha Eropa lainnya dan bukan hanya orang Belanda. Nama-nama perkebunan seperti Karlsruhe, Saint Cyr, Frankfurt, Perseverance, Helvetia, Gallia, dan Polonia menunjukkan berbagai negara asal para pemilik perkebunan. Peningkatan jumlah perkebunan turut serta mempengaruhi meningkatnya kebutuhan para buruh yang dipekerjakan di perkebunan tersebut. Tenaga buruh sangat dibutuhkan untuk dipekerjakan di perkebunan. Meskipun lahan perkebunan sudah tersedia, namun tenaga buruh justru langka. Pada awal 1870-an, Deli dan wilayah sekitarnya dihuni kurang lebih 20.000 orang Batak yang tinggal tersebar dipedalaman dan sekitar 12.000 orang Melayu yang umumnya tinggal di pesisir pantai. Penduduk setempat kurang tertarik bekerja di perkebunan, sehingga dilakukan perekrutan kuli kontrak dalam jumlah yang besar dari daerah terdekat seperti Malaka, Cina dan Jawa. Jika sebelumnya para kuli berada dalam kondisi yang memprihatinkan, setelah direkrut untuk bekerja di Perkebunan Deli merekapun kembali pada kondisi yang juga tanpa harapan. Para majikan Eropa menganggap kuli-kuli kontrak itu sebagai bagian inventaris yang dapat dijadikan hak milik dengan mudah. Para kuli kontrak juga merasa menjual jiwanya kepada majikan Eropa. Ketidakadilan dan penderitaan yang dialami sudah mulai dari proses pengontrakan yang didasari oleh prinsip utang. Sang kuli menandatangani kontrak dan menerima uang muka yang harus dilunasi secara berkala. Pada pelaksanaan uang muka dan sistem pelunasan para pengusaha perkebunan (dan para perekrut kuli) menggunakan cara-cara yang kejam. Penipuan memainkan peran utama dalam perekrutan kuli-kuli di Jawa.

Para kuli tidak selalu menerima upah mereka dalam bentuk uang, kadang-kadang sebagian atau seluruhnya upah mereka dialihkan tanpa sepengetahuan para kuli dalam bentuk estate-bons (kupon-kupon perkebunan) yang hanya dapat ditukarkan di warung atau kedai perkebunan. Kontrak tertutup itu masih ditambah dengan sejumlah ketentuan mengikat untuk para kuli. Pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan diganjar dengan hukuman berat. Jika kontrak habis para majikan mengupayakan penipuan berulang-ulang untuk menjerat kembali para kuli. Pada saat seperti itu di perkebunan mendadak disediakan berbagai macam hiburan, seperti para kuli diberi kesempatan untuk melakukan hobi berjudi mereka, diselenggarakan pertunjukan-pertunjukan wayang, dan pekerja seks diijinkan masuk perkebunan. Kepala tandil atau kepala pengawas memiliki banyak uang tunai untuk dipinjamkan kepada mereka yang memerlukannya. Hal ini bertujuan agar para kuli kembali berutang, sehingga terpaksa mengajukan kontrak baru. Bahkan untuk mengikat para kuli pada tahun 1880 dilaksanakan ordonansi kuli. Ordonansi kuli memungkinkan para buruh untuk dihukum jika melarika diri, menolak bekerja, atau bersalah atas 'sikap terlalu malas'. Selain itu, hukuman juga dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan para kuli. Contoh daftar pelanggaran: penghinaan atau ancaman terhadap majikan Eropa dan pegawai-pegawainya, perlawanan dalam arti yang sangat luas, menghasut dan bermabuk-mabukan, hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kontrak kerja. Tentu saja hal ini memicu terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan, pemerasan, dan penganiayaan. Para majikan pun cuci tangan dari masalah tersebut dan tetap tinggal tanpa dikenai hukuman (Baay, 2017: 141-147).

Sesudah tahun 1870 jumlah laki-laki Eropa (Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Swiss, Austria, Polandia dan Hongaria) yang datang ke Deli meningkat. Mereka datang untuk mendirikan perkebunan atau bekerja sebagai pegawai perkebunan (jumlah mereka merupakan yang terbesar). Orang-orang Eropa pada awal pembukaan perkebunan di Deli kebanyakan masih muda dan lajang. Hal ini merupakan kebijakan perusahaan yang menetapkan larangan menikah selama 6 tahun pertama bagi orang Eropa yang bekerja di perkebunan. Larangan menikah tersebut didasari keyakinan bahwa selain tanggung jawab di dalam perkebunan seorang pegawai Eropa muda tidak akan mampu memikul tanggung jawab terhadap seorang isteri Eropa atau keluarga. Selain itu, para asisten dikhawatirkan tidak mampu membiayai pernikahan dengan perempuan Eropa. Mereka juga berpendapat seorang perempuan Eropa tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan kerasnya kehidupan membuka lahan Sumatera (Baay, 2017: 148-150).

Peningkatan permintaan akan tenaga para buruh perkebunan Deli, maka dilakukan perekrutan buruh perempuan pribumi dalam skala besar. Di satu sisi perekrutan buruh perempuan dilakukan untuk memenuhi permintaan terhadap buruh kontrak yang kian meningkat, di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan

sosial dan seksual para kuli kontrak Asia lajang yang terus bertambah. Banyaknya kuli laki-laki yang berkumpul dalam kehidupan yang keras dan tanpa hiburan merangsang munculnya perilaku sodomi dan pederasty di barak-barak. Para kuli muda melacur atau terdorong untuk berperilaku seksual menyimpang (sebagai tanda kesedian mereka, mereka menghias tempat tidurnya di barak). Mereka dijuluki anak djawi, anak-anak sapi, sebuah julukan halus bagi pemuda yang menjalani hidup yang menyedihkan (Baay, 2017: 151).

Para buruh perempuan mayoritas datang dari Jawa, biasanya berasal dari kelompok masyarakat yang sangat miskin. Hidup para buruh perempuan lebih berat dari pada buruh laki-laki karena dalam hierarki dunia perkebunan posisi mereka merupakan yang paling rendah. Di antara para kuli juga terjalin hubungan pernikahan yang disebut kawin kontrak. Hubungan pernikahan tersebut ditandai dengan ikatan-ikatan yang longgar. Di dalam perkebunan mustahil terjalin hubungan sosial yang erat serta kehidupan berkeluarga yang normal. Hal yang sering terjadi adalah para isteri kuli melacurkan diri, dialihkan kepada orang lain atau menjadi teman tidur bagi banyak kuli. Keadaan ini semakin diperparah oleh rendahnya gaji kuli perempuan di perkebunan. Para kuli perempuan mendapat bayaran lebih rendah dari rekan kuli laki-laki mereka. Mereka hanya menerima upah sebesar 8 sen perhari, padahal diperhitungkan dibutuhkan 15 sen untuk makan dan itu belum termasuk untuk sirih dan jajanan.

Akibatnya para kuli perempuan tidak mampu bertahan hidup dengan upah yang diterima dari kerja di perkebunan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak kuli perempuan yang mencoba mencari solusinya pada pelacuran. Setiap perempuan menerima sepertiga dari biaya hidupnya selama sehari setiap kali melacurkan diri, yaitu sebesar 6 sen. Kegiatan kuli perempuan yang melacurkan dirinya merupakan hal yang menyenangkan hati para pemilik perkebunan mengingat masalah sodomi dan pederasty yang terjadi di antara para buruh kontrak. Bahkan ada upaya para pemilik perkebunan agar para kuli perempuan melacurkan diri yaitu dengan tidak menyediakan tempat tinggal bagi para kuli perempuan yang baru datang. Dengan demikian para kuli perempuan tersebut harus secepat mungkin mengambil langkah-langkah awal dengan para kuli laki-laki agar bisa memperoleh tempat (Baay, 2017: 151).

Dalam pelaksanaannya kuli perempuan tidak hanya memenuhi kebutuhan seksual para buruh laki-laki tetapi juga untuk orang Eropa di perkebunan. Di perkebunan Deli ada sebanyak 110 asisten, yang menikah hanya 12 orang. Di dalam kantor perkebunan dilakukan pemeriksaan terhadap para kuli perempuan yang baru datang dan para pegawai orang Eropa memilih yang paling menawan

dari para kuli perempuan tersebut. Sudah menjadi praktik sehari-hari dalam perkebunan jika seorang buruh perempuan dipanggil oleh seorang penguasa atau pegawai Eropa di tengah kerjanya untuk kemudian memisahkan diri bersamanya. Bukan hal yang penting jika sang kuli perempuan sudah menikah dan bersuami (Pribumi), para laki-laki Eropa beralasan bahwa pernikahan di antara para kuli tidak pantas disebut pernikahan, dilihat dari tindak asusila mereka dan kurangnya kesetiaan para pasangan terhadap pernikahan. Banyak konflik yang muncul antara orang Eropa dan kuli laki-laki sebagai dampak permasalahan perempuan. Bahkan kadangkala kuli laki-laki Jawa diusir oleh asisten perkebunan dari perkebunan karena hubungan yang tidak diperkenankan dengan isterinya. Sesekali tentu ada kuli yang ingin membalas dendam dan menggerakkan para buruh lain untuk menyerang pegawai orang Eropa.

Serangan para buruh tersebut selain menimbulkan ketakutan juga dianggap sebagai penghalang kewibawan orang Eropa. Banyak laki-laki Eropa yang mencari jalan keluar dari masalah mereka dengan para perempuan Asia yang bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan. Tidak hanya untuk hubungan seksual yang bersifat sementara, tapi untuk pergundikan. Pergundikan itu tersebar sangat luas di lingkungan para pengusaha perkebunan. Dengan alasan para pemuda Eropa bisa belajar bahasa dan adat istiadat di Hindia Belanda dari gundik mereka, perusahaan-perusahaan menawarkan seorang nyai kepada para asisten setelah mereka mulai bertugas. Selain itu laki-laki Eropa disarankan untuk memelihara seorang pengurus rumah tangga pribumi agar pemuda Eropa itu terbebas dari urusan rumah tangga yang berat dan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Mereka berpendapat bahwa iklim tropis dan makanan yang berempah memperkuat kebutuhan seksual tersebut. Para asisten memilih seorang kuli perempuan (seorang nyai) yang menjadi pembantu rumah tangga sekaligus teman tidur.

Pergundikan dengan seorang perempuan pribumi merupakan solusi yang baik bagi banyak laki-laki Eropa di Deli. Para kuli perempuan jarang menjadi nyai melalui cara yang romantis. Sang laki-laki biasanya memerintahkan seorang kuli perempuan yang mau berhenti bekerja di perkebunan dan mengurus rumah tangga di rumah tuan. Bahkan sang perempuan pribumi dengan mudahnya diserahkan dari satu orang Eropa kepada yang lain. Seorang kuli perempuan yang menjadi nyai, maka statusnya kerap menjadi tidak jelas. Ia adalah seorang kuli, pengurus rumah tangga sekaligus pasangan dan semua mungkin dalam pelaksanaannya. Perlakuan yang diterimanya sebagai gundik tentu berkaitan dengan orang Eropa yang menjadi majikannya dan budaya perkebunan di Deli,

yaitu budaya dengan kedudukan inferior para kuli perempuan dan rasisme sebagai unsur penentu di dalamnya. Di dalam budaya perkebunan Deli, orang Eropa harus memenuhi citra sebagai laki-laki yang kasar, jantan, dan heteroseksual yang jelas tidak lembut dalam memperlakukan perempuan Asia.

Cara bergaul laki-laki Eropa dengan perempuan Asia berdampak merugikan perempuan. Para laki-laki Eropa tidak segan melakukan penganiayaan terhadap para kuli perempuan. Sebagian besar pemuda Eropa melihat pergundikan dengan perempuan Asia sebagai jalan keluar darurat, hingga saatnya tiba untuk menikah dengan perempuan Eropa yang dianggap sesuai. Oleh karena itu kehadiran anak-anak dalam hubungan dengan gundiknya sama sekali tidak diinginkan. Seorang gundik yang hamil di luar kehendak sang majikan akan diperintahkan pergi, tapi ada juga yang disuruh pergi setelah persalinan. Ada dua kemungkinan sang nyai kembali ke barak kuli untuk membesarkan anak-anak. Ada juga anak-anak yang diakui oleh ayah Eropa mereka dan sang nyai tidak langsung diperintahkan pergi. Biasanya sang nyai diperintahkan pergi ketika anak-anak dikirim ke tanah air sang laki-laki untuk mengenyam pendidikan atau ketika sang ayah kembali ke Eropa bersama anak-anaknya. Dalam kasus seperti itu pun sang nyai kembali ke barak para kuli. Jika beruntung para laki-laki Eropa mengembalikan perempuan itu ke tanah kelahirannya ke Jawa (Baay, 2017: 158-163).

Pola pelacuran yang berlangsung di perkebunan berbeda dengan pola pelacuran saat ini. Perempuan di dalam perkebunan dianggap sebagai pelacur secara keseluruhan atau semua perempuan di perkebunan terpaksa menjadi pelacur. Kuli-kuli perempuan yang hampir semuanya orang Jawa dipaksa melacurkan diri, melayani kebutuhan seksual dan pelayan rumah tangga umum dari para pekerja laki-laki dan pihak manajemen. Upah seorang kuli perempuan hanya separuh upah dari kuli laki-laki dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, apalagi untuk keperluan lainnya (Stoler, 2005: 49). Gaji kuli perempuan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong mereka melacurkan diri guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pola pelacuran untuk kuli Cina berbeda, mereka melakukan hubungan sejenis (homoseksual) di antara mereka. Hubungan homoseksual semakin meningkat di barak-barak kuli Cina yang tidak ada perempuannya atau sedikitnya perempuan di dalam perkebunan. Hubungan homoseksual di antara kuli Cina berlangsung di depan banyak orang. Pelacur laki-laki memiliki tempat tidur sendiri, yang dilengkapi dengan gordena yang dihias dengan berbagai aksesorisnya (Breman, 1997: 205).

Gonta-ganti pasangan baik sejenis maupun berbeda jenis kelamin di dalam perkebunan merupakan hal yang biasa. Bahkan pasangan yang sudah menikahpun tidak setia terhadap pasangannya. Kondisi yang demikian, mengakibatkan maraknya penyakit kelamin atau penyakit menular seksual di dalam perkebunan. Sebagaimana dideskripsikan oleh Stoler (2005: 50-51) bahwa di sebuah bangsal rumah sakit ditemukan para pelacur perempuan Jawa, Cina dan Jepang yang menderita penyakit kelamin. Para perempuan penderita sifilis berbaring bersama-sama penderita malaria yang tengah sekarat, penderita beri-beri yang bengkak dan penderita lepra (kusta).

Prostitusi berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat perkebunan. Keributan yang terjadi karena perebutan kuli perempuan berujung perkelahian bahkan pembunuhan. Kriminalitas dan kekerasan seringkali berlangsung di dalam perkebunan. Kriminalitas dan kekerasan tidak hanya dipicu oleh prostitusi, tetapi juga karena pelaksanaan peraturan (ordonansi) yang sangat memberatkan para kuli kontrak yang bekerja di perkebunan. Penerapan Poenale Santie merupakan senjata pamungkas para pengusaha bertindak sewenang-wenang kepada para kuli kontrak yang mencoba melawan atau kabur dari perkebunan. Tindakan sewenang-wenang dari tuan kebun memunculkan kebencian para kuli kontrak terhadap tuan-tuan kebun dan mandor-mandornya. Tuan-tuan kebun dan mandor-mandornya yang sangat keras dan kejam terhadap kuli kontrak seringkali diserang oleh kuli kontrak. Serangan-serangan yang dilakukan oleh kuli kontrak menyebabkan korban luka-luka dan korban meninggal di dalam perkebunan. Sejak tahun 1912 hingga 1921 terjadi 311 serangan yang menewaskan 7 orang mandor dan tuan kebun. Di Sumatera Timur sejak tahun 1922-1927 terdapat 147 serangan kuli kontrak yang menewaskan 8 orang tuan kebun atau mandor (Said, 1990: 177-181). Meningkatnya kasus kekerasan di dalam perkebunan memaksa Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang Undang baru yang bertujuan untuk meminimalisasi kekerasan di perkebunan. Dalam Undang undang tersebut ditetapkan bahwa kuli-kuli kontrak yang bekerja di perkebunan dilarang memakai senjata atau barang perkakas lainnya yang dapat digunakan sebagai senjata selama waktu bekerja, kecuali alat yang digunakan untuk bekerja. Pelanggaran atas larangan tersebut akan dikenakan hukuman membayar denda sebesar f. 100 atau kerja paksa pada pekerjaan umum dengan mendapat makan dan tidak mendapat upah selama satu bulan, dan jika pelanggaran itu diulangi dalam tahun itu selama-lamanya 3 bulan dengan dirampas atau tidak dirampas akan barang-barang yang dipakai dalam pelanggaran itu (Surat Kabar *Pewarta Deli*, 23 September 1916).

Selain kekerasan, tindakan kriminalitas yang terjadi dalam perkebunan adalah pencurian. Pencurian itu mungkin saja didorong oleh kecilnya gaji sebagai buruh perkebunan atau karena gaya hidup kuli di perkebunan yang suka menghambur-hamburkan uangnya di tikar-tikar perjudian dan pelacuran. Berita tentang maraknya kasus pencurian terhadap toko-toko ditulis dalam Surat kabar *Pewarta Deli* yang terbit pada 3 September 1916.

5.5 Kota Medan Sebagai Kota Multikultural

Pembukaan perkebunan di Sumatera Timur berperan dalam menciptakan Kota Medan sebagai Kota Multikultural. Perekrutan tenaga kerja (buruh) dari luar wilayah Sumatera Timur telah menambah keragaman suku, ras, agama, budaya pada penduduk Kota Medan. Kondisi masyarakat Kota Medan yang sangat multikultural masih berlangsung hingga kini. Ada berbagai etnik yang mendiami Kota Medan, di antaranya Suku Melayu, Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola, Pakpak), Aceh, Jawa, Minang, Tamil, Tionghoa, Banjarmasin, dan lain sebagainya. Masing-masing suku tersebut membawa budaya masing-masing yang menjadikan keragaman budaya di Kota Medan. Selain suku, agama yang dianut penduduk juga beraneka ragam mulai dari agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu hingga aliran kepercayaan seperti Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Permena, Ahmadiyah, Saksi Jawoha dan lain sebagainya. Keanekaragaman etnis di Kota Medan juga dapat diketahui dari jumlah masjid, gereja, vihara Tionghoa yang tersebar di seluruh Kota Medan. Demikian juga bahasa yang digunakan di Kota Medan cukup beragam di antaranya bahasa Indonesia, Batak, Jawa, Melayu, Hokkien, dan Minangkabau. Keragaman Etnis itu juga dapat diketahui dari penamaan daerah di Kota Medan, misalnya daerah di sekitar Jalan Zainul Aridin dikenal dengan nama Kampung Keling (sekarang disebut Little India), yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India. Selain Kampung Keling, di Kota Medan juga ditemukan pasar tradisional yang penjualannya banyak dari Etnis Tionghoa. Pasar tersebut dinamakan Pasar (Pajak) Hongkong. Pasar Hongkong sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan masih berdiri hingga sekarang layaknya pasar tradisional pada umumnya. Dahulu Pasar Hongkong di Kota Medan merupakan sentra penjualan tekstil.

Namun, sekarang Pasar Hongkong lebih banyak menjual kebutuhan pokok seperti pasar tradisional pada umumnya. Para pedagang di Pasar Hongkong pada umumnya menjual sayur-mayur, hewan (ayam, ikan, daging sapi, makanan seperti kue-kue kering dan kue basah, pakaian dan sejenisnya. Hal ini disebabkan para pedagang tekstil pindah ke kawasan Pajak Ikan Lama yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api dan Jalan Perniagaan Medan. Pasar Hongkong dahulu berdiri di kawasan Jalan Cirebon Medan, tetapi sekitar tahun 1980-an Pasar Hongkong digusur dan direlokasi di kawasan Jalan Surabaya, Medan. Di lokasi yang digusur itu dibangun Hotel Soechi Novotel. Setelah selesai pembangunan Hotel Soechi Novotel, Pasar Hongkong dipindahkan kembali ke lantai dasar (basement) Hotel Soechi Novotel Medan. Baik Kampung Keling (Little India) maupun Pasar (Pajak) Hongkong merupakan destinasi wisata yang menarik di Kota Medan.

Keanekaragaman suku, ras, agama, budaya masyarakat Sumatera Utara umumnya dan Kota Medan khususnya telah tercipta sejak era kolonialisme Belanda di Indonesia (Hindia Belanda). Hal ini berarti Kota Medan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sudah didiami beragam suku dan agama. Pemahaman latar terbentuknya keberagaman masyarakat Kota Medan khususnya dan masyarakat Sumatera Utara umumnya sangat penting dalam menjaga integritas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, julukan “negeri berbilang kaum”, untuk Kota Medan sangat penting disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Pemberian julukan Kota Medan sebagai “negeri berbilang kaum”, bertalian dengan keberagaman penduduk Kota Medan terdiri dari berbagai suku (multi-etnis) dan agama. Meskipun penduduk Kota Medan terbilang banyak suku dan agama, namun konflik yang disebabkan perbedaan antarsuku belum pernah terjadi. Dengan demikian diharapkan semua penduduk Kota Medan mampu merawat iklim saling mempercayai antar seluruh warga, membina dan mengembangkan sikap saling toleransi, saling menghargai dan menghormati dalam kebhinekaan Indonesia demi terwujudnya Indonesia yang damai.



Bab 6

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

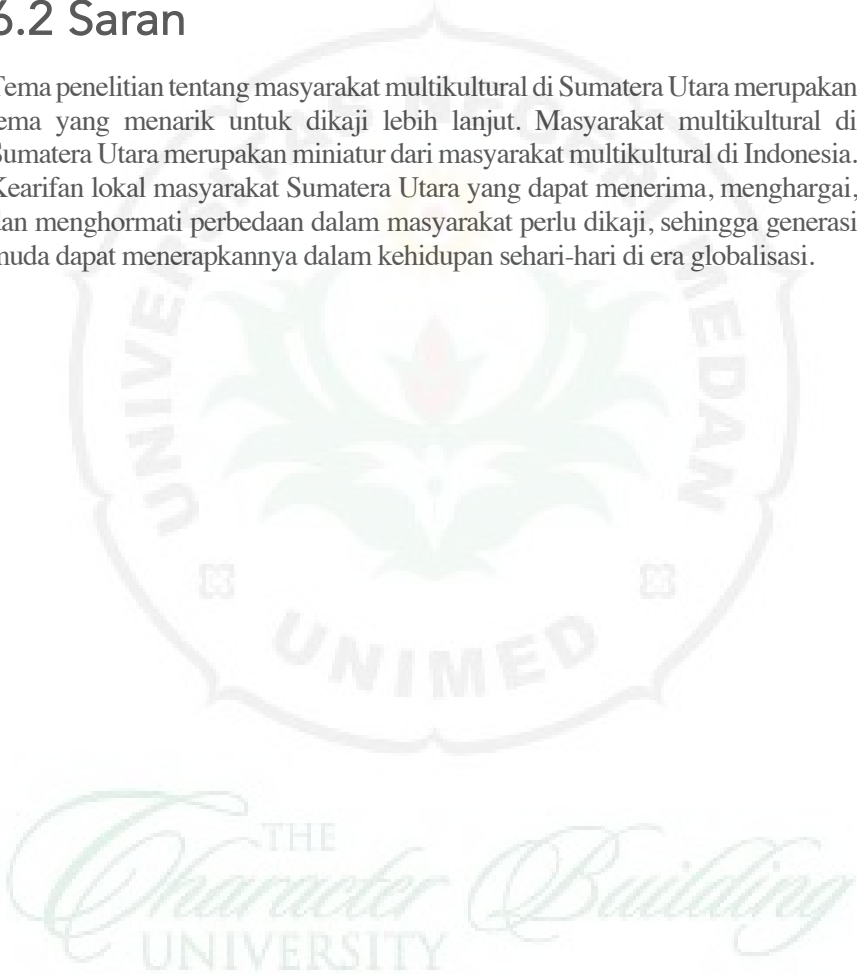
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Utara yang berperan menciptakan masyarakat multikulturalisme di Kota Medan adalah penerapan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 di Hindia Belanda. Penerapan Undang-undang Agraria Tahun 1870 telah memberi kesempatan yang luas kepada pemilik modal di Belanda khususnya dan Eropa pada umumnya untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Penanaman modal tersebut dilakukan dengan pembukaan perkebunan di Deli khususnya dan Sumatera Timur umumnya.

Pembukaan perkebunan di wilayah itu menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk dipekerjakan di lahan-lahan perkebunan. Oleh karena itu, para pemilik perkebunan mendatangkan buruh/kuli dari luar wilayah itu. Para buruh mendatangkan kuli Tionghoa dan India serta Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan.

Dampak kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Utara umumnya dan khususnya di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah terciptanya masyarakat yang multikultural. Keheterogenan masyarakat Kota Medan khususnya dan masyarakat Sumatera Utara bertalian dengan pembukaan perkebunan di Deli khususnya dan perkebunan Sumatera Timur umumnya. Pemahaman latar terbentuknya keheterogenan masyarakat Kota Medan khususnya dan masyarakat Sumatera Utara sangat penting dalam menjaga integritas bangsa Indonesia.

6.2 Saran

Tema penelitian tentang masyarakat multikultural di Sumatera Utara merupakan tema yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Masyarakat multikultural di Sumatera Utara merupakan miniatur dari masyarakat multikultural di Indonesia. Kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara yang dapat menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat perlu dikaji, sehingga generasi muda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi.



Daftar Pustaka

- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Baay, Reggie. 2017. *Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda*. Depok: Komunitas Bambu.
- Bartstra, J.S. 1949. *Geschiedenis van het Moderne Imperialisme*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Blusse, Leonard. 2004. *Persekutuan Aneh: Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. Depok: Komunitas Bambu.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20*. Jakarta: Grafiti
- Knaap, Gerrit J. 1996. *Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java around 1775*. Leiden: KITLV Press.
- Locher, Elsbeth-Scholten. 2008. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: Banana-KITLV.
- Lukitaningsih & Padmo, Soegianto. 2004. *Buruh Perempuan di Perkebunan Karet Sumatera Timur 1900-1940*, *Humanika*, Volume 17 No. 1. Hal. 35-49.
- Marihandono, Djoko. 2005. *Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte*, Disertasi, Depok: Universitas Indonesia
- Momsen, W.J. 1977. *Theories of Imperialism*. New York: Randon House.
- Nagtegaal, Luc. 1996. *Riding The Dutch Tiger*. Laiden: KITLV Press.

- Pelly, Usman, dkk. 1984. *Sejarah Sosial: Daerah Sumatera Utara Kota Madya Medan*. Jakarta: Depdikbud.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*, Penerjemah: Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Said, Mohammad. 1990. *Suatu Zaman Gelap di Deli: Koeli Kontrak Tempo Doeloe Dengan Derita dan Kemarahannya*: Medan: PT. Harian Waspada Medan.
- Sakina, Nurul. 2012. *Kehidupan Kuli Kontrak Orang Cina di Perkebunan Sumatera Timur (1870-1930)*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu budaya Universitas Indonesia.
- Stapel, F.W. 1940. *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*. Jilid V. Amsterdam: Uitgeversmaatschapij.
- Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera*. Yogyakarta: Karsa.
- Wiharyanto, A. Kardiyat, “Pergantian Kekuasaan di Indonesia Tahun 1800” dalam *Jurnal SPPS*, Volume 21, No. 1, April 2017.
- Yasmis. 2007. *Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915*. Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.

KOLONIALISME BELANDA dan MULTIKULTURALISME MASYARAKAT Kota Medan

Penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Sumatera Timur diikuti dengan penerapan berbagai kebijakan di wilayah itu. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penerapan Undang-Undang Agraria pada 1870. Penerapan undang-undang tersebut, membuka peluang kepada pemodal swasta Belanda khususnya dan Eropa umumnya untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Salah satu bentuk penanaman modal adalah pembukaan perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur.

Pembukaan perkebunan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan. Pada awal pembukaan perkebunan, penduduk pribumi Sumatera Timur (Melayu dan Batak) kurang berminat bekerja sebagai buruh di perkebunan. Oleh karena itu, para pemilik perkebunan mendatangkan buruh dari luar wilayah itu yaitu orang Cina, Keling, Jawa, Banjar dan Bawean. Kehadiran para buruh dari luar wilayah Sumatera Timur berdampak terhadap terciptanya masyarakat yang multikultur di Kota Medan.

Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kondisi masyarakat Kota Medan sangat multikultural baik dari aspek suku, ras, agama, budaya maupun status sosial. Dengan kata lain, pembukaan perkebunan di Sumatera Timur telah menciptakan masyarakat perkebunan yang multikultural. Kehadiran kaum buruh perkebunan dari luar Deli menyebabkan penduduk wilayah tersebut sangat heterogen.

Terciptanya masyarakat Kota Medan yang multikultural merupakan dampak dari penerapan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Timur. Oleh karena itu Buku ini diberi judul 'Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan. Buku ini digunakan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah yang mengikuti perkuliahan Sejarah Indonesia Masa Kolonial.



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6512-05-0

